

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 16

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 14 APRIL 2023

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
SUKABUMI TAHUN 2024-2026

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024-2026**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan diktum KEDUA huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 68);

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Pasal 1

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah Kota Sukabumi untuk periode 3 (tiga) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan penjabaran dari fase ke V (lima) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025.
- (2) RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun; dan
 - c. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 April 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
SUKABUMI TAHUN 2024-2026.

**SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
SUKABUMI TAHUN 2024-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan sistem perencanaan pembangunan nasional itu sendiri adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Pasal 260 ayat (1) bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.

Masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi akan berakhir pada tanggal 20 September 2023. Dengan demikian terdapat konsekuensi logis dimana Pemerintah Daerah Kota Sukabumi tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sampai nanti disusunnya RPJMD periode Tahun 2025-2030 yang merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih masa bakti 2025-2030.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yaitu RKPD, yang selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah Daerah Kota Sukabumi harus menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang nantinya akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. RPD ini merupakan kerangka pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025. Selain itu, RPD ini disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan hingga terpilihnya Wali Kota Sukabumi definitif.

Penyusunan

Penyusunan RPD pada prinsipnya sama dengan penyusunan RPJMD, hanya terdapat sedikit perbedaan dalam tahapan penyusunan dan substansi yang terkandung di dalamnya. Dalam penyusunan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Sukabumi sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023;
4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas, kerangka pendanaan dan program perangkat daerah, dan kinerja pemerintahan daerah akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi setiap tahunnya mulai tahun 2024. Adapun tahapan penyusunan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sepenuhnya mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan RPD;
2. Penyusunan rancangan RPD;
3. Forum Perangkat Daerah/Konsultasi Publik (FPD/FKP);
4. Perumusan rancangan akhir RPD;
5. Reviu APIP;
6. Fasilitasi RPD; dan
7. Penetapan RPD.

Penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam penyusunan Rencana RPD Kota Sukabumi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2022;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*);

4. Isu-Isu

4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

RPD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah. RPD menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:

1. Penjabaran pelaksanaan RPJPD periode atau tahap kelima;
2. Perwujudan dari rencana tata ruang wilayah Daerah Tahun 2022-2042;
3. Pedoman akhir dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah;
4. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
5. Instrumen dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pejabat Wali Kota dan kinerja kepala Perangkat Daerah; dan
6. Instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.

Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis dalam RPD dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi.

Dengan disusunnya RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 maka seluruh entitas Kota Sukabumi diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, antara lain:

1. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

1.3 Hubungan antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai amanah dari Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Apabila dilihat dari sisi fungsi dan manfaat RPD maka sebenarnya kedudukannya sama dengan RPJMD hanya perbedaan signifikannya RPD tidak disusun melalui pendekatan politis dimana tidak menjabarkan visi misi dan janji kepala daerah terpilih. Dengan demikian, hubungan antara dokumen RPD dengan dokumen perencanaan lainnya sama maknanya dengan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.

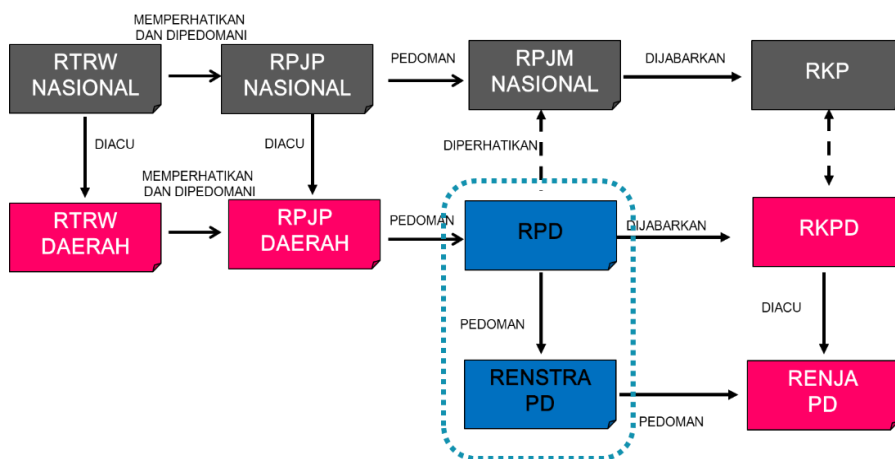
Karena itu, RPD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPD

RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 ini sangat terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan RPD merupakan sebuah dokumen yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024. RPD ini juga menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026 dan akan dijabarkan setiap tahunnya dalam rangka penyusunan RKPD.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan RPD dengan dokumen rencana daerah lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Keterkaitan RPD dengan Dokrenda Lainnya



1.3.1 Hubungan RPD dengan RPJPD

RPJPD memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan dan merupakan pedoman bagi penyusunan RPD. Penyusunan rancangan RPD berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJPD tahap kelima, serta berpedoman pada arah kebijakan pembangunan pada RPJPD tahap keempat yang ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif serta terpadunya antara sektor jasa dan pertanian. Lembaga dan pranata telah tersusun dan tertata serta berfungsi dengan baik. Kondisi ini didukung dengan kemampuan iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian lebih efisien dan produktivitas tinggi.

1.3.2 Hubungan

1.3.2 Hubungan RPD dengan RTRW

Penyusunan RPD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi Tahun 2022-2042. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan kebijakan pembangunan yang harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah kota, program pengembangan wilayah kota, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

1.3.3 Hubungan RPD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana kerja jangka menengah yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

1.3.4 Hubungan RPD dengan RKPD

RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dijabarkan dalam RKPD sebagai perencanaan tahunan Daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD harus berpedoman pada RPD yang artinya harus selaras dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPD. Selain itu rencana program dan kegiatan prioritas tahunan Daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 adalah untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun tujuan penyusunan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjamin

1. Menjamin keselarasan tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2025 dan isu-isu aktual;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
4. Sebagai panduan bagi seluruh entitas di Kota Sukabumi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang berbatasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan terkait latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan keterkaitan RPD dengan dokumen rencana daerah lainnya.

Bab II Gambaran Umum

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pada bab ini juga akan diuraikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018-2022.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Dalam bab keuangan daerah akan diuraikan terkait dengan realisasi APBD tahun 2018-2022 dan proyeksi keuangan tahun 2024-2026.

Bab IV

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam bab permasalahan dan isu strategis akan diuraikan terkait permasalahan yang ada di Kota Sukabumi berdasarkan gambaran umum yang disajikan dalam bab II. Adapun isu strategis akan ditentukan berdasarkan sintesa dari isu strategis lingkup internasional, nasional, regional, lokal, dan rumusan permasalahan.

Bab V Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran yang ditentukan dengan memperhatikan visi dan misi RPJPD, sasaran pokok RPJPD tahap ke empat, dan isu strategis aktual.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Pada bab ini akan diuraikan terkait strategi dan arah kebijakan yang merupakan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Kota Sukabumi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran. Selain itu, pada bab ini akan diuraikan terkait dengan program prioritas daerah.

Bab VII Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini akan dijelaskan terkait dengan rencana pendanaan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan kinerja capaian program periode sebelumnya, isu strategis, dan lainnya serta berpedoman pada pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pada bab ini akan dijelaskan terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Bab IX Penutup

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

A. Posisi Strategis

Kota Sukabumi merupakan sebuah kota terkecil ketiga (setelah Kota Cirebon dan Kota Cimahi) di Provinsi Jawa Barat. Kota Sukabumi dengan luas 48,33 km² berada di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang berada pada ketinggian 584 meter di atas permukaan laut. Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
3. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
4. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Secara administratif, Kota Sukabumi terdiri dari 7 kecamatan dan 33 kelurahan. Adapun luas dataran masing-masing kecamatan yaitu Baros (5,58 km²), Lembursitu (10,69 km²), Cibureum (9,12 km²), Citamiang (4,01 km²), Warudoyong (7,56 km²), Gunungpuyuh (5,15 km²), dan Cikole (6,22 km²).

Gambar 2.1

Posisi strategis Kota Sukabumi juga tetap dipertahankan hingga sekarang. Di mana berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dalam konstelasi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Jawa Barat yang berada di dalam jalur lintasan Jabodetabek dan Bandung Raya, Kota Sukabumi mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pengembangan sektor ekonomi dan sosial kawasan. Karena itu, Kota Sukabumi sangat berpeluang dalam pengembangan perekonomian daerah dan masyarakat. Di samping itu, Kota Sukabumi juga dapat berperan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan investasi, konsumsi, dan distribusi bagi wilayah sekitarnya atau *hinterland*.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Sebagai kota dengan luas wilayah yang relatif kecil, wilayah Kota Sukabumi masih berpotensi untuk dikembangkan lagi secara optimal. Pola penggunaan lahan di Kota Sukabumi tahun 2018 berdasarkan pada hasil pengamatan lapangan dan interpretasi dari foto citra didominasi oleh kegiatan sawah, bangunan permukiman kota, kebun campuran, dan bangunan industri, perdagangan dan perkantoran. Penggunaan lahan terluas yaitu untuk bangunan permukiman kota seluas 1.736,63 Ha atau 35,93 persen dari luas wilayah. Penggunaan lahan sawah seluas 1.661,03 Ha atau seluas 34,37 persen dari total luas wilayah Sedangkan bangunan industri, perdagangan dan perkantoran seluas 340,66 Ha atau 7,05 persen dari luas wilayah.

Berdasarkan RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042, pengembangan wilayah dalam konteks kawasan budidaya direncanakan untuk:

1. Kawasan pertanian tanaman pangan
2. Kawasan perikanan budidaya
3. Kawasan peruntukan industri
4. Kawasan pariwisata
5. Kawasan permukiman
6. Kawasan perdagangan dan jasa
7. Kawasan perkantoran
8. Kawasan transportasi
9. Kawasan pertahanan dan keamanan

Dari

Dari rencana pengembangan kawasan budidaya tersebut, terdapat dua kawasan yang menjadi fokus dalam rangka pencapaian tujuan RTRW Kota Sukabumi. Kedua kawasan tersebut yaitu kawasan pariwisata serta perdagangan dan jasa. Pengembangan kawasan pariwisata direncanakan seluas kurang lebih 20 hektar. Adapun persebaran kawasan pariwisata tersebut berada di Kecamatan Warudoyong, Citamiang, Lembursitu, Gunungpuyuh, dan Cikole. Sementara itu, pengembangan kawasan perdagangan dan jasa akan mencakup seluruh kecamatan dengan luas kawasan kurang lebih 695 hektar.

Pengembangan wilayah Kota Sukabumi tersebut tentunya juga ditunjang dengan rencana pengembangan struktur ruang kota. Di mana, pengembangan tersebut mencakup sistem pusat kegiatan, jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan.

Untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang kota, terdapat beberapa mega proyek yang sedang dan akan dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan. Pembangunan mega proyek tersebut tentunya akan memperkuat posisi strategis Kota Sukabumi dan dapat menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi kota. Beberapa mega proyek tersebut, antara lain:

1. Pembangunan Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi);
2. Pembangunan Jalan Lingkar selatan;
3. Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Bogor-Sukabumi dan Sukabumi-Cianjur-Bandung;
4. Pembangunan sarana angkutan umum masal (SAUM);
5. Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan skema KPBU;
6. Pengembangan Kawasan Wisata Cikundul;
7. Fasilitasi *refused derived fuel* (RDF) persampahan.

C. Tantangan Pengembangan Wilayah

Kota Sukabumi memiliki luas wilayah yang relatif kecil sehingga dalam pengembangan wilayah akan menghadapi berbagai tantangan. Walaupun sebagai kota, namun karakter pertaniannya masih cukup dominan dimana sekitar 34,37 persen lahan yang ada berupa lahan pertanian. Tuntutan pengembangan wilayah menyebabkan alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan kegiatan perkotaan cukup tinggi. Jika hal ini dibiarkan terus menerus tentunya akan mengganggu produksi pertanian. Kondisi tersebut ditambah dengan adanya pembangunan berbagai mega proyek terutama akses transportasi. Sehingga tekanan terhadap perkembangan lahan pertanian akan semakin meningkat.

Tantangan

Tantangan lain dalam pengembangan wilayah Kota Sukabumi yaitu adanya risiko berbagai bencana. Berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana tahun 2021, Kota Sukabumi berada pada angka 102,67 yang berarti masuk dalam kelas risiko sedang. Risiko bencana yang ada di Kota Sukabumi tersebut antara lain:

1. Gempa bumi
Adanya sesar Cimandiri yang membentuk gawir sepanjang 100 km dari Padalarang hingga Pelabuhan Ratu yang terbagi menjadi tiga segmen menyebabkan Kota Sukabumi rawan terhadap gempa bumi.
2. Tanah longsor
Potensi bencana longsor yang bersifat lokal tersebar di bagian utara Kota Sukabumi meliputi Kelurahan Subangjaya, Cisarua dan Karangtengah. Pada bagian selatan Kota Sukabumi potensi longsor berada di Kelurahan Lembursitu dan sebagian di Kelurahan Situmekar, Cikundu, Jayamekar, dan Limusnunggal.
3. Gunung api
Ancaman bencana gunung api yaitu berupa aliran lahar dari Gunung Gede dan Pangrango yang mengalir melalui Sungai Cibeureum, Cipelang, dan Cigunung.
4. Banjir
Berdasarkan peta potensi banjir, hampir seluruh wilayah Kota Sukabumi berada pada ancaman bencana banjir.
5. Cuaca ekstrem
Ancaman cuaca ekstrem tinggi di Kota Sukabumi berada di 22 kelurahan. Adapun ancaman cuaca ekstrem rendah berada di 6 kelurahan.
6. Kebakaran
Tingkat bahaya kebakaran tinggi di Kota Sukabumi hanya berada di Kelurahan Nyomplong dan Karang Tengah.

Adanya risiko bencana tersebut, kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya.

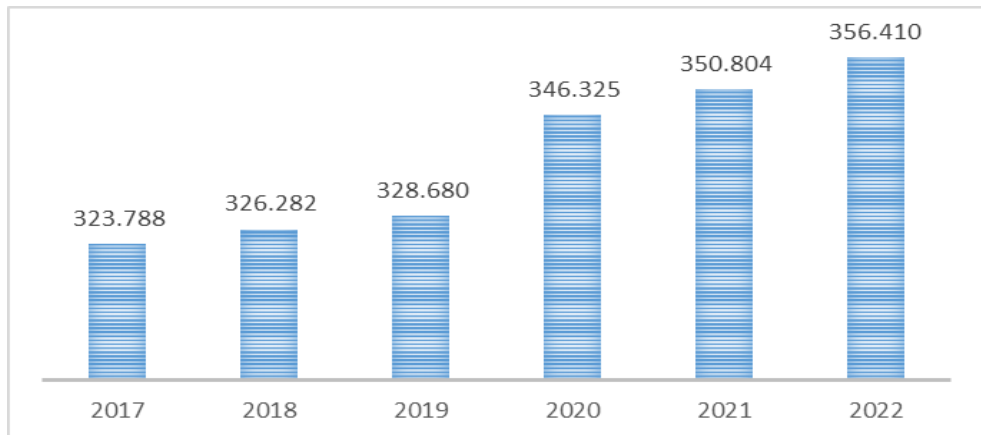
Pada

Pada Tahun 2021, Kota Sukabumi telah melakukan pengukuran kapasitas daerah dalam rangka mengukur kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu. Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh Indeks Kapasitas Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 sebesar 0,49. Artinya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masuk ke dalam kelas kapasitas sedang.

2.1.2 Demografi

Penduduk Kota Sukabumi cenderung bertambah setiap tahunnya. Pertambahan jumlah penduduk terbanyak yaitu di tahun 2020 dimana pertambahannya mencapai 17.645 jiwa. Lonjakan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut dimungkinkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga penduduk yang merantau kembali ke Kota Sukabumi dengan berbagai pertimbangan.

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023 (diolah)

Dari total jumlah penduduk Kota Sukabumi tahun 2022, sebanyak 244.156 jiwa atau 68,50 persen berada pada usia produktif (15-64 tahun). Ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi berada di masa bonus demografi. Hal ini juga dikuatkan bahwa persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja yang mencapai 91,17 persen.

Tingkat

Tingkat kepadatan penduduk Kota Sukabumi tahun 2022 sebesar 7.375 jiwa/km². Jika dirinci menurut kecamatan, Citamiang adalah kecamatan terpadat dan Lembursitu menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah. Di sisi lain rasio jenis kelamin penduduk Kota Sukabumi tahun 2022 berada di kisaran angka 101 yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Sukabumi Tahun 2020-2022

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TAHUN 2020-2022
	2020	2021	2022	
Baros	37.734	38.576	39.548	2,72
Lembursitu	41.432	42.196	43.098	2,28
Cibeureum	44.961	46.025	47.247	2,87
Citamiang	53.049	53.517	54.154	1,19
Warudoyong	58.972	59.511	60.236	1,22
Gunung Puyuh	48.292	48.685	49.230	1,11
Cikole	61.885	62.294	62.897	0,93
Kota Sukabumi	346.325	350.804	356.410	1.65

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023 (diolah)

Laju pertumbuhan penduduk Kota Sukabumi tahun 2020-2022 sebesar 1,65 persen. Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Baros, dan Kecamatan Lembursitu memiliki laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan empat kecamatan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, dimana tiga kecamatan tersebut masih memiliki banyak area yang bisa dikembangkan sebagai wilayah pemukiman.

2.2 Aspek

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan perhitungan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

**Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Sukabumi
Tahun 2018-2022 (ADHK 2010)**

NO	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,92	1,73	0,92	0,76	3,58
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	5,25	5,30	-1,93	2,49	4,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,57	2,95	2,99	8,98	5,90
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,83	5,60	6,85	8,02	6,32
F	Konstruksi	7,70	7,09	-4,06	4,00	-0,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	4,94	4,69	-2,68	3,64	5,47
H	Transportasi dan Pergudangan	5,74	7,17	-6,98	3,41	7,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,39	7,01	-3,41	2,74	9,70
J	Informasi & Komunikasi	9,62	8,75	10,78	8,23	7,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,21	5,58	2,81	4,79	2,57
L	Real Estate	7,74	8,16	-0,86	7,76	6,30
M	Jasa Perusahaan	7,23	7,37	-7,67	7,87	9,13
N	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,51	0,21	-3,93	-2,76	-0,34
O	Jasa Pendidikan	6,04	6,34	4,39	2,88	8,09
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,01	7,49	1,82	7,82	9,85
Q	Jasa Lainnya	8,80	9,15	-0,82	1,42	11,67
	PDRB ADHK (%)	5,52	5,49	-1,48	3,71	5,35

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023

Berdasarkan

Berdasarkan perhitungan PDRB dengan tahun dasar 2010, PDRB Kota Sukabumi pada tahun 2020 sebesar Rp 8,53 triliun. Nilai tersebut meningkat menjadi Rp 8,85 triliun di tahun 2021 dan Rp 9,32 triliun di tahun 2022. Adapun distribusi PDRB tertinggi atas dasar berlaku pada tahun 2022 yaitu dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (38,12 persen), jasa keuangan dan asuransi (11,45 persen), serta transportasi dan pergudangan (10,86 persen).

Jika dilihat dari lapangan usaha, sebanyak 14 lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2022. Di mana 3 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas 10 persen. Sementara 2 lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi pada tahun 2022 yaitu lapangan usaha konstruksi (-0,15 persen) serta administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib (-0,34 persen).

**Tabel 2.3 Target dan Capaian LPE Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (%)	5,65	-1,50	4,45	5,23
Capaian (%)	5,49	-1,48	3,71	5,35

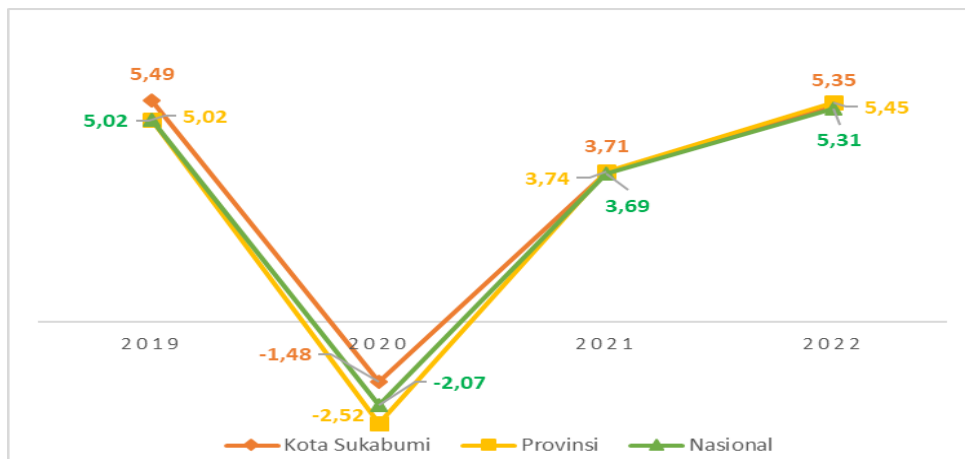
Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMDP Kota Sukabumi 2018-2023

LPE Kota Sukabumi tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar 1,48 persen jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,49 persen. Kontraksi tersebut merupakan dampak dari pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi di tahun 2021 LPE kembali naik di angka 3,71 persen dan meningkat kembali menjadi 5,35 persen di tahun 2022. Keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi.

Gambar 2.3

Gambar 2.3 Perbandingan LPE Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023 (diolah)

Walaupun luas wilayah yang kecil, tidak memiliki kekayaan alam, jumlah lapangan kerja yang terbatas, dan kualitas tenaga kerja yang relatif masih rendah, Kota Sukabumi masih menunjukkan kinerja ekonomi yang baik. Hal ini dapat di lihat dari LPE pada kurun waktu 2019-2020 yang lebih tinggi dari LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Meskipun di tahun 2021 dan 2022 LPE Kota Sukabumi masih di bawah LPE Provinsi Jawa Barat.

Tahun 2021 merupakan tahun resiliensi sebagai kunci utama bangkit dari pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan berbagai kebijakan dan program dalam rangka memulihkan ekonomi seperti *government spending strategy*. Selain itu dilakukan upaya untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi yang mendorong investasi serta kapasitas fiskal.

2.2.2 Indeks Gini

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini Kota Sukabumi dalam 4 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2020 merupakan pencapaian yang terbaik mengingat target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,412 tetapi Kota Sukabumi berhasil mencapai poin 0,397.

Meskipun

Meskipun LPE Kota Sukabumi tahun 2022 meningkat menjadi 5,35 persen, namun Indeks Gini justru mengalami kenaikan dan jauh diatas target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta membawa pemerataan pendapatan masyarakat.

Tabel 2.4 Target dan Capaian Indeks Gini Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

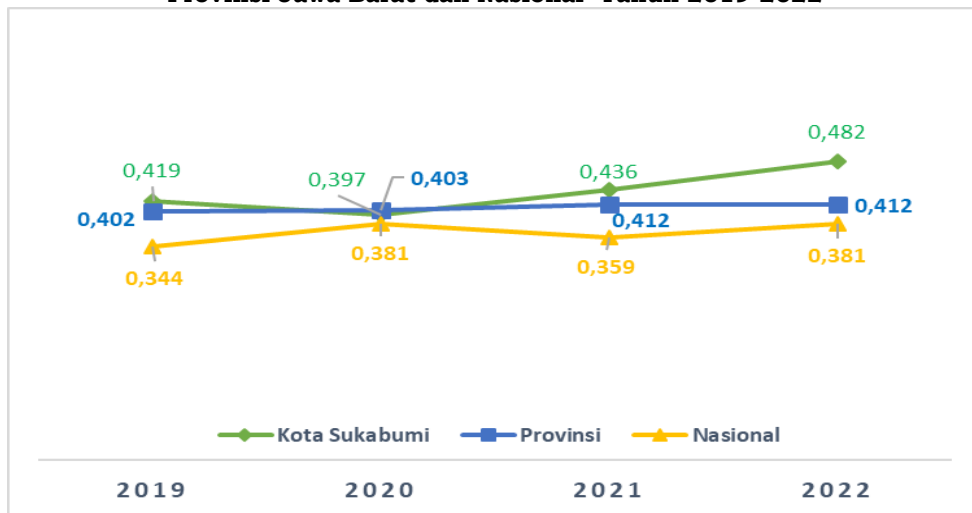
URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (poin)	0,39	0,412	0,410	0,405
Capaian (poin)	0,419	0,397	0,436	0,482

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMMD Kota Sukabumi 2018-2023

Indeks Gini Kota Sukabumi tahun 2022 masih masuk dalam ketimpangan moderat (0,40 – 0,50), namun hal ini harus menjadi perhatian. Mengingat, ketimpangan yang tinggi menyimpan potensi terjadinya gesekan dan gejala di masyarakat karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh.

Gambar 2.4 Perbandingan Indeks Gini Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023 (diolah)

Indeks Gini Kota Sukabumi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2022 menunjukkan bahwa ketimpangan di Kota Sukabumi masih di atas Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Sukabumi masih menghadapi permasalahan seperti konsentrasi kekayaan yang hanya dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat, kesenjangan produktivitas tenaga kerja, akses ekonomi bagi masyarakat miskin masih terbatas, dan masyarakat masih mengalami kesenjangan dalam menghadapi situasi yang tak terduga seperti adanya Covid-19.

2.2.3 Kemiskinan

Kemiskinan di Kota Sukabumi cenderung meningkat dari tahun 2019 hingga 2021. Penduduk miskin tahun 2022 sekitar 26,59 ribu jiwa atau 8,02 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Meskipun demikian, kinerja Pemerintah Kota Sukabumi dalam menurunkan angka kemiskinan cukup baik terutama di tahun 2019 dan 2020. Kota Sukabumi berhasil menangani kemiskinan dengan pencapaian yang melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Capaian penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2022 lebih baik jika dibandingkan tahun 2021, namun capaian tersebut belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun penurunan kemiskinan yang dicapai tersebut tidak lepas dengan geliat ekonomi yang terjadi pasca Covid-19.

Tabel 2.5 Target dan Capaian Angka Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (%)	8,14	7,90	7,80	7,70
Capaian (%)	6,67	7,70	8,25	8,02

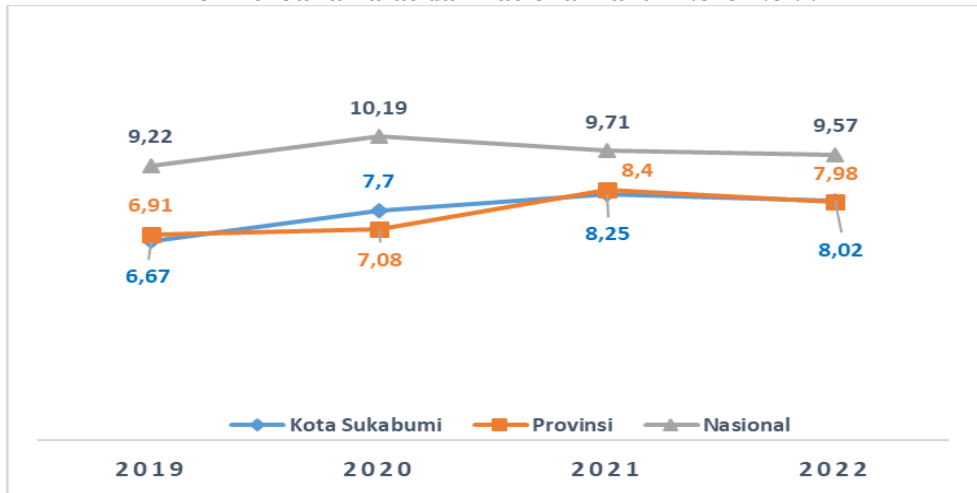
Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMMD Kota Sukabumi 2018-2023

Walaupun angka kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2022 mengalami penurunan, namun persentasenya masih di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional, angka kemiskinan Kota Sukabumi masih lebih baik. Meskipun demikian, upaya penurunan angka kemiskinan di Kota Sukabumi perlu terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Gambar 2.5

Gambar 2.5 Perbandingan Kemiskinan Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023 (diolah)

Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Sukabumi dapat dilakukan seperti dengan meningkatkan akses masyarakat miskin ke pendidikan, kesehatan, dan layanan air bersih serta sanitasi. Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan juga perlu untuk ditingkatkan.

Selain itu, perlunya peningkatan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Jika hal-hal itu dilaksanakan secara tepat sasaran, penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi tentunya dapat mencapai hasil yang optimal.

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan dalam jangka panjang. Di mana untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan. Kedua aspek itu, yakni kecepatan dan status pencapaian. Pertumbuhan nilai IPM antar waktu akan menunjukkan kecepatan pembangunan yang terjadi sebagai cerminan atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Sementara status pencapaian IPM merefleksikan tingkatan pencapaian pembangunan manusia dalam satu periode.

Tabel 2.6

**Tabel 2.6 Target dan Capaian IPM Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (poin)	74,17	74,20	74,45	74,60
Capaian (poin)	74,31	74,21	74,60	75,40

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMMD Kota Sukabumi 2018-2023

IPM Kota Sukabumi di tahun 2022 masuk dalam kategori tinggi (interval 70-79 poin). Naik cukup signifikan sekitar 0,8 poin dari 74,60 di tahun 2021 menjadi 75,60 di tahun 2022. Kenaikan IPM terjadi pada ketiga komponen yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah. Namun, kenaikan pada komponen harapan lama sekolah masih belum optimal karena hanya naik 0,01 poin.

Sementara pada komponen rata-rata pengeluaran per kapita, mengalami penurunan sebesar Rp 3.214,00. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan.

**Tabel 2.7 IPM beserta Komponennya Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

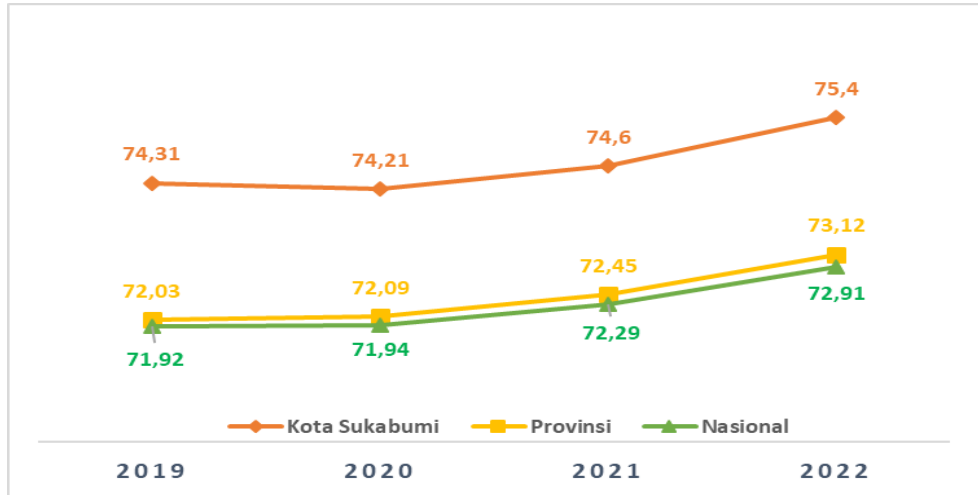
Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,26	72,40	72,58	72,85
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	13,47	13,58	13,59
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,58	9,59	9,81	10,14
Rata2 Pengeluaran per Kapita sebulan	Rupiah	1.557.065	1.445.759	1.483.147	1.479.933
IPM	Indeks	74,31	74,21	74,6	75,4

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023

Jika dilihat perkembangan dari tahun 2019-2022, IPM Kota Sukabumi masih lebih baik jika dibandingkan IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Di antara kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat, IPM Kota Sukabumi tahun 2022 berada di peringkat 7. Namun jika dilihat hanya kategori kota, dari 9 kota di Provinsi Jawa Barat, peringkat IPM Kota Sukabumi hanya lebih baik dari IPM Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.

Gambar 2.6

Gambar 2.6 Perbandingan IPM Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023 (diolah)

IPM Kota Sukabumi masih bisa lebih baik lagi asalkan 4 komponen pembentuk IPM diintervensi dengan tepat dan dilaksanakan oleh lintas urusan. Dari empat komponen yang ada, fokus utama yang perlu diintervensi yaitu pada komponen rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat.

2.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi tahun 2022 mengalami penurunan cukup signifikan yaitu 1,95 persen dari 10,78 persen di tahun 2021 menjadi 8,83 persen di tahun 2022. Angka tersebut juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,87 persen.

Tabel 2.8 Target dan Capaian TPT Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (%)	7,68	10,25	9,81	9,70
Capaian (%)	8,49	12,17	10,78	8,83

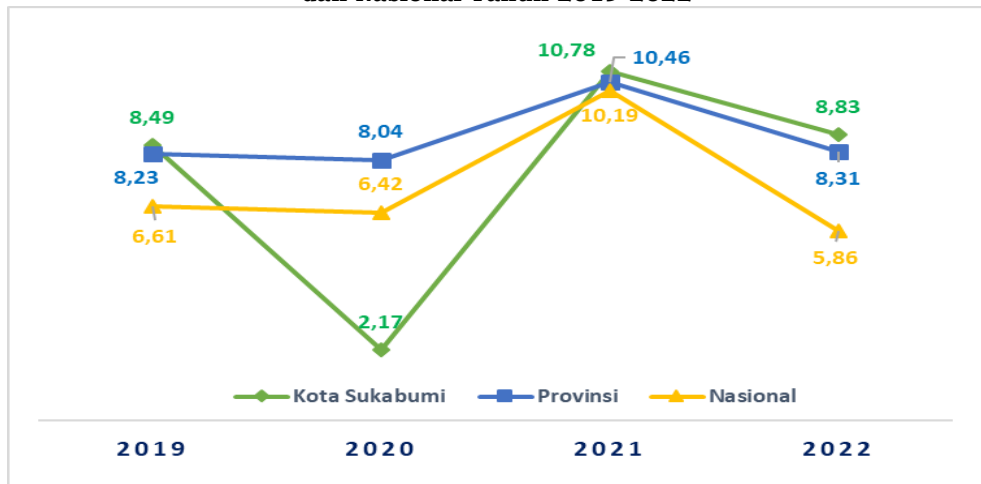
Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMMD Kota Sukabumi 2018-2023

Menurunnya

Menurunnya TPT Kota Sukabumi tidak lepas dari aktivitas perekonomian yang makin menggeliat dan dibarengi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor tersier (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa). Hal ini juga berkorelasi dengan makin banyaknya masyarakat Kota Sukabumi yang berusaha sendiri (status pekerjaan utama) yang meningkat sebesar 21,09 persen di tahun 2022.

Gambar 2.7 Perbandingan TPT Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023 (diolah)

Meskipun TPT Kota Sukabumi mengalami penurunan, namun TPT Kota Sukabumi di tahun 2022 masih berada di atas angka TPT Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat permasalahan di Kota Sukabumi seperti jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja serta belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja.

2.2.6 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen yang menyusun IPM. Indeks Pendidikan terdiri dari komponen indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah. Jika dibandingkan dengan Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran, Indeks Pendidikan Kota Sukabumi termasuk terendah. Di mana kedua indeks lainnya berada diatas angka 80.00 poin.

Tabel 2.9

Tabel 2.9 Target dan Capaian Indeks Pendidikan Kota Sukabumi Tahun 2019-2021

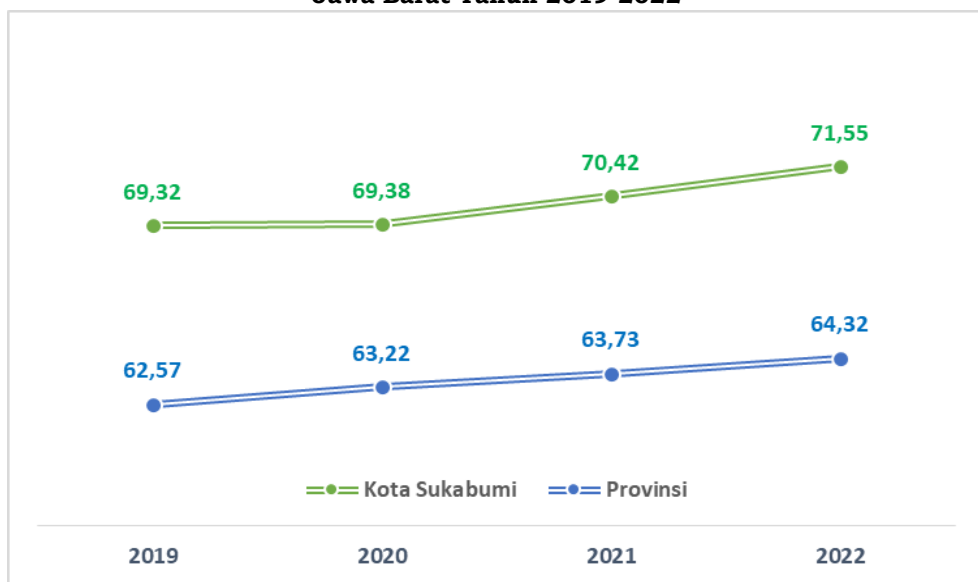
URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (tahun)	69,81	69,82	69,82	69,83
Capaian (tahun)	69,32	69,38	70,42	71,55

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMMD Kota Sukabumi 2018-2023

Jika dilihat trennya, Indeks Pendidikan Kota Sukabumi setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja urusan pendidikan sudah makin membaik. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu

Gambar 2.8 Perbandingan Indeks Pendidikan Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Peningkatan

Peningkatan akses dan mutu sangat penting sekali untuk meningkatkan angka Indeks Pendidikan. Adapun upaya yang perlu dilakukan antara lain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar formal maupun nonformal/kesetaraan, bantuan bagi siswa-siswi yang kurang mampu, dan pemberdayaan satuan pendidikan nonformal berbasis kemasyarakatan. Jika hal-hal tersebut dilakukan dengan tepat maka Indeks Pendidikan Kota Sukabumi akan tetap berada di atas Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

2.2.7 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan ukuran untuk menghitung jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Pencapaian RLS Kota Sukabumi cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Salah satu faktor meningkatnya RLS Kota Sukabumi yaitu karena aktivitas pendidikan sudah berjalan normal pasca pandemi Covid-19 dan semakin membaiknya perekonomian masyarakat.

Tabel 2.10 Target dan Capaian RLS Kota Sukabumi Tahun 2019-2021

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (tahun)	9,75	9,58	10,34	9,81
Capaian (tahun)	9,58	9,59	9,81	10,14

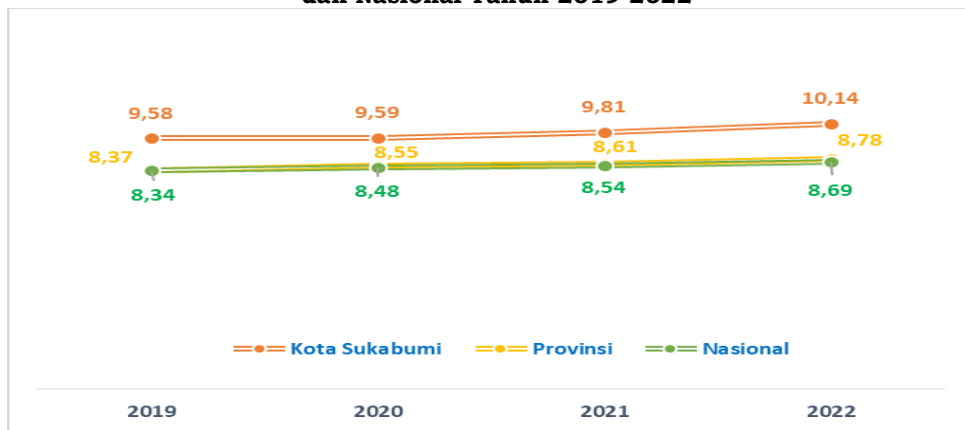
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMDP Kota Sukabumi 2018-2023

RLS Kota Sukabumi pada tahun 2022 adalah 10,14. Artinya rata-rata masyarakat Kota Sukabumi pendidikan terakhirnya adalah setara dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Perlu upaya keras untuk meningkatkan RLS Kota Sukabumi hingga masyarakatnya rata-rata menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Gambar

Gambar 2.9 Perbandingan RLS Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, RLS Kota Sukabumi masih lebih baik. Namun demikian, akses pendidikan perlu untuk terus ditingkatkan terutama bagi masyarakat miskin. Selain itu, upaya memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan juga perlu untuk ditingkatkan.

2.2.8 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Tabel 2.11 Target dan Capaian HLS Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (tahun)	13,55	13,64	13,47	13,58
Capaian (tahun)	13,46	13,47	13,58	13,59

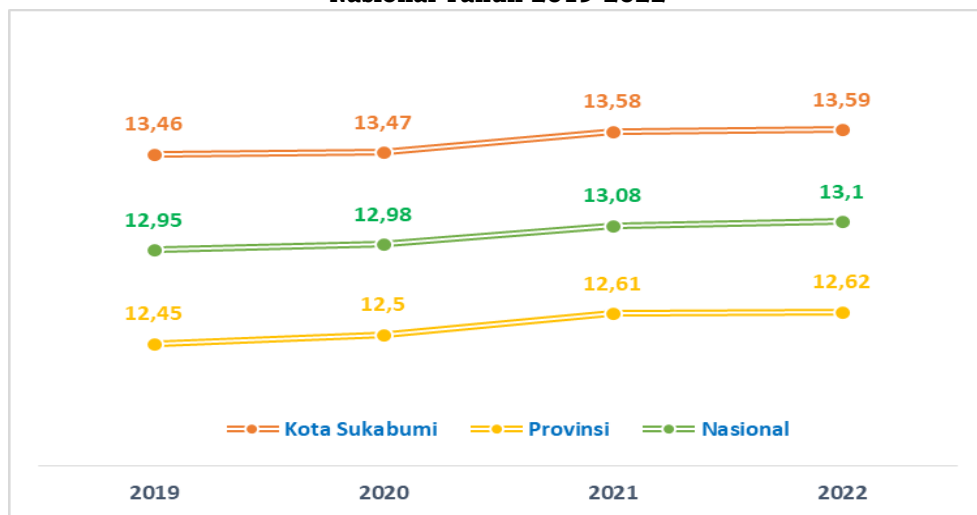
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMMD Kota Sukabumi 2018-2023

HLS

HLS Kota Sukabumi pada tahun 2022 mencapai 13,59 tahun, meningkat 0,01 poin dari angka HLS tahun 2021. Angka HLS sebesar 13,59 tahun menunjukkan bahwa harapan lama sekolah anak di Kota Sukabumi sudah masuk pada jenjang pendidikan tinggi.

Gambar 2.10 Perbandingan HLS Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

HLS Kota Sukabumi masih lebih baik jika dibandingkan HLS Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Namun demikian, kesenjangan antara RLS dan HLS Kota Sukabumi perlu menjadi perhatian agar capaian RLS ke depannya dapat mendekati HLS. Karena itu, upaya sosialisasi pendidikan perlu ditingkatkan selain upaya memperluas akses pendidikan dan meningkatkan angka melanjutkan antarjenjang pendidikan.

2.2.9 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu fokus capaian pembangunan nasional di bidang kesehatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Keluarga sehat adalah pondasi masa depan bangsa yang gemilang.

Menurut

Menurut WHO, keluarga sehat berarti keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) telah menetapkan 12 IKS. Dengan menerapkan 12 indikator keluarga sehat menurut Kemenkes, maka diharapkan banyak dari keluarga yang ada di Indonesia memiliki standar kesehatan yang optimal. Karena itu, dalam rangka pencapaian indikator IKS tersebut, diperlukan peran serta aktif, kolaborasi dan sinergitas antar semua sektor termasuk masyarakat itu sendiri.

Tabel 2.12 Target dan Capaian Indeks Keluarga Sehat Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (poin)	0,207	0,26	0,287	0,317
Capaian (poin)	0,276	0,221	0,291	0,318

Sumber: Dinkes Kota Sukabumi, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMMD Kota Sukabumi 2018-2023

Secara umum status kesehatan keluarga di Kota Sukabumi cenderung mengalami perbaikan. Hal ini juga tercermin dengan jumlah keluarga tidak sehat dan pra sehat yang berkurang. Selain itu, meningkatnya pelayanan puskesmas juga menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan IKS. Untuk lebih meningkatkan IKS perlu dilakukan penguatan, pendampingan dan monitoring terhadap puskesmas yang belum mencapai target, penguatan kerja sama tim lintas program, dan optimalisasi keterlibatan berbagai pihak seperti institusi pendidikan, organisasi profesi ataupun pihak swasta.

2.2.10 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH di Kota Sukabumi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Di mana AHH Kota Sukabumi tahun 2022 mencapai 72,85 tahun.

Tabel 2.13

Tabel 2.13 Target dan Capaian AHH Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (tahun)	72,05	72,10	72,15	72,45
Capaian (tahun)	72,26	72,40	72,58	72,85

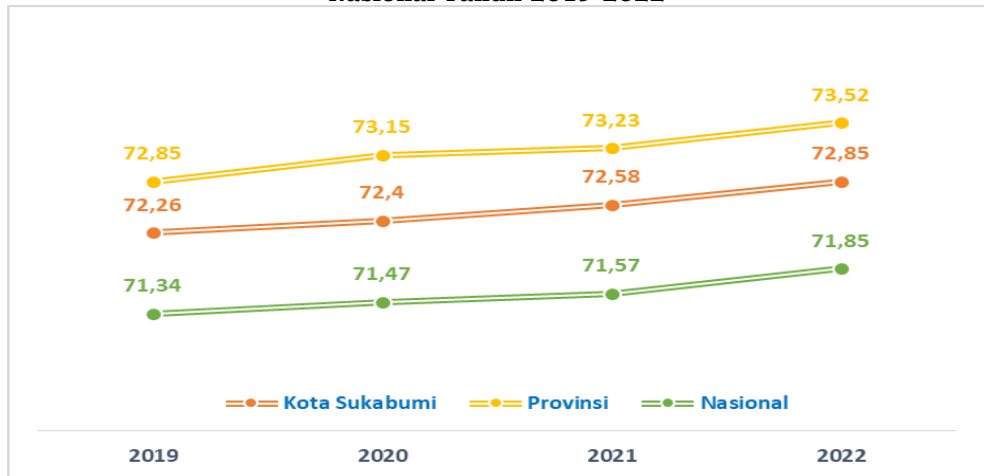
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMDP Kota Sukabumi 2018-2023

Semakin membaiknya derajat kesehatan masyarakat Kota Sukabumi yang ditunjukkan dengan AHH merupakan salah satu indikator yang menentukan IPM. Hal ini juga menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan kualitas kesehatan penduduk utamanya pada kalangan bayi, balita, wanita berusia subur, dan lansia.

Meskipun capaian AHH Kota Sukabumi cenderung meningkat setiap tahun, namun masih di bawah AHH Provinsi Jawa Barat. Karena itu, upaya untuk lebih meningkatkan AHH Kota Sukabumi perlu terus dilakukan. Upaya tersebut seperti dengan meningkatkan kemudahan mengakses sarana prasarana kesehatan, peningkatan kualitas asupan gizi, serta berkurangnya angka warga yang sakit.

Gambar 2.11 Perbandingan AHH Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah)

2.2.11 Prevalensi

2.2.11 Prevalensi *Stunting*

Untuk menciptakan generasi unggul, permasalahan kesehatan salah satunya *stunting*, harus ditangani dengan serius. *Stunting* telah menjadi agenda pembangunan nasional. Pemerintah telah menargetkan dalam RPJMN 2020-2024 menurunkan prevalensi *stunting* menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

Tabel 2.14 Capaian *Stunting* Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

CAPAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
SSGI	15,6	-	19,1	-
EPPGBM	8,56	7,32	5,9	6,28

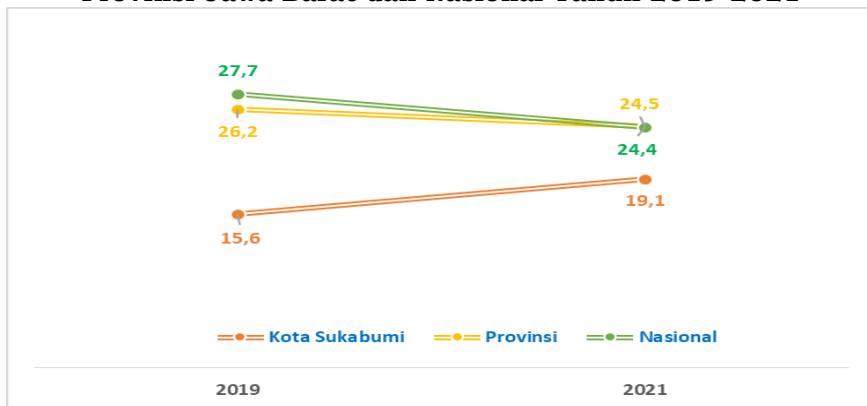
Sumber: Kememkes, 2022

Dinkes, 2022

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, angka *stunting* Kota Sukabumi tahun 2021 sebesar 19,1 persen. Namun berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, masih ada 1.150 balita (sekitar 5,9 persen) yang mengalami *stunting* di tahun 2021 tersebut.

Pada 2022, angka *stunting* di Kota Sukabumi mengalami penurunan yaitu menjadi 4,03 % atau tinggal 806 kasus. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya percepatan penurunan *stunting* melalui optimalisasi cakupan intervensi berbasis bukti yang terus dilakukan. Salah satunya dengan memastikan warga mendapatkan asupan gizi terbaik dan dalam pendataan terdeteksi tidak ada masalah.

Gambar 2.12 Perbandingan *Stunting* (SSGI) Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2021



Sumber: Kemenkes, 2023 (diolah)

Meskipun

Meskipun terdapat perbedaan data, angka stunting di Kota Sukabumi tahun 2021 masih lebih baik dari pada Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Upaya untuk mengurangi *stunting* di Kota Sukabumi perlu terus ditingkatkan. Upaya kolaborasi dengan intervensi kasus secara tepat akan mempercepat penurunan *stunting* di Kota Sukabumi. Tentunya 6 kelurahan di Kota Sukabumi yang menjadi lokus penanganan *stunting* tahun 2023 perlu diprioritaskan penanganannya.

2.2.12 Indeks Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan hal penting yang mencerminkan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-material, dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Tabel 2.15 Target dan Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (poin)	67,81	67,86	67,91	67,96
Capaian (poin)	76,63	76,23	79,56	79,63

Sumber: *Bappeda Kota Sukabumi, 2023*

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMDP Kota Sukabumi 2018-2023

Jika dilihat trennya, Indeks Ketahanan Keluarga Kota Sukabumi sudah masuk dalam kategori sangat tinggi ($75 \leq$). Bahkan melebihi angka Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus tetap diperhatikan untuk lebih meningkatkan angka indeks tersebut. Antara lain perlunya peningkatan pada aspek pendidikan, penghasilan keluarga, kemampuan membeli rumah, menjaga keutuhan keluarga (menghindari perceraian dan kerja jauh), menjaga HH-Size di angka 4-6 (misalnya orang tua dengan 2 anak), mengupayakan bahwa kepala rumah tangga adalah laki-laki, dan memperhatikan kelompok usia lansia awal-akhir dan manula.

2.2.13 Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif maka diperlukan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam, bergizi, seimbang, aman dan halal (B2SAH) dalam jumlah dan komposisi yang cukup.

Tabel 2.16

Tabel 2.16 Target dan Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (poin)	78,70	81,30	79,50	79,99
Capaian (poin)	79,70	86	84,8	83,9

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMDP Kota Sukabumi 2018-2023

Skor PPH Kota Sukabumi sempat mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2020, namun menurun pada tahun 2021. Karena itu, upaya untuk menjaga dan meningkatkan Skor PPH Kota Sukabumi perlu dilakukan dengan menyusun analisis PPH Konsumsi, pelatihan pengolahan pangan lokal, distribusi bibit/benih tanaman hortikultura yang mendukung peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan, pelatihan teknologi *urban farming* yang mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah, sosialisasi gerakan konsumsi pangan B2SAH, pembinaan/fasilitasi dalam rangka pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan ketahanan pangan, subsidi harga pada acara Gelar Pangan Murah Kota Sukabumi, subsidi harga dan dipasarkan melalui PMT (Pasar Mitra Tani), rapat koordinasi distribusi pangan, vaksinasi pada Hewan Penular Rabies (HPR) dan AI untuk mencegah penularan zoonosis, dan fasilitasi pelaku olahan hasil perikanan.

2.2.14 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Tabel 2.17

Tabel 2.17 Target dan Capaian IPG Kota Sukabumi Tahun 2019-2021

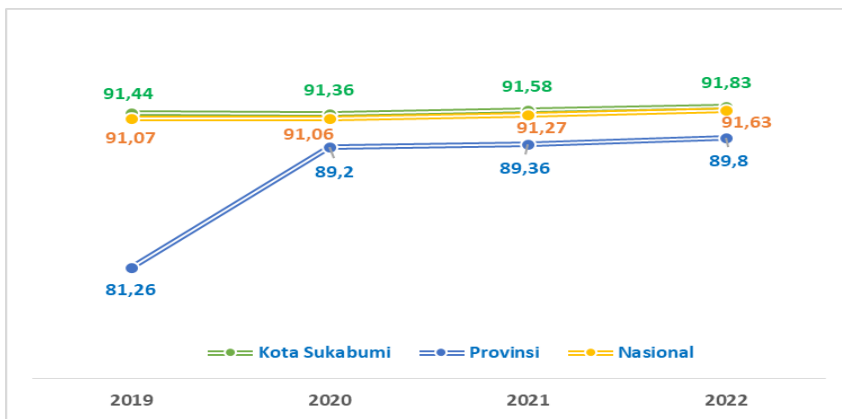
URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	Tahun 2022
Target (poin)	91,07	91,00	91,19	91,31
Capaian (poin)	91,44	91,36	91,58	91,83

Sumber: BPS, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMDP Kota Sukabumi 2018-2023

Tren IPG di Kota Sukabumi juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. IPG Kota Sukabumi tahun 2022 sebesar 91,83 poin. Ini berarti bahwa pembangunan antara perempuan dengan laki-laki di Kota Sukabumi semakin mendekati setara (setara jika nilai IPG 100).

Gambar 2.13 Perbandingan IPG Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2021



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Perkembangan IPG Kota Sukabumi dari tahun ke tahun masih lebih baik dari capaian IPG Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pengarusutamaan gender di Kota Sukabumi merupakan hal penting karena merupakan isu lintas sektor yang berpengaruh pada pembangunan yang disepakati baik global, nasional dan daerah. Upaya yang dilakukan dalam rangka pengarusutamaan gender di Kota Sukabumi seperti Pos Mama atau posyandu mapay imah atau kader posyandu menyusuri rumah warga, *Homecare* atau perawat yang di tempatkan di 33 kelurahan untuk mendatangi rumah warga yang alami gangguan kesehatan, dan lainnya.

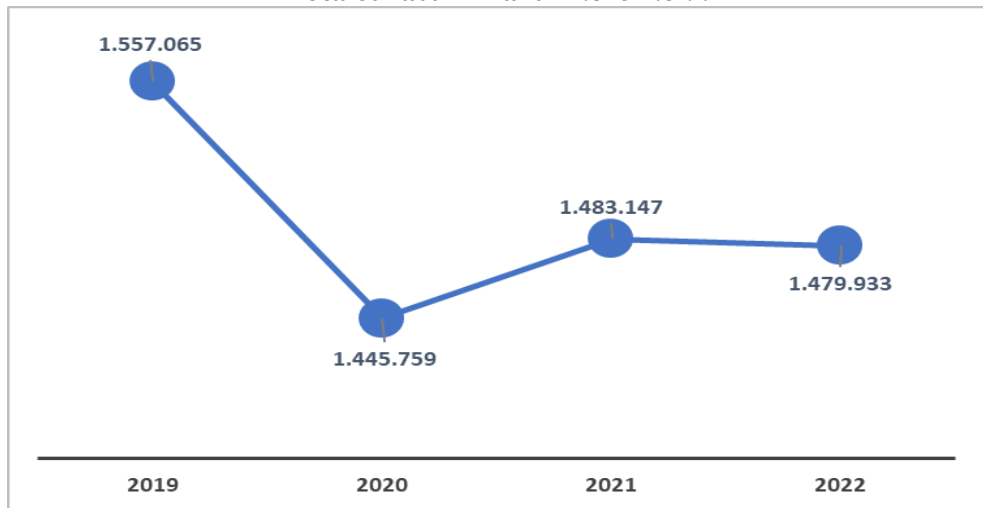
2.3 Aspek

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita masyarakat Kota Sukabumi justru berkurang di masa pandemi Covid-19. Seiring dengan membaiknya perekonomian akibat pelonggaran aktivitas kegiatan, pengeluaran per kapita masyarakat Kota Sukabumi juga mengalami kenaikan di tahun 2021 dan sedikit menurun kembali di tahun 2022. Namun angka-angka tersebut masih di bawah pengeluaran per kapita sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Gambar 2.14 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Sukabumi Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023 (diolah)

Konsumsi masyarakat secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengeluaran konsumsi untuk kelompok makanan dan non makanan. Pada tahun 2022, masyarakat Kota Sukabumi mengalokasikan anggarannya sebanyak 45,27 persen untuk konsumsi makanan dan sebanyak 54,73 persen untuk pengeluaran konsumsi non makanan.

Adapun

Adapun lima jenis komoditas makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kota Sukabumi adalah makanan dan minuman jadi, rokok, padi-padian, daging, dan telur dan susu. Sementara kelompok non makanan yang paling banyak dikonsumsi adalah subkelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga serta subkelompok aneka barang dan jasa.

2.3.2 Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Sukabumi. Selain untuk mengukur kepuasan masyarakat, IKLI dapat digunakan untuk mengakomodir keinginan dan harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi.

Tabel 2.18 Target dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (persen)	-	78	80
Capaian (persen)	77	86,2	86,75

Sumber: Dinas PUPR Kota Sukabumi, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMDP Kota Sukabumi 2018-2023

IKLI Kota Sukabumi sudah masuk ke dalam kategori B atau memiliki mutu pelayanan baik. Namun demikian, layanan infrastruktur tetap harus ditingkatkan. Jika dicermati lebih dalam, layanan infrastruktur yang sudah termasuk baik adalah infrastruktur listrik, jalur pedestrian, taman kota dan jaringan telekomunikasi. Sedangkan infrastruktur yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya adalah layanan transportasi seperti terminal dan jaringan jalan skala desa, jaringan air bersih, dan jaringan air limbah.

Jalan merupakan prasarana transportasi darat, yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Kondisi jalan yang baik akan mempelancar lalu lintas barang dan jasa. Sehingga keadaan jalan dan jaringan-jaringan jalan bisa dijadikan acuan tentang tingginya kebudayaan dan kemajuan ekonomi suatu daerah.

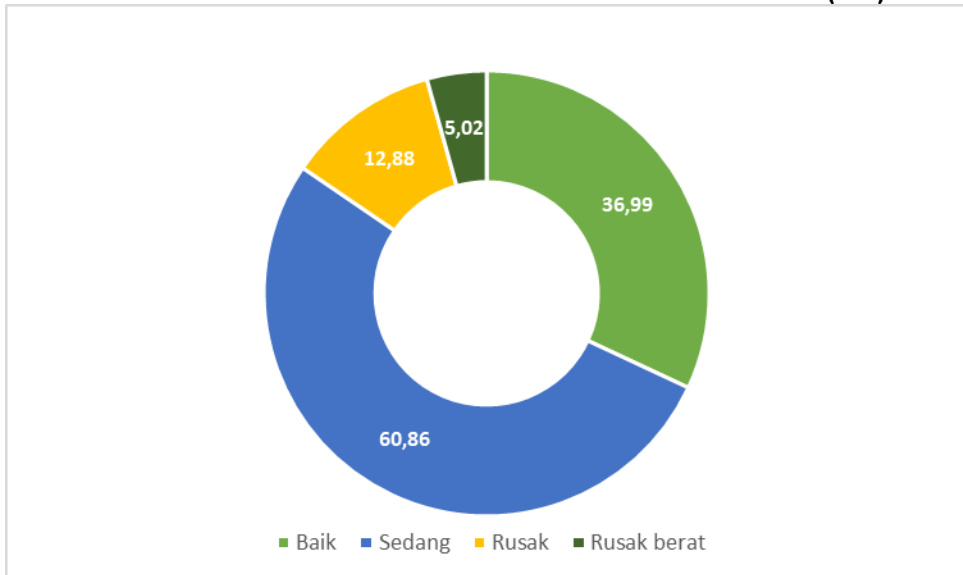
Tabel 2.19 Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan di Kota Sukabumi Tahun 2020-2022

JALAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Negara	8,50	8,50	8,80
Provinsi	33,55	33,55	37,74
Kota	115,79	115,79	115,74
Total (km)	157,79	157,79	162,29

Sumber: Dinas PUPR, 2023

Tingkat kemantapan jalan milik Kota Sukabumi saat ini tergolong cukup baik, dengan persentase mencapai sekitar 81 persen. Ada sekitar 154 ruas jalan Kota Sukabumi kondisinya tergolong cukup baik. Sedangkan untuk sisanya saat ini masih terus dalam perbaikan.

Gambar 2.15 Kondisi Jalan di Kota Sukabumi Tahun 2022 (KM)



Sumber: Dinas PUPR, 2023 (diolah)

Meskipun

Meskipun saat ini secara persentase kemantapan jalan belum bisa 100 persen. Tapi, upaya pemeliharaan dan perbaikan terhadap jalan rusak terus dilakukan sesuai dengan anggaran yang ada. Kondisi sarana jalan itu sendiri banyak dipengaruhi oleh faktor alam maupun faktor manusia dalam hal ini kendaraan. Kondisi jalan itu sendiri tidak akan mungkin bisa 100 persen. Tapi, setidaknya bisa mendekati ke angka tersebut.

2.3.3 Iklim Investasi

Iklim investasi yang positif dapat dilihat dari tingkat keamanan dan ketertiban yang ada serta kemudahan regulasi. Tingkat keamanan dan ketertiban dapat dilihat dari upaya penanggulangan pelanggaran perda dan unjuk rasa yang mencapai 100 persen. Artinya walaupun terdapat pelanggaran perda dan unjuk rasa, pemerintah Kota Sukabumi dapat menanggulangnya sehingga kondusivitas tetap terjaga.

Dari sisi regulasi, terdapat 8 buah perda yang mendukung investasi serta tersedia 38 layanan perizinan dan 3 layanan non perizinan, yang masing-masing sudah dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP).

Tabel 2.20 Target dan Capaian Indeks Rasa Aman Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (poin)	63,7	64,00	64,30	64,90
Capaian (poin)	87,53	85,35	75,31	75,91

Sumber: *Bappeda Kota Sukabumi, 2023*

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMDP Kota Sukabumi 2018-2023

Selain itu, tingkat keamanan Kota Sukabumi yang diukur dari Indeks Rasa Aman dan Indeks Kerukunan Umat Beragama juga menunjukkan hasil yang dapat mendukung iklim investasi. Untuk Indeks Rasa Aman Kota Sukabumi cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Walaupun tingkat rasa aman di Kota Sukabumi ini berada pada level “Aman” ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan, yaitu terkait partisipasi warga dalam kegiatan simulasi bencana, sosialisasi dan optimalisasi petunjuk keselamatan bencana, peningkatan akses warga terhadap lembaga/institusi pengembangan diri, dan masih terdapatnya kejadian kriminalitas (pencurian, perampasan, penganiayaan) serta kekerasan komunal (tawuran, perkelahian Ormas).

Tabel 2.21

Tabel 2.21 Target dan Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (poin)	94,98	73,35	74,08	78,02
Capaian (poin)	73,35	74,83	74,9	78,10

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMMD Kota Sukabumi 2018-2023

Kebalikannya, capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama cenderung mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketentraman serta mengoptimalkan Forum Kerukunan Umat Beragama.

2.3.4 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.22 Rasio Ketergantungan Kota Sukabumi Tahun 2020-2022

JUMLAH PENDUDUK	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
0-14	87.029	86.882	88.056
15-64	238.141	241.313	244.156
>65	21.155	22.609	24.198
Rasio Ketergantungan (%)	45,43	45,37	45,97

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023 (diolah)

Rasio ketergantungan Kota Sukabumi pada tahun 2022 adalah sebesar 45,97 persen, dimana setiap 100 orang yang berusia produktif menanggung sebanyak 45 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Hal itu menandakan bahwa Kota Sukabumi sedang memasuki periode terbaik bonus demografi. Melimpahnya penduduk usia produktif tentu harus dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan peluang bagi Kota Sukabumi untuk bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM menjadi lebih unggul dan berdaya saing.

2.3.5 Indeks

2.3.5 Indeks Kota Kreatif

Kota kreatif ditandai sebagai kota yang memiliki identitas kuat yang mengakar kepada keunikan karakter. Para pemangku kepentingan di kota tersebut memiliki pemahaman tentang apa yang menjadi kekuatan yang akan menjadikan kota mereka berbeda dibandingkan kota- kota lainnya. Secara umum kota kreatif ditandai dengan karakter yang terbuka, memiliki jejaring yang luas, masyarakat yang cair dan dinamis, selalu terbuka dengan hal-hal yang baru serta mudah menyesuaikan diri dengan ide-ide kontemporer.

Tabel 2.23 Target dan Capaian Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (poin)	-	-	27,2	48,8
Capaian (poin)	-	-	27,93	49,01

Sumber: *Bappeda Kota Sukabumi, 2023*

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMDP Kota Sukabumi 2018-2023

Indeks Kota Kreatif mulai diterapkan di Kota Sukabumi sejak tahun 2021 setelah dilakukannya perubahan RPJMD 2018-2023. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Sukabumi memiliki potensi industri kreatif yang menjanjikan. Pengembangan Kota Kreatif di Kota Sukabumi dilakukan dengan kolaborasi *Penta Helix* yang terdiri dari akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah dan media.

Agar Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi lebih baik lagi, maka perlu upaya kolaborasi berbagai pihak seperti dengan akademisi untuk pengembangan SDM melalui riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, kolaborasi dengan pelaku usaha atau bisnis yang memiliki peranan sebagai pencipta produk dan jasa kreatif, kolaborasi dengan komunitas kreatif seperti Sukabumi Creative Hub (SCH) untuk memwadahi pemasaran produk dan jasa kreatif melalui kegiatan yang diadakan oleh komunitas. Selain itu, perlu kolaborasi dengan pemerintah terutama untuk menjamin keberlangsungan aktivitas kreatif serta kolaborasi dengan media untuk saluran promosi.

2.3.6 Indeks

2.3.6 Indeks Kota Layak Huni/Indeks Kenyamanan

Kota Layak Huni adalah kota yang memiliki lingkungan dan atmosfer yang nyaman sebagai tempat untuk hidup dan bekerja, baik dari aspek fisik (infrastruktur kota, penataruangan kota) maupun non fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi). Indeks Kota Layak Huni awalnya digunakan oleh Kota Sukabumi sebagai salah satu indikator tujuan. Tetapi indikator tersebut kemudian diganti menjadi Indeks Kenyamanan semenjak perubahan RPJMD 2018-2023.

Tabel 2.24 Target dan Capaian Indeks Kota Layak Huni/ Indeks Kenyamanan Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (poin)	45,00	-	24,4	24
Capaian (poin)	49,25	23,45	22,91	22,46

Sumber: Bappppeda Kota Sukabumi, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJMDP Kota Sukabumi 2018-2023

Capain Indeks Kenyamanan Kota Sukabumi saat ini masih dapat ditingkatkan lagi mengingat pembangunan pasca Covid-19 sangat gencar dilakukan. Terlebih, adanya akses tol yang akan menjadikan Kota Sukabumi sebagai kota hub, tuntutan akan kenyamanan kota akan semakin meningkat lagi. Karena itu, sangat diperlukan penataan kota, fasilitas rekreasi, pejalan kaki, olahraga, taman kota, seni budaya dan kelompok rentan.

2.3.7 Indeks Reformasi Birokrasi

Daya saing dan produktivitas hanya dapat diraih bila kita konsisten dan fokus pada penyederhanaan sistem birokrasi dan manajemen, rekayasa dan inovasi teknologi, peningkatan kompetensi SDM, dan peningkatan budaya produktif. Semua ini menjadi prasyarat guna menjawab tantangan dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan.

Memacu reformasi birokrasi menjadi salah satu strategi yang sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan daya saing daerah, peningkatan kualitas pelayanan dengan birokrasi yang efisien melayani akan menumbuhkan iklim investasi agar ekonomi tetap tumbuh dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Tabel 2.25

Tabel 2.25 Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (poin)	69	68,88	68,93	68,98
Capaian (poin)	68,83	68,25	67,91	71,05

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJM DP Kota Sukabumi 2018-2023

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sukabumi dalam kurun waktu 2019-2021 masih berada di rentang >60-70. Artinya reformasi birokrasi yang telah dilakukan masuk dalam kategori “Cukup Baik”. Artinya penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.

Pada tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sukabumi naik dan masuk dalam kategori “Baik”. Artinya secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.

2.3.8 Indeks Inovasi Daerah

Inovasi merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah untuk menghadapi persaingan baik di tingkat regional, nasional, bahkan global. Dalam era global, pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan *innovation-driven development*. Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin.

Tabel 2.26 Target dan Capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Target (persen/predikat)	60	-	Terinovatif (≥ 1001)	Terinovatif (≥ 1001)
Capaian (persen/predikat)	52	-	Sangat inovatif	Inovatif

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023

RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023, RPJM DP Kota Sukabumi 2018-2023

Dalam

Dalam hal inovasi, Kota Sukabumi masuk dalam kategori sangat inovatif. Pertumbuhan aspek ekosistem inovasi didukung oleh pertumbuhan pilar dinamika bisnis serta pertumbuhan pilar kapasitas inovasi. Meskipun kondisi pilar kesiapan teknologi tidak bertumbuh, namun pertumbuhan pilar bisnis yang signifikan terutama didukung dengan adanya perbaikan pada dimensi kebijakan serta peningkatan dimensi kewirausahaan. Sementara pertumbuhan pilar kapasitas inovasi sangat dipengaruhi oleh dimensi interaksi dan keberagaman dan peningkatan dimensi penelitian dan pengembangan.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Hal tersebut tercermin dari Indeks Pendidikan Kota Sukabumi yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya.

Berbagai terobosan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Antara lain program berbasis digital Si Legit (Sistem Literasi Digital), yakni pembuatan bahan ajar untuk kemudian dimuat di web. Program ini dilaksanakan dalam rangka mempermudah baik guru maupun siswa untuk mendapatkan bahan ajar sehingga kedepannya tidak ada lagi pengadaan Lembaran Kerja Siswa (LKS) dari luar.

Si Incu (Sistem Informasi Inklusi Center Unit), aplikasi ini disediakan untuk memfasilitasi anak inklusi dalam mendapatkan akses Pendidikan. Si Pulpen (Sistem Informasi Pusat Layanan Pendidikan), sistem aplikasi untuk melakukan proses manajerial dan pengelolaan data dan informasi Pendidikan. Ada juga Si Kabayan (Sistem Aplikasi Kebudayaan) serta Si Raksa.

Selain itu, untuk mengurangi terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dari para siswa, seperti tawuran, diadakanlah kegiatan *Student Camp*. Kegiatan ini digulirkan untuk membentuk karakter remaja dan pelajar agar menjadi generasi hebat dan luar biasa serta berprestasi dalam menghadapi perkembangan zaman.

**Tabel 2.27 Kinerja Urusan Pendidikan Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	68,7	68,7	81	80,7	81	70,17	83	79
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,5	99,5	100	101,83	100	98,30	100	99,18
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	97	97	100	108,34	100	92,79	100	96,54
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	-	-	87	100	87	100	90	100

Sumber: Disdikbud Kota Sukabumi, 2023

Secara umum, permasalahan pendidikan di Kota Sukabumi yang masih perlu menjadi perhatian yaitu terkait dengan akses pendidikan yang belum merata, distribusi guru yang masih kurang merata, belum optimalnya mutu pendidikan, APM SMP dan SMA yang masih di bawah 90 persen, dan penyelenggaraan pendidikan PAUD, pendidikan kesetaraan yang belum optimal serta permasalahan terkait LKS (Lembar Kerja Siswa) dan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

2.4.2 Urusan

2.4.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam pelayanan kesehatan yang maksimal diganjar dengan penghargaan *Universal Health Coverage (UHC) Award 2023* dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri). UCH Award ini diberikan kepada pemerintah daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk dan yang sudah melakukan Integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan pemerintah daerah ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) Pemerintah Daerah.

Dari data yang ada, kepesertaan JKN di Kota Sukabumi saat ini telah mencapai 99 persen sehingga Kota Sukabumi mendapatkan penghargaan UHC Award 2023. Pencapaian ini berkat dukungan semua pihak terkait. Tercapainya UHC di Kota Sukabumi diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**Tabel 2.28 Kinerja Urusan Kesehatan Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Angka	0,017	0,017	0,38	0,4	0,38	0,45	0,39	317,28
2	Persentase RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi	Persen	75	75	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	83	83	100	100	100	101,91	100	99,9
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	100	103,83	100	100
5	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100	100	108,69	100	99,9

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	73,97	100	99,15	100	95,6
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	24,07	100	100	100	91,2
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	26,6	100	90,16	100	53,1
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	72,45	75,00	75,00	100	91,6
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	12,46	100	100	100	91,6
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	13,03	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	91,93	100	100	100	81,6
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	94,56	100	100	100	95,1
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	97,7

Sumber: Dinkes Kota Sukabumi, 2023

Namun

Namun demikian, masih terdapat permasalahan kesehatan di Kota Sukabumi yang perlu menjadi perhatian. Antara lain terkait perilaku hidup sehat yang belum membudaya, meningkatnya angka penyakit tidak menular, banyaknya fasilitas sanitasi yang tidak layak/tidak sehat, masih terdapat keluarga yang belum mengikuti JKN, dan perlunya peningkatan pelayanan kesehatan (beberapa pusat kesehatan nilai pelayanan publiknya C bahkan ada yang D).

2.4.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, Pemerintah Kota Sukabumi telah berhasil melakukan berbagai pembangunan pada tahun 2022. Pembangunan infrastruktur tersebut seperti pembangunan trotoar, perbaikan 56 ruas jalan, pemasangan pipa air bersih sepanjang 3.286 meter, dan terpasangnya sambungan air bersih pada 500-unit rumah warga. Kemudian pembangunan IPAL Komunal di lima kelurahan.

Tabel 2.29 Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	Persen	-	-	25,93	478,95	25,93	-	25,93	57,32
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	m ²	1.500	1.500	19,3	165,25	19,3	57,57	19,3	55,41
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	Persen	68,77	68,77	100	100	100	100	100	100

4. Persentase

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	87,57	87,57	51	71,54	51	91,20	53	57,87
5	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	-	-	80	3,43	80	100	82	100
6	Tingkat kemantapan jalan kab/kota	Persen	84,19	84,19	82,52	84,81	82,52	81,08	82,85	84,54
7	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompeten	Persen	-	-	10	5,36	10	100	10	11,70
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100

Sumber: DPUTR Kota Sukabumi, 2023

Meskipun pembangunan infrastruktur gencar dilakukan, masih terdapat permasalahan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Sukabumi yang masih perlu menjadi perhatian. Permasalahan tersebut yaitu masih adanya disparitas pembangunan infrastruktur, rendahnya fasilitas RTH publik, jalur pedestrian yang masih terbatas, belum optimalnya penyediaan air bersih, belum optimalnya pengelolaan air limbah, masih tingginya alih fungsi lahan, dan belum disusunnya RDTR.

2.4.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sejalan dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Sukabumi juga gencar dilaksanakan. Hal itu dilakukan, mengingat kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni masih dijumpai di Kota Sukabumi.

Pada tahun 2022, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Sukabumi telah dilakukan dengan perbaikan rumah tidak layak huni di 18 kelurahan dan penataan kawasan kumuh seluas 19,79 hektar di 3 kecamatan.

Tabel 2.30

Tabel 2.30 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	Persen	-	-	10	24,49	10	100	10	100
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Persen	0,17	0,17	94	12,87	94	89,30	96	0,15
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	96,41	96,41	98,32	3,01	98,32	1,87	98,61	1,53
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	-	-	100	0	100	100	100	100

Sumber: DPUTR Kota Sukabumi, 2022

Meskipun demikian, permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Sukabumi yang tetap perlu menjadi perhatian antara lain penuntasan RTLH yang belum tertangani, penuntasan permukiman kumuh yang masih belum tertangani, dan tingkat serah terima aset PSU yang masih rendah.

2.4.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi. Sesuai harapan Pemerintah Pusat yakni mewujudkan wilayah tertib dan ramah investasi melalui Satpol PP dan Satlinmas yang profesional, maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus selalu berpegang pada standar operasional.

Karena

Karena itu, pendekatan humanis perlu lebih dikedepankan untuk memberikan rasa aman dan tertib kepada masyarakat. Pelayanan ramah dengan salam, sapa, serta senyum kepada masyarakat, dengan tetap menegakkan kedisiplinan, dan menjunjung tinggi kehormatan semua kesatuan mutlak harus dikedepankan.

Tabel 2.31 Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	80	80	4,5	100	4,5	100	5,5	100
3	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	-	-	100	100	100	100	100	93
4	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	-	-	100	100	100	100	100	93
5	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	-	-	100	0	100	0	100	93
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	-	-	60	100	60	100	75	100
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	-	-	15	15	15	8,5	15	8,9

Sumber: Satpol PP & Damkar Kota Sukabumi, 2023

Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Sukabumi yang masih perlu menjadi perhatian yaitu masih belum tertibnya PKL di beberapa zona yang dinyatakan merah, masih adanya pelanggaran Perda, peristiwa kejadian bencana yang masih tinggi, dan belum adanya peralatan pendeteksi bencana.

2.4.6 Urusan

2.4.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Perlu berbagai inovasi agar permasalahan sosial di Kota Sukabumi bisa tertangani. Karena itu dibutuhkan sebuah strategi dalam kerangka kesejahteraan sosial terutama yang berhubungan dengan korban narkoba, lansia, anak berkebutuhan khusus, anak terlantar, dan lain sebagainya. Dengan begitu, diharapkan semakin meminimalkan masalah sosial.

Permasalahan sosial di Kota Sukabumi tersebut seperti makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang juga berimplikasi pada gap antara masyarakat kaya dan miskin yang makin tinggi. Perlindungan sosial belum komprehensif dirasakan warga. Terbatasnya akses penduduk miskin dan rentan mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan. Bukan hanya ekonomi, tapi juga pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan dan dibuka akses sehingga warga berdaya dan produktif agar naik kelas. Selanjutnya yaitu SDM dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial yang perlu peningkatan.

**Tabel 2.32 Kinerja Urusan Sosial Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	55	55	100	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinsos Kota Sukabumi, 2023

Permasalahan

Permasalahan sosial lainnya di Kota Sukabumi antara lain belum optimalnya pemberian pelayanan sosial, masih adanya anak jalanan, gelandangan pengemis, dan ODGJ yang berkeliaran di jalanan, minimnya peran serta berbagai pihak dalam penanganan masalah sosial, dan belum optimalnya peran serta dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2.4.7 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Di Kota Sukabumi, jumlah pekerja yang menjadi penopang ekonomi rumah tangga masih didominasi lulusan SD, dibandingkan lulusan lainnya. Tercatat, pada Agustus 2022, sebanyak 35,84 ribu orang yang bekerja dengan pendidikan SD atau sebanyak 24,63 persen dari jumlah pekerja 145 ribu. Kemudian pekerja dengan tamatan pendidikan Diploma I sampai III tercatat hanya 5,8 ribu orang atau 3,99 persen. Sedangkan, untuk pekerja tamatan Sarjana, Diploma IV, sampai S3, tercatat 20,88 ribu atau 14,35 persen dari total pekerja sebanyak 145 ribu.

Pemerintah Kota Sukabumi pun terus berupaya untuk mengoptimalkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK). Di mana, saat ini BLK belum berjalan dengan optimal. Padahal keberadaan BLK dapat berperan dalam mempersiapkan calon-calon tenaga kerja untuk siap kerja dengan skil yang dimilikinya. Terlebih di sekitar Kota Sukabumi terdapat banyak perusahaan atau pabrik yang membutuhkan tenaga kerja yang terampil.

Tabel 2.33 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	-	-	70	100	70	100	75	100
2	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	Persen	3	3	70	100	70	1,91	75	27,88
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	-	-	66	100	66	100	67	100

4. Persentase

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	-	-	77	40,33	77	29,33	78	25,61
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota	Persen	-	-	70	41,16	70	41,10	75	48,54

Sumber: *Disnaker Kota Sukabumi, 2023*

Oleh karena itu, permasalahan tenaga kerja di Kota Sukabumi yang perlu menjadi perhatian yaitu terkait ketersediaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja dan kualitas tenaga kerja yang masih rendah.

2.4.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Sukabumi telah beberapa kali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pencapaian ini menggambarkan suatu proses pengarusutamaan gender yang berjalan baik dan semakin hari semakin membaik yang memberikan kemaslahatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan warga Kota Sukabumi. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Sukabumi untuk lebih baik lagi dalam pengarusutamaan gender sehingga selanjutnya bisa diraih Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Mentor.

Selain itu, Kota Sukabumi juga mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022 dengan predikat Madya. Hal itu menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam pemenuhan hak anak sesuai 24 indikator kota layak anak dan lima kluster yang ditetapkan pemerintah pusat.

Tabel 2.34

Tabel 2.34 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	45,46	45,46	20	63,92	20	77,369	23	78,94
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota	Angka	0,005	0,005	100	0,04	100	0,036	100	0,034
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	0,0005	0,0005	0,0005	0,01	0,0005	11,464	0,0005	0,008

Sumber: *Daldu KB & P3A Kota Sukabumi, 2023*

Meskipun demikian, permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Sukabumi masih perlu menjadi perhatian terutama masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masih rendahnya peran serta perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga.

2.4.9 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Di tengah keterbatasan lahan pertanian pangan, dibutuhkan berbagai inovasi agar Kota Sukabumi bisa tetap mandiri pangan. Artinya, perlu berbagai upaya dan terobosan yang dilakukan sehingga produksi pangan bisa tetap meningkat. Mengingat produksi padi yang dihasilkan para petani di Kota Sukabumi baru bisa mencukupi 30% kebutuhan konsumsi beras masyarakat. Selebihnya Kota Sukabumi masih mengandalkan pasokan beras dari luar.

Di Kota Sukabumi, sudah terbentuk Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Kelompok P2L ini berupaya mengoptimalkan produktivitas pangan dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Pangan alternatif yang dimaksud di antaranya pengembangan sorgum. Komoditas tersebut bisa menjadi alternatif pengganti beras. Namun sorgum belum memasyarakat seperti halnya beras sebagai komoditas pangan utama.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Sukabumi juga tak bisa berjalan sendiri. Butuh dukungan kelompok tani, HKTI, maupun KTNA sehingga bisa memperkuat kualitas dan kuantitas produksi pangan.

Tabel 2.35

**Tabel 2.35 Kinerja Urusan Pangan Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Persen	86	86	110	116,59	110	133,081	109	138

Sumber: DKP3 Kota Sukabumi, 2023

Mencermati kondisi yang ada, permasalahan pangan di Kota Sukabumi yang perlu menjadi perhatian antara lain belum optimalnya diversifikasi pangan masyarakat, ketergantungan yang tinggi akan pasokan pangan dari luar, dan *urban farming* belum menjadi gerakan masif dalam mendukung ketahanan pangan.

2.4.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) merupakan program mengamankan aset masyarakat yang sudah memiliki sertifikat. Sehingga dari gerakan itu bisa menghindari terjadinya saling caplok dengan pihak lain atau bisa di dikatakan menghindari terjadinya konflik pertanahan.

Kota Sukabumi sendiri telah melaksanakan Gemapatas yang bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat agar memasang tanda batas pada tanah yang dimilikinya. Hal ini juga merupakan upaya akselerasi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Terdapat 813 patok yang dipasang di Kelurahan Baros, Sudajayahilir, Jayamekar, dan Jayaraksa. Program Gemapatas diharapkan bukan sekadar kegiatan simbolis. Lebih dari itu jadi gerakan penertiban yang berhubungan dengan pertanahan masyarakat.

Tabel 2.36

**Tabel 2.36 Kinerja Urusan Pertanahan Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	-	-	80	26,65	80	0	82	85,37
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	-	-	100	0	100	0	100	-
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	-	-	100	26,65	100	0	100	85,37

Sumber: DPUTR Kota Sukabumi, 2023

Permasalahan pertanahan di Kota Sukabumi yang masih perlu menjadi perhatian yaitu terkait dengan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2018 ada yang belum jadi hingga sekarang.

2.4.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kepedulian Kota Sukabumi dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan diganjar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menganugerahkan tiga penghargaan kepada Kota Sukabumi di 2022 lalu.

Adapun penghargaan yang diberikan adalah Nirwasita Tantra atau Green Leadership untuk Wali Kota Sukabumi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi sebagai peringkat pertama institusi pendukung dalam perencanaan pembangunan berbasis lingkungan kategori kota sedang, dan peringkat pertama perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan daerah kategori kota sedang bagi Kota Sukabumi.

Tabel 2.37

**Tabel 2.37 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kab/kota	Poin	74,64	74,64	62,64	59,58	62,64	60,30	63,5	59,71
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Persen	80	80	74	88,63	74	85,94	73	73,76
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kab/kota	Persen	20	20	17	0	17	0	20	0,03

Sumber: DLH Kota Sukabumi, 2023

Walaupun mendapat apresiasi, permasalahan lingkungan hidup di Kota Sukabumi yang masih perlu menjadi perhatian yaitu terkait luas RTH yang masih kurang, degradasi kualitas lingkungan, kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup masih kurang, dan belum optimalnya pengelolaan persampahan.

2.4.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka menyukseskan pemilu tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi menargetkan untuk menggenjatkan perekaman e-KTP bagi pemilih pemula. Perekaman e-KTP tersebut diantaranya menysasar para pelajar yang sudah berusia 17 tahun dan yang masih berusia 16 tahun dengan ketentuan khusus yakni e-KTP baru akan diberikan ketika usia mereka mencapai syarat yang ditentukan. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Disdukcapil adalah sejak tahun lalu secara rutin mengunjungi beberapa SMA dan SMK.

Tabel 2.38

Tabel 2.38 Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	100	100	100	98,19	100	99,45	100	99,43
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	-	-	40	28,44	40	49,75	60	57,99
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100	100	100	97,69	100	98,02	100	98,90
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100	100	100	100	100	100	100	15

Sumber: Disdukcapil Kota Sukabumi, 2023

Capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Sukabumi cenderung semakin membaik tiap tahunnya. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah.

2.4.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah Kota Sukabumi telah berhasil dalam pengendalian penduduk dan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Hal tersebut dibuktikan dengan raihan dua penghargaan dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 lalu.

Kedua penghargaan itu yakni Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih dari 100 persen Tahun 2021 Sebagai Terbaik 3. Penghargaan kedua yakni Capaian Peserta KB Baru Metode Operasi Pria (MOP) lebih dari 100 persen tahun 2021 Sebagai Terbaik 2.

Penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu kinerja layanan kepada warga makin meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga warga semakin merasakan layanan publik yang diberikan pemerintah dengan mudah dan cepat.

Tabel 2.39 Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	TPR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,21	2,21	2,3	0	2,3	2,03	2,3	2
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Persen	67,8	67,8	23,55	75,52	23,55	74,64	23,56	74,62
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	-	-	11,15	8,11	11,15	9,33	11,13	9,24

Sumber: *Dalduk KB & P3A Kota Sukabumi, 2023*

Namun demikian, permasalahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Sukabumi yang perlu menjadi perhatian, antara lain belum optimalnya peran lembaga dan organisasi yang ada di masyarakat, keterbatasan SDM baik aparatur maupun kader di bidang pengendalian penduduk dan KB, peningkatan cakupan PUS peserta KB aktif belum diikuti dengan penurunan *unmet need* secara proporsional, dan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan KIE dan pemanfaatan kegiatan KB momentum.

2.4.14 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat ditengah kebutuhan sarana transportasi publik seperti pengoperasian 5 unit *Bus Rapid Transit* (BRT) dan Bus Ajak Kami, dimana bus tersebut dikhususkan untuk beroperasi tempat-tempat wisata yang ada di Kota Sukabumi.

Selain itu, pengelolaan perparkiran di Kota Sukabumi juga sudah diperbaiki dengan memberikan arahan juru parkir legal serta memberikan sanksi tegas kepada juru parkir yang tidak menjaga keamanan dan ketertiban kawasan parkir. Hal itu penting mengingat potensi PAD dari sektor parkir ini sangat besar tentunya harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memaksimalkan pendapatan.

Tabel 2.40

**Tabel 2.40 Kinerja Urusan Perhubungan Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Rasio konektivitas kab/kota	Angka	-	-	2000	80,8	2000	100	2200	1
2	V/C Ratio di Jalan kab/kota	Angka	-	-	0,57	0,48 (arteri sekunder) 0,32 (kolektor sekunder) 0,23 (lokal sekunder)	0,57	0,38	0,61	0,37

Sumber: Dishub Kota Sukabumi, 2023

Meski berbagai upaya telah dilakukan, permasalahan perhubungan di Kota Sukabumi yang perlu menjadi perhatian yaitu kemacetan lalu lintas yang masih tinggi, ketersediaan lahan parkir yang masih terbatas, layanan angkutan umum yang belum optimal, dan bangkitan kegiatan terkonsentrasi di pusat kota.

2.4.15 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mewujudkan Kota Sukabumi digital dan informatif perlu usaha bersama sehingga pelibatan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan. Diskominfo sendiri sangat berperan untuk mendorong pelibatan teknologi informasi di berbagai sektor. Selain itu, tersedianya pusat data yang mumpuni diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam merespon keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan pemerintah, Kota Sukabumi juga sudah menerapkan aplikasi Super Kota Sukabumi dan juga E-Lapor. Dengan dua aplikasi tersebut, keluhan kepada Pemerintah Kota Sukabumi maupun masukan apa yang harus dilakukan dapat dilakukan secara langsung dan agar dapat langsung ditangani oleh PD terkait.

Tabel 2.41

**Tabel 2.41 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kota Sukabumi Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	-	-	35	71,87	35	100	35	35
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	-	-	35	100	35	75,76	35	35
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kab/kota	Persen	-	-	62	75,27	62	76,93	63	62

Sumber: Diskominfo Kota Sukabumi, 2023

Meskipun berbagai inovasi telah dihasilkan, permasalahan komunikasi dan informatika di Kota Sukabumi yang perlu menjadi perhatian yaitu belum tersedianya data center serta masih terbatasnya pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

2.4.16 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sebanyak 204 unit koperasi dari 332 unit koperasi di Kota Sukabumi dinyatakan aktif. Sementara yang rutin menggelar rapat anggota tahunan (RAT) dari 204 unit itu hanya 70 unit. Karena itu Pemerintah Kota Sukabumi berupaya agar koperasi yang aktif meningkat. Intinya tidak perlu menambah jumlah koperasi melainkan yang ada diaktifkan kembali (revitalisasi).

Sementara

Sementara itu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Kota Sukabumi, 3 di antaranya telah menembus pasar dunia. UMKM Kota Sukabumi yang mendunia naik kelas itu mengeksport misalnya tempe dan gula merah. Karena itu, pendamping UMKM untuk naik kelas tetap akan dilakukan ke depannya.

Tabel 2.42 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	-	-	15	13,16	15	14,83	17	18,98
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100

Sumber: Diskumindag Kota Sukabumi, 2023

Permasalahan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kota Sukabumi yang perlu menjadi perhatian antara lain belum optimalnya manajemen koperasi, belum optimalnya pola kemitraan atau kerjasama antara koperasi dan UMK dengan pengusaha besar, kurangnya promosi produk usaha mikro, belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi usaha mikro, dan belum tersedianya sistem database koperasi dan usaha mikro yang baik.

2.4.17 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Hingga November 2022, telah ada 4.488 usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Sukabumi. Jumlah tersebut perlu terus ditingkatkan, terlebih pengurusan perizinan dipermudah dengan adanya sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko.

Untuk mendukung hal itu, berbagai inovasi kemudahan layanan terus diluncurkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Salah satunya melalui aplikasi Si Jimat Boss (sistem jemput perijinan masyarakat bersama OSS). Sistem jemput bola perijinan langsung ke masyarakat ini sebetulnya sudah berjalan. Hanya saja, untuk OSS agak sedikit sulit karena tidak bisa digabung dengan program yang lainnya.

Tabel 2.43 Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase peningkatan investasi di kab/kota	Persen	100	100	75	50,05	75	451,16	75	-2,60

Sumber: DPMPSTP Kota Sukabumi, 2023

Permasalahan penanaman modal di Kota Sukabumi yang perlu menjadi perhatian seperti penurunan investasi, investasi sektor industri belum menarik minat investor, dan potensi investasi belum digali secara optimal.

2.4.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Salah satu apresiasi Kota Sukabumi terhadap pemuda yaitu dengan penganugerahan terhadap pemuda pelopor. Anugerah ini diberikan bagi pemuda pelopor yang dinilai mampu memberikan kontribusi, inovasi, motivasi serta menjadi penggerak di tengah-tengah masyarakat. Diharapkan melalui penganugerahan ini, dapat terbangun sebuah jejaring yang terus memberikan kontribusi bagi kebaikan warga Kota Sukabumi.

Selain itu, Pemerintah Kota Sukabumi juga berupaya menyediakan saluran yang baik bagi para pemuda, agar mereka dapat menyalurkan segala bentuk kreativitas, ide, dan inovasinya bagi kemajuan pembangunan Kota Sukabumi. Salah satunya dengan membangun ruang kreasi dan inovasi berbasis wilayah dan mengukuhkan tim *Creative Troops*.

**Tabel 2.44 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Kota Sukabumi Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	5	5	26,88	17,6	26,88	25,59	28,99	24.19
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	25	25	25,14	22,6	25,14	23,87	27,11	22.58
3	Peningkatan prestasi olahraga	Jenis	27	27	50	9	50	15,00	100	17

Sumber: Disporapar Kota Sukabumi, 2023

Permasalahan kepemudaan dan olahraga di Kota Sukabumi yang perlu menjadi perhatian yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung urusan kepemudaan serta belum optimalnya pemanfaatan Sarana Olah Raga (SOR).

2.4.19 Urusan

2.4.19 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Forum Satu Data Kota Sukabumi sudah menunjukkan kemajuan yang berarti. Capaian statistik sektoral yang pada tahun 2021 telah mencapai 100 persen. Terkait pemenuhan data pada website opendata.sukabumikota.go.id, telah dibentuk operator pada masing-masing Perangkat Daerah, setelah sebelumnya peran operator untuk menginput data dilakukan oleh Diskominfo. Selain itu, hal lain yang tengah digarap adalah interoperabilitas aplikasi yang akan semakin memudahkan lalu lintas data antar Perangkat Daerah.

**Tabel 2.45 Kinerja Urusan Statistik Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	60	60	50	71,87	50	100	50	50
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	60	60	50	78,12	50	100	50	50

Sumber: Diskominfo Kota Sukabumi, 2023

Permasalahan statistik di Kota Sukabumi yang perlu menjadi perhatian seperti belum optimalnya pengelolaan, penyelenggaraan dan pelayanan kebutuhan data statistik sektoral serta tingkat partisipasi dan distribusi data dari pengguna/perangkat daerah terhadap kebutuhan pengguna data yang berkualitas sangat rendah. Selain itu, perlu ditingkatkan pelibatan instansi vertikal dalam penyediaan data

2.4.20 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Dalam rangka memperkuat sistem pengamanan informasi, Kota Sukabumi telah melakukan berbagai upaya seperti penggunaan email Sanapati, penerapan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik, penyeragaman bahasa *coding* dalam pembuatan website dan aplikasi, serta monitoring administrasi terkait alat komunikasi (Radio HT).

Tabel 2.46

**Tabel 2.46 Kinerja Urusan Persandian Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	40	40	50	0	50	62,95	60,77	20

Sumber: Diskominfo Kota Sukabumi, 2023

Dalam rangka pengamanan informasi di Kota Sukabumi, upaya-upaya yang dilakukan dirasa masih belum optimal. Karena itu, permasalahan pengamanan informasi perlu tetap menjadi perhatian ke depannya.

2.4.21 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kebudayaan yang ada di Kota Sukabumi perlu untuk dimajukan. Untuk memajukannya tentunya sangat membutuhkan strategi dan dukungan dari semua unsur. Sebab, kebudayaan memiliki ruang lingkup yang luas, baik sasaran maupun segmentasinya.

Saat ini Kota Sukabumi memiliki program garapan kebudayaan yang terdiri dari 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Baik berupa manuskrip, bahasa, olah raga tradisional, pengetahuan tradisional dan cagar budaya yang menjadi *heritage*. Untuk melaksanakannya tentunya dilakukan secara bertahap dari langkah pemajuan mulai perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan OPK.

**Tabel 2.47 Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Unit/Persen	8	8	77	73	77	73,33	77	73,33

Sumber: Disdikbud Kota Sukabumi, 2023

Berdasarkan capain kinerja urusan kebudayaan, permasalahan kebudayaan di Kota Sukabumi yang perlu menjadi perhatian antara lain kurangnya minat masyarakat dalam melestarikan seni budaya tradisional, belum adanya pembangunan museum kepurbakalaan dan jarahnitra, dan kurangnya perlindungan pemeliharaan dan penyelamatan warisan budaya tak benda dan hak kekayaan intelektual.

2.4.22 Urusan

2.4.22 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Terdapat berbagai capaian urusan perpustakaan Kota Sukabumi tahun 2022 di antaranya penghargaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) inspiratif di Jawa Barat, kemudian akreditasi A untuk perpustakaan SMAN I dan Syamsul Ulum.

Sedangkan dalam indeks literasi masyarakat, berdasarkan penilaian IKK atau Indikator Kinerja Kunci yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, saat ini merupakan terbaik ketiga ditingkat nasional. Sementara untuk bidang kearsipan, kinerjanya merupakan yang terbaik keempat di Jawa Barat.

Tabel 2.48 Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	15,416	15,416	58	61,49	58	65,34	58,4	70,10
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	-	55,25	55,06	55,25	39,68	55,5	96,85

Sumber: *Dispupip Kota Sukabumi, 2023*

Namun demikian, permasalahan perpustakaan di Kota Sukabumi yang perlu terus menjadi perhatian yaitu terkait dengan peningkatan budaya literasi masyarakat di tengah gempuran media sosial, sarana perpustakaan yang belum semuanya ideal, dan terbatasnya pustakawan.

2.4.23 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Transformasi teknologi informasi berubah secara cepat, tidak terdeteksi dan harus dihadapi. Implikasinya, pengelolaan arsip juga harus bertransformasi dan SDM pun harus segera beradaptasi. Karena itu, Kota Sukabumi telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Teintegrasi (Srikandi) versi 2 bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi pada Agustus 2022.

Penggunaan aplikasi Srikandi tersebut sebagai upaya menerapkan digitalisasi arsip pemerintahan agar efisien dan efektif. Selain itu, agar seluruh dokumen terkonsolidasikan dengan baik dan tidak tercecer.

Tabel 2.49

**Tabel 2.49 Kinerja Urusan Kearsipan Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAI AN	TARGET	CAPAI AN	TARGET	CAPAI AN	TARGET	CAPAIAN
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawa ban nasional	Persen	-	-	72,5	55,0 3	72,5	56,0 3	83,75	63,12
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawa ban tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	-	-	73	50	73	51,6 7	82	66,67

Sumber: *Dispusip Kota Sukabumi, 2023*

Walaupun sudah ada aplikasi, permasalahan kearsipan di Kota Sukabumi yang tetap perlu menjadi perhatian yaitu adanya keterbatasan arsiparis dan penyelesaian digitalisasi arsip.

2.4.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Dahulu Kota Sukabumi terkenal dengan komoditas unggulan ikan air tawar, hal ini ditandai dengan adanya kantor Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT). Keberadaan BBPBAT tersebut idealnya dapat memberikan nilai lebih bagi masyarakat Kota Sukabumi khususnya pembudidaya ikan air tawar.

Saat ini, Pemerintah Kota Sukabumi menggelorakan agar masyarakat setiap hari di meja-meja makan, menu hotel dan restoran agar selalu tersedia ikan dengan berbagai variasi menunya. Hal ini ditujukan agar masyarakat terbiasa mengkonsumsi ikan. Jika budaya mengkonsumsi ikan sudah mengakar, salah satu permasalahan terkait dengan stunting dapat teratasi. Mengingat stunting sangat terkait dengan asupan gizi.

Tabel 2.50

Tabel 2.50 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota	Jumlah (ton)	24,71	24,71	1.365,65	1.243,83	1.365,65	1.388,07	1.368,95	1.401,11

Sumber: DKP3 Kota Sukabumi, 2023

Oleh karena itu, permasalahan kelautan dan perikanan di Kota Sukabumi yang perlu menjadi perhatian antara lain tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat yang masih rendah, belum optimalnya standarisasi budidaya perikanan, dan fasilitasi pelaku olahan hasil perikanan belum optimal.

2.4.25 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kota Sukabumi memiliki satu kawasan yang dikenal dengan nama Kota Paris. Penamaan Kota Paris disematkan seolah menjadi etalase Kota Sukabumi pada zaman Belanda. Seiring berjalannya waktu, keberadaan “Kota Paris” pun semakin luntur.

Kota Sukabumi sendiri memiliki tempat wisata yang terbatas. Karena itu perlu dilakukan upaya untuk mendongkrak objek wisata baru. Jadi tidak hanya terfokus disatu titik namun harus menyebar di setiap wilayah.

Adanya pembangunan jalan tol dan jalur kereta api, akses menuju Kota Sukabumi akan semakin mudah. Peluang ini tentunya akan meningkatkan mobilitas orang untuk datang ke Kota Sukabumi. Karena itu, optimalisasi sektor pariwisata perlu ditingkatkan dan untuk mendukung perekonomian kota.

Tabel 2.51 Kinerja Urusan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara p kebangsaan	Persen	-	-	3	7	3	1,999	3,5	2,24

2. Persentase

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	Persen	-	-	13	27	13	21,74	14,5	21.97
3	Tingkat hunian akomodasi	Hari	2	2	26.500	4.475	26.500	36.000	30.000	82.05
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	-	-	1-1,14	2,92	1-1,14	2,95	1,15-1,29	271,81
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	-	-	21.541.807,31	13.419.712.356	21.541.807,315	46.861.100.000	23.695.988.046	22.448.213.698

Sumber: Disporapar Kota Sukabumi, 2023

Permasalahan pariwisata di Kota Sukabumi yang perlu menjadi perhatian antara lain sinergitas (daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, komunitas, dan media) dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal, terbatasnya Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW), masih kurangnya promosi pariwisata, masih terbatasnya SDM pariwisata serta ekonomi kreatif, dan masih adanya tumpang tindih pengelolaan tempat wisata.

2.4.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Lahan pertanian, terutama sawah di Kota Sukabumi relatif terbatas. Karena itu, Pemerintah Kota Sukabumi berupaya mendorong masyarakat bisa bertani mandiri dengan memanfaatkan pekarangan menjadi lahan pangan alternatif.

Sementara itu untuk meningkatkan produksi padi, penerapan indeks penanaman (IP) 400 perlu digencarkan. Konsep ini, bibit dalam setahun bisa dilakukan empat kali panen. Pola ini bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas padi untuk menjawab tantangan keterbatasan lahan pertanian sawah di Kota Sukabumi.

Tabel 2.52

**Tabel 2.52 Kinerja Urusan Pertanian Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton	6,16	6,16	6,41	24.480	6,41	664,65	6,54	6,7
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-	-	20	26,87	20	0	20	0

Sumber: DKP3 Kota Sukabumi, 2023

Dengan keterbatasan yang ada, permasalahan pertanian di Kota Sukabumi yang perlu menjadi perhatian yaitu tingginya alih fungsi lahan termasuk LP2B, minat masyarakat untuk bertani yang semakin berkurang, distribusi bibit/benih tanaman hortikultura belum optimal, dan *urban farming* belum menjadi gerakan masif dalam mendukung ketahanan pangan.

2.4.27 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi untuk meningkatkan aktivitas perdagangan yaitu dengan melakukan revitalisasi beberapa pasar. Seperti revitalisasi Pasar Pelita dan Pasar Rakyat Jawa Barat Juara. Bahkan Bappeda Kota Sukabumi berencana mengalihfungsikan eks Terminal Sudirman sebagai pusat bisnis dan perdagangan. Hal itu, dilakukan sebagai upaya pengentasan kawasan kumuh dan untuk menambah sarana perdagangan kota.

Untuk menghidupkan aktivitas perdagangan di dalam pasar, salah satu langkah yang dilakukan yaitu dengan melakukan penertiban PKL yang masih berjualan di luar pasar. Dengan demikian, aktivitas perdagangan di dalam pasar dapat meningkat.

Tabel 2.53

**Tabel 2.53 Kinerja Urusan Perdagangan Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	-	-	1	6,19	1	100	1	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	-	-	90	91,95	90	53,78	90	45,157
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	-	-	25	23,6	25	89,33	27	208,75

Sumber: Diskumindag Kota Sukabumi, 2023

Walaupun revitalisasi pasar telah dilakukan, permasalahan perdagangan di Kota Sukabumi yang tetap perlu menjadi perhatian yaitu ketersediaan pasar rakyat dan sarana distribusi agar lebih menjangkau seluruh wilayah, sistem terpadu monitoring serta koordinasi ketersediaan dan harga bahan pokok perlu untuk dikembangkan, dan belum optimalnya pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

2.4.28 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kota Sukabumi memiliki wilayah yang terbatas sehingga pengembangan industri berbasis lahan mustahil untuk dikembangkan. Karena itu, industri yang potensial dikembangkan di Kota Sukabumi yaitu industri kreatif.

Pengembangan industri kreatif di Kota Sukabumi telah menghantarkan Wali Kota Sukabumi mendapatkan penghargaan sebagai *Creative Leader* dari *Indonesia Creative Cities Network* (ICCN). Apresiasi tersebut diberikan atas kontribusi dan perhatian pada pengembangan ekosistem industri kreatif Indonesia. Bahkan beberapa program strategis pengembangan sektor kreatif berhasil menjadikan Sukabumi sebagai salah satu kota kreatif di Jawa Barat.

Tabel 2.54

**Tabel 2.54 Kinerja Urusan Perindustrian Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	Persen	0,2	0,2	0,4	3,88	0,4	0,42	0,5	3,19
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPJP	Persen	-	-	10	10	10	0	10	10
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	-	-	50	16,27	50	0	50	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	-	-	20	0	20	0	20	20
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Buku	-	-	1	85	1	85	1	85

Sumber: Diskumindag Kota Sukabumi, 2023

Permasalahan perindustrian di Kota Sukabumi yang perlu menjadi perhatian antara lain masih rendahnya IKM produktif, pemanfaatan teknologi bagi industri kecil masih rendah, dan pemasaran produk IKM yang masih terbatas.

2.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Dari keenam SPM tersebut, capaian SPM di Kota Sukabumi yang masih memerlukan perhatian yaitu:

1. SPM Pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Di Kota Sukabumi untuk jenis layanan dasar pada jenjang PAUD capaiannya belum optimal dan masih jauh dari target yang ditetapkan. Karena itu, melacak tuntas pemetaan anak yang berusia 5-6 tahun untuk dilayani di PAUD merupakan hal penting untuk segera dilakukan.
2. SPM Kesehatan, khususnya pada jenis layanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut. Hal ini diperlukan intervensi khusus mengingat capaiannya masih jauh dari target. Selain itu, penduduk usia tua (diatas 65 tahun) di Kota Sukabumi cenderung semakin meningkat setiap tahunnya. Upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan jenis layanan tersebut seperti penyebaran Pos Binaan Terpadu (Posbindu) disetiap Rukun Warga (RW) yang ada di wilayah Kota Sukabumi. Hal ini diperlukan agar kelompok lansia dapat tersentuh dalam skrining kesehatan. Selain itu, perlunya sistem pencatatan dan pelaporan tentang pelayanan lansia yang menggunakan akses pelayanan di rumah sakit atau klinik swasta.
3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya untuk jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian layanan dasar tersebut masih jauh dari target. Padahal limbah domestik dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan jika tidak diolah dengan benar. Karena itu, pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sanitasi aman. Pengelolaan air limbah domestik merupakan pekerjaan panjang dari hulu hingga hilir.

Tabel 2.55

Tabel 2.55 Capaian SPM Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
PENDIDIKAN										
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/Mts)	100%	105%	100%	101%	100%	96,51%	100%	99,18%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100%	56%	100%	80,7%	100%	70,17%	100%	79%

Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
KESEHATAN										
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100,80%	100%	101,91%	100%	99,9%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	103,29%	100%	103,83%	100%	99,9%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	103,29%	100%	108,69%	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	75,59%	100%	99,15%	100%	95,6%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	57,25%	100%	100%	100%	91,2%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	19,82%	100%	27,09%	100%	90,16%	100%	53,1%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
	DASAR	PENCAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	67,72%	100%	72,06%	100%	75%	100%	91,6%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	12,46%	100%	100%	100%	91,6%
9	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i>	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	13,03%	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100%	100%	91,93%	100%	100%	100%	81,6%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	95,05%	100%	100%	100%	95,1%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,7%
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-sehari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	90,85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	96,78%	100%	179%	100%	48,66%	100%	57,87%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	24,49%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SOSIAL										
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Rehabilitasi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023

2.6 Pencapaian

2.6 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Bersama dengan 25 kota dan kabupaten di Jawa Barat, Pemerintah Kota Sukabumi dan sejumlah elemen masyarakat berkomitmen dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs (*Sustainable Development Goals*). Komitmen tersebut diganjar dengan penghargaan SDGs Award Tahun 2022. Di mana Kota Sukabumi meraih penghargaan peringkat ke-12 dari seluruh kota di Indonesia dengan skor 63.28.

**Tabel 2.56 Capaian TPB/SDGs Kota Sukabumi
Tahun 2020-2022**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Tahun		
				2020	2021	2022
Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan						
Target 1.2						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	6,67	7,7	8,25	8,02
Target 1.3						
1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	81,4	84	93,38	97,17
Target 1.4						
1.4.1(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	100	100	97,47	100
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	86,3	86,3	96,9	96,64
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	79,47	80	73,98	74,62
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	2,71	1,43	62,26	95,48
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Persen	97,5	94	4	5.8
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Persen	95	81	97,99	99,98

1.4.1. (h) Angka

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Tahun		
				2020	2021	2022
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	92,56	83.33	83,17	82,96
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Angka	97,64	97,7	70,62	72,5
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persen	100	97.9	98,2	98,9
Tujuan 2: Tanpa Kelaparan						
Target 2.1						
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Persen	n/a	n/a	n/a	3,1
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	6,5	5,74	6,55	7,75
Target 2.2						
2.2.1.*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persen	8,56	7,32	5,9	6,28
2.2.1.(a)	Prevalensi (Stunting Pendek dan Sangat Pendek) Pada anak dibawah dua tahun	Persen	6,26	6,80	5,63	5,30
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (kurus/wasting)	Persen	3,05	2,48	3,17	5
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (gemuk)	Persen	4,17	1,4	11,74	2,56
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	12,58	13,66	16,3	13,3
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persen	77,4	69,6	67,5	71,35
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Skor PPH	79,9	86	84.8	83,9
Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera						
Target 3.1						

3.1.2* (Pesentase)

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Tahun		
				2020	2021	2022
3.1.2*	(Persentase) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	100	97,06	98,5	97,23
Target 3.2						
3.2.1.*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Persen	2,81	0,8	0,17	0,7
3.2.2.*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Persen	2,97	3,2	2,95	4,2
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Persen	5,78	4,0	4,3	6,3
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persen	86,3	86,3	96,9	96,64
Target 3.3						
3.3.3.*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Persen	0,003	0,003	0	0,028
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Buah	1 (kota sukabumi sudah eliminasi malaria)	1 (kota sukabumi sudah eliminasi malaria)	1 (kota sukabumi sudah eliminasi malaria)	1 (kota sukabumi sudah eliminasi malaria)
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persen	85	90	100	100
3.3.5.*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Orang	Filariasis 8 kasus; Kusta 3 Kasus	Filariasis 8 kasus; Kusta 3 Kasus	Filariasis 8 kasus; Kusta 3 Kasus	Filariasis 8 kasus; Kusta 12 Kasus
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Buah	0 (Kota Sukabumi belum eliminasi kusta)	0 (Kota Sukabumi belum eliminasi kusta)	0 (Kota Sukabumi belum eliminasi kusta)	0 (Kota Sukabumi belum eliminasi kusta)
3.3.5.(c)	Jumlah Kab/Kota dengan eliminasi Filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I)	Buah	0 (kota sukabumi belum eliminasi filariasis)	0 (kota sukabumi belum eliminasi filariasis)	0 (kota sukabumi belum eliminasi filariasis)	0 (kota sukabumi belum eliminasi filariasis)
Target 3.4						
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	Persen	5,9	6,7	7,4	7,2
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	19,9	19,9	15,7	10,2
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	Persen	14,8	14,8	22,3	22,7

3.4.2.(a) Jumlah

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Tahun		
				2020	2021	2022
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Buah	15 (Puskesmas di Kota Sukabumi)	15 (Puskesmas di Kota Sukabumi)	15 (Puskesmas di Kota Sukabumi)	15 (Puskesmas di Kota Sukabumi)
Target 3.5						
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	jumlah	7	7	7	7
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.	jumlah	0	20	40	10
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	jumlah	0	20	40	20
3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	jumlah	0	1	1	1
Target 3.7						
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Persen	52,54	53,56	61,42	n/a
3.7.1(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	74,78	75,52	74,64	n/a
3.7.1(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Orang	27,47	28,54	29,5	n/a
3.7.2.*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Persen	41,28	37,23	1,44	n/a
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	persen	n.a	2,16	2,23	n/a
Target 3.8						
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Persen	10,12	8,12	9,33	9,24
3.8.2.*	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Jiwa	318344	322336	330053	345236
Target 3.a						

3.a.1* Persentase

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Tahun		
				2020	2021	2022
3.a.1.*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	27,87	34,7	55,31	50,82
Target 3.b						
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persen	Persen	97,6	93,15	93,3
Target 3.c						
3.c.1.*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Per 100.000 penduduk	620,73	628,81	712,96	769,39
Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas						
Target 4.1						
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Persen	100	100	100	100
4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	95	96,7	101	97
4.1.1(b)	Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B.	Persen	94	93,4	104	92
4.1.1(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Persen	50	50	50	55
4.1.1(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Persen	105,5	103	99	99,9
4.1.1(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.	Persen	108,3	107	98	111,2
4.1.1(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.	Persen	119,75	88,02	90,37	91,78
4.1.1(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Tahun	9,73	9,82	10,1	9,81
Target 4.2						
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	73	80,8	69	65,2
Target 4.3						
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ sederajat.	Persen	119,75	88,02	78,86	78,86
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Persen	25,15	n/a	n/a	34,10
Target 4.6						
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	100	100	100	99,99
Tujuan 5: Kesetaraan Gender						

Target 5.1

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Tahun		
				2020	2021	2022
Target 5.1						
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Kebijakan	40	40	40	40
Target 5.2						
5.2.1(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persen	100	100	100	100
Target 5.5						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	0,17	0,17	17,1	17,1
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persen	45,84	43,59	8,57	8,57
Target 5.6						
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Regulasi	UU 52/2019	UU 52/2019	UU 52/2019	UU 52/2019
Target 5.b						
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Persen	73,32	71,12	N/A	N/A
Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak						
Target 6.1						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	97,6	94,84	92,1	92,1
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	100	100	92,1	100
Target 6.2						
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Persen	0	2	78,7	77,0

6.2.1.(c) Jumlah

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Tahun		
				2020	2021	2022
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Per kelurahan	33	33	22	30
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Buah	33	33	33	33
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Jumlah	n/a	n/a	n/a	n/a
Target 6.3						
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Jumlah	n/a	n/a	n/a	n/a
Target 6.4						
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Laporan	0	0	0	0
Target 6.5						
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	Jumlah	n/a	n/a	1	n/a
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Jumlah	n/a	n/a	2	n/a
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Ha	n/a	n/a	2.3	3.1
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Das	n/a	n/a	1	1
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Das	n/a	n/a	1	1
Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau						
Target 7.1						

7.1.1* Rasio

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Tahun		
				2020	2021	2022
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A
Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi						
Target 8.1						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Persen	4,72	4,72	2,05	3,69
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Rupiah	36677776,26	37503190,59	37,208	9 324,16
Target 8.2						
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A
Target 8.3						
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Persen	Laki-Laki 22,04 % Perempuan 77,96 %	Laki-Laki 72,75 % Perempuan 38,39 %	Laki-Laki 65,23 % Perempuan 34,76 %	Laki laki 79,75 % Perempuan 44,91 %
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persen	41,39	68,58	98,15	53,62
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persen	1,82	4,01	4,26	4,19
Target 8.5						
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	6,51	11,15	10,78	7,39
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	Persen	25,06	23,85	11,4	n/a
Target 8.9						
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Jumlah	3027	1967	3451	3.599
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jumlah	221055	143685	361664	441.132
Target 8.10						
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa.	Jumlah	n/a	n/a	77	77
Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur						
Target 9.2						
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	persen	5,11	5,06	n/a	n/a

9.2.1.(a) Laju

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Tahun		
				2020	2021	2022
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	persen	4,61	-1,84	n/a	n/a
Target 9.4						
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Persen	11	n/a	n/a	n/a
Target 9.c						
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Persen	85,55	79,84	82,85	84,98
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Persen	n/a	62,48	71,2	76,46
Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan						
Target 10.1						
10.1.1	Koefisien Gini.	Poin	0,419	0,402	0,436	0.482
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	6,67	7,7	8,25	08:02
Target 10.3						
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Kasus	120	134	0	0
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Kasus	178	0	20	0
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kasus	0	0	0	0
Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan						
Target 11.1						
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen	n/a	n/a	96	98,90
Target 11.2						
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persen	2,25	19,56	17,97	28
Target 11.3						

11.3.2. (a) Rata-rata

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Tahun		
				2020	2021	2022
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Persen	90	90	90	90
Target 11.5						
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	KK	n/a	0,002	0,001	0.01
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indeks	n/a	114,4	102.67	92.91
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Kelurahan	n/a	15	15	17
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Unit	1	1	1	1
Target 11.6						
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	83,9	n/a	73,76	73,76
Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab						
Target 12.4						
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	Peserta	1	1	1	1
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Kg/hari	650	650	650	650
Target 12.5						
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	58.830.71	63.087.63	40,5	40,5
Target 12.8						
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Buah	0	0	0	0
Tujuan 16: Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh						
Target 16.1						
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	persen	n/a	1,52	n/a	n/a
Target 16.2						
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kasus	8	26	13	15

Target 16.5

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Tahun		
				2020	2021	2022
Target 16.5						
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Persen	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 16.6						
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	1,02	NA	NA	0,22%
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persen	74	68	77	95
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Persen	N/A	N/A	N/A	67,74%
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	N/A	N/A	64,98	79,54
Target 16.7						
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	0,17	0,17	17,1	17,1
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persen	17,24	13,33	15	15
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a
Target 16.9						

16.9.1* Proporsi

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Tahun		
				2020	2021	2022
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Persen	n/a	n/a	98,23	98,48
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	persen	98,14	98,22	n/a	n/a
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	100	100	98,1	98,,90
Target 16.10						
16.10.2(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Persen	97,64	97,7	74	100
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Persen	0	0	0	0
Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan						
Target 17.1						
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Persen	2.94	3.14	2.82	2,24
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persen	0.36	0.34	0.35	0,39
Target 17.6						
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a
Target 17.8						
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persen	n/a	82,85	71,20	84,98
Target 17.17						
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah	0	0	0	0

17.17.1.(b) Jumlah

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Tahun		
				2020	2021	2022
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah	0	0	0	0
Target 17.18						
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Persen	55	58	60	55
Target 17.19						
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan.	-	ada	ada	ada	ada
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	jumlah	ada	ada	ada	ada
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Jumlah	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: *Bappeda Kota Sukabumi, 2023*

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pencapaian TPB Kota Sukabumi cenderung fluktuatif. Hal tersebut dimungkinkan karena terdapat kondisi yang di luar kendali dari Pemerintah Kota Sukabumi, seperti adanya pandemi Covid-19. Upaya untuk meningkatkan capaian TPB di Kota Sukabumi terus dilakukan seperti dengan lebih banyak melibatkan pemangku kepentingan untuk pencapaian target-target TPB tersebut.

2.7 Kerja Sama Daerah

Dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah, melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang prima, Pemerintah Kota Sukabumi melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama yang dilaksanakan pada umumnya untuk jangka waktu satu tahun. Namun terdapat juga kerja sama yang dilakukan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Kerja sama tersebut dilakukan baik dengan pemerintah daerah lain, kementerian, lembaga pendidikan, maupun dari swasta.

Tabel 2.57

Tabel 2.57 Kerja Sama Daerah Jangka Waktu Lebih Setahun di Kota Sukabumi Tahun 2020-2022

NO	PERJANJIAN KERJA SAMA	MITRA	TAHUN TANDA TANGAN	JANGKA WAKTU
1	Pemungutan dan penyeteroran pajak penerangan jalan serta pembayaran rekening listrik Pemda Kota Sukabumi	PT PLN	2020	5 tahun
2	Layanan cepat tanggap darurat kesehatan/ <i>Public Safety Center</i> (PSC) 119, <i>call centre</i> dengan 119 atau menggunakan nomor lokal lainnya	Dinas Kesehatan	2020	5 tahun
3	Optimalisasi pungutan pajak pusat dan daerah di Kota Sukabumi	Dirjen Pajak & Dirjen Perimbangan Keuangan	2020	5 tahun
4	Sinergitas intesifikasi pajak daerah, pengembangan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pemberdayaan masyarakat	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	2020	5 tahun
5	Program magang dan penelitian dalam rangka merdeka belajar ampus merdeka (MBKM)	Itenas – Bandung	2021	2 tahun
6	Sinergitas program dan kegiatan dalam rangka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	2021	3 tahun
7	Pemanfaatan sertipikat elektronik pada sistem elektronik	Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara	2021	4 tahun
8	Kerja sama bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta jasa keprofesian pendidikan	Itenas – Bandung	2021	3 tahun
9	Pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Pemerintah Kabupaten Bogor	2022	2 tahun
10	Penyelenggaraan program transmigrasi di lokasi/kawasan transmigrasi upt salulisu desa batu parigi kecamatan tobadak kabupaten mamuju tengah provinsi sulawesi barat	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	2022	-

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Sukabumi, 2023

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Di awal tahun 2020, dunia termasuk Indonesia terkena pandemi Covid-19 dengan penyebaran yang sangat cepat. Hal ini berdampak pada banyak aspek termasuk sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terimbas dampak tersebut. Kondisi tersebut juga terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi.

Penurunan aktivitas ekonomi diiringi dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli masyarakat. Hal ini juga berdampak pada penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan PAD Kota Sukabumi yang paling berdampak yaitu pada pos retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kedua pos penerimaan itu mengalami penurunan.

Tabel 3.1

**Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan APBD Kota Sukabumi
Tahun 2018-2020**

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	PENDAPATAN	1.236.836.372.142	1.338.381.236.989	1.219.380.420.279
1.1	Pendapatan Asli Daerah	354.499.925.441	363.683.852.127	338.165.897.404
1.1.1	Pajak Daerah	42.721.438.880	44.449.308.780	44.966.344.992
1.1.2	Retribusi Daerah	7.803.047.280	8.509.240.250	6.372.733.700
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.535.276.194	3.795.928.632	4.284.853.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	300.440.163.087	306.929.374.465	282.541.965.712
1.2	Dana Perimbangan	709.500.946.000	751.118.694.235	710.625.292.615
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	69.156.605.000	68.258.909.235	80.016.342.086
1.2.2	Dana Alokasi Umum	495.865.420.000	519.590.243.000	474.164.097.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	144.478.921.000	163.269.542.000	156.444.853.529
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	172.835.500.701	223.578.690.627	170.589.230.260
1.3.1	Pendapatan Hibah	37.446.400.000	36.727.360.000	40.302.949.491
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	64.776.113.501	71.742.991.033	73.694.217.544
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.250.000.000	33.794.565.000	19.863.306.000
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	31.362.987.200	81.313.774.594	36.728.757.225

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2023

Selain PAD, realisasi penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga menunjukkan tren menurun pada 2020. Jika diurutkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah berkurang sekitar Rp 52,9 miliar, dana perimbangan berkurang sekitar Rp 40,4 miliar, dan PAD berkurang sekitar Rp 25,5 miliar.

Tabel 3.2

**Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan APBD Kota Sukabumi
Tahun 2021-2022**

NO.	URAIAN	TAHUN	
		2021	2022
1	PENDAPATAN	1.244.104.862.003	1.212.367.670.664
1.1	Pendapatan Asli Daerah	309.548.353.060	362.135.926.773
1.1.1	Pajak Daerah	50.495.372.637	51.248.584.046
1.1.2	Retribusi Daerah	6.857.790.000	7.968.631.300
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.346.251.720	4.037.833.800
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	247.848.938.694	298.880.877.627
1.2	Pendapatan Transfer	835.866.891.308	821.147.030.215
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	835.866.891.308	821.147.030.215
1.2.1.1	Dana Perimbangan	672.542.589.090	717.381.967.231
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	520.619.816.000	536.390.643.856
1.2.1.1.1.1	DBH Pajak/Bukan Pajak	57.052.161.000	73.635.888.856
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Khusus	463.567.655.000	462.754.755.000
1.2.1.1.1.2	Dana Transfer Khusus	151.922.773.090	180.991.323.375
1.2.1.1.2.1	DAK Fisik	75.564.597.000	58.804.148.375
1.2.1.1.2.2	DAK Non Fisik	76.358.176.090	122.187.175.000
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	41.690.471.000,00	3.504.359.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.633.831.218	100.260.703.984
1.2.2.1	Dana Bagi Hasil	70.288.488.884	72.196.746.544
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	51.345.342.334	28.063.957.440
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	39.972.439.281	15.881.982.800
1.3.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0	1.500.000.000
1.3.2	Pendapatan Lainnya	39.972.439.281,00	14.381.982.800

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2023

Tahun 2021 merupakan tahun resiliensi sebagai kunci utama bangkit dari pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan berbagai kebijakan dan program dalam rangka memulihkan ekonomi seperti *government spending strategy*. Selain itu dilakukan upaya untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi yang mendorong investasi serta kapasitas fiskal.

Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Sukabumi berimplikasi pada kinerja pendapatan APBD tahun 2022 yang makin membaik terutama pada komponen PAD. Di mana PAD Kota Sukabumi mengalami kenaikan sekitar Rp 52,5 miliar. Sementara itu, komponen pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berkurang masing-masing sekitar Rp 14,7 miliar dan Rp 24 miliar.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikasikan belanja daerah menjadi empat kategori yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Sejalan dengan pergerakan pendapatan daerah, jumlah belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2018-2019 cenderung mengalami peningkatan. Sejak tahun 2020, karena adanya kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19, realisasi belanja APBD Kota Sukabumi cenderung mengalami penurunan.

**Tabel 3.3 Realisasi Belanja APBD Kota Sukabumi
Tahun 2018-2020**

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2018	2019	2020
2	BELANJA	1.361.269.946.041	1.498.836.943.637	1.307.678.604.051
2.1	Belanja Tidak Langsung	517.913.414.206	562.938.219.283	569.803.210.398
2.1.1	Belanja Pegawai	471.334.579.896	514.420.107.304	499.521.610.829
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	37.466.658.760	36.989.617.370	34.537.530.170
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.396.802.000	7.292.000.000	7.729.600.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan dan Kelurahan	715.373.550	736.494.609	766.064.039

2.1.8 Belanja

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2018	2019	2020
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	3.500.000.000	27.248.405.360
2.2	Belanja Langsung	843.356.531.835	935.898.724.354	737.875.393.653
2.2.1	Belanja Pegawai	100.907.891.398	55.559.420.842	57.350.694.167
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	566.813.963.909	603.895.281.871	516.252.955.574
2.2.3	Belanja Modal	175.634.676.528	276.444.021.641	164.271.743.912

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2023

Adanya kebijakan *refocusing* anggaran mulai tahun 2020 berimplikasi pada realisasi belanja APBD Kota Sukabumi. Di mana pada komponen belanja langsung turun signifikan sekitar Rp 198 miliar jika dibandingkan tahun 2019. Jika dicermati lebih lanjut, pos belanja barang dan jasa serta pos belanja modal masing-masing berkurang sekitar Rp 87,6 miliar dan Rp 112 miliar.

**Tabel 3.4 Realisasi Belanja APBD Kota Sukabumi
Tahun 2021-2022**

NO.	URAIAN	TAHUN	
		2021	2022
2	BELANJA	1.201.051.026.976	1.251.736.198.234
2.1	Belanja Operasi	1.033.284.744.043	1.140.354.055.152
2.1.1	Belanja Pegawai	526.183.814.534	551.485.949.939
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	463.515.034.123	527.282.715.430
2.1.3	Belanja Hibah	35.558.645.386	53.977.089.783
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	8.027.250.000	7.608.300.000
2.2	Belanja Modal	135.678.603.527	103.778.127.584
2.2.1	Belanja Modal Tanah	150.000.000	200.000.000
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.651.063.642	34.119.976.823
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.163.238.096	16.254.084.484
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.506.743.579	51.223.673.708
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.207.558.210	1.989.392.569
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0
2.3	Belanja Tidak Terduga	32.087.679.406	7.686.137.156
2.2.1	Belanja Tidak Terduga	32.087.679.406	7.604.015.498

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2023

Pada

Pada tahun 2021-2022, belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan fokus pada penanganan Covid-19.

Pada periode itu, porsi belanja operasi masih menjadi porsi terbesar dalam belanja daerah khususnya untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa. Sementara itu, untuk belanja modal sejak tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan daerah Kota Sukabumi sejak 2018 hingga 2022 masih didominasi oleh penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) terutama untuk menutup defisit anggaran. Meski mendominasi, penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

**Tabel 3.5 Realisasi Pembiayaan APBD Kota Sukabumi
Tahun 2018-2020**

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2018	2019	2020
3	PEMBIAYAAN	124.433.573.899	160.455.706.648	92.298.183.772
3.1	Penerimaan Pembiayaan	133.418.932.739	166.189.349.195	90.298.183.772
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	8.985.358.840	5.733.642.547	2.000.000.000

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2023

Tabel 3.6

**Tabel 3.6 Realisasi Pembiayaan APBD Kota Sukabumi
Tahun 2021-2022**

NO.	URAIAN	TAHUN	
		2021	2022
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	79.787.076.304	27.022.777.959
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	79.787.076.304	27.022.777.959
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	7.623.839.269
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	7.623.839.269

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2023

Adapun pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal perusahaan daerah yaitu ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Sukabumi dan PDAM Tirta Bumi Wibawa serta Bank Jabar Banten yang besaran penyertaan modal tersebut berpedoman pada peraturan daerah yang terkait.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur atau pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

Tabel 3.7

**Tabel 3.7 Neraca Keuangan Kota Sukabumi
Tahun 2019-2022**

No.	U R A I A N	2019	2020	2021	2022
A ASET					
1	Kas	92.140.557.031	80.683.168.151	120.843.335.373	75.575.769.412
2	Piutang	76.906.623.722	55.784.121.076	72.148.505.063	36.648.148.562
3	Persediaan	25.304.722.502	26.801.835.853	21.084.322.143	21.046.908.848
	Jumlah Aset Lancar	194.351.903.255	163.269.125.080	214.076.162.579	133.270.826.822
B INVESTASI JANGKA PANJANG					
1	Investasi Nonpermanen	1.050.000.000	1.044.750.000	945.000.000	90.000.000
2	Investasi Permanen	82.315.016.657	88.663.457.515	89.300.845.969	103.586.363.812
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	83.365.016.657	89.708.207.515	90.245.845.969	103.676.363.812
C ASET TETAP					
1	Tanah	409.788.395.557	416.923.828.363	414.125.493.713	413.806.571.713
2	Peralatan dan Mesin	560.219.624.759	647.255.034.267	668.384.199.785	707.058.418.581
3	Gedung dan Bangunan	589.714.726.881	622.047.258.810	676.895.143.482	692.974.322.763
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	873.313.528.360	892.768.247.074	923.251.758.044	976.729.503.482
5	Aset Tetap Lainnya	55.414.160.088	58.626.158.456	61.648.932.718	63.786.077.967
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.961.600.512	5.343.954.093	9.108.371.033	9.307.949.033
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.007.869.510.650)	(1.247.235.287.704)	(1.300.051.691.828)	(1.414.307.989.289)
	Jumlah Aset Tetap	1.503.542.525.507	1.395.729.193.359	1.453.362.206.947	1.449.354.854.250
D ASET LAINNYA					
1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-
2	Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-
3	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.646.430.000	7.028.805.000	7.028.805.000	7.028.805.000

5. Aset ...

No.	U R A I A N	2019	2020	2021	2022
5	Aset Tak berwujud	12.960.673.661	14.369.012.737	19.285.454.940	19.488.747.872
6	Aset Lain-lain	6.384.790.032	5.598.394.877	605.451.450	605.451.450
	Jumlah Aset Lainnya	26.991.893.693	26.996.212.614	26.919.711.390	27.123.004.322
	JUMLAH ASET	1.808.251.339.112	1.675.702.738.568	1.784.603.926.885	1.713.425.049.206
	KEWAJIBAN				
E	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	393.527.590	202.123.193	555.600	
2	Utang Bunga	-			
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			
4	Pendapatan diterima dimuka	841.786.715	791.351.244	738.231.15	536.277.500
5	Utang Belanja	819.218.472	793.774.393	700.334.732	1.126.375.963
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	24.449.283.952	22.146.169.688	14.270.657.858	17.978.151.570
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	26.503.816.729	23.933.418.518	15.709.779.342	19.640.805.033
F	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
1	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-			
2	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-			
3	Premium (Diskonto) Obligasi	-			
4	Utang Jangka Panjang Lainnya	-			
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	26.503.816.729	23.933.418.518	15.709.779.342	19.640.805.033
G	EKUITAS	1.781.747.522.383	1.651.769.320.050	1.768.894.147.543	1.693.784.244.173
1	Ekuitas	1.781.747.522.383	1.651.769.320.050	1.768.894.147.543	1.693.784.244.173
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.808.251.339.112	1.675.702.738.568	1.784.603.926.885	1.713.425.049.206

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2023

Berdasarkan

Berdasarkan neraca keuangan di atas, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Secara rinci analisis tersebut sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Pemerintah Kota Sukabumi, yaitu:

- Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar guna mengevaluasi kemampuan organisasi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya atau sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar pada tahun 2019 adalah sebesar 7,33 dan sampai dengan periode tahun 2021 mencapai sebesar 13,62.

- Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas yaitu untuk membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah daerah ditambah investasi jangka pendek dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban yang segera harus dipenuhi dengan kas dan investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio kas Kota Sukabumi pada tahun 2019 sebesar 3,47 dan pada tahun 2021 sebesar 7,69. Dengan hasil tersebut menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Sukabumi dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

- Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat berguna untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Rasio cepat Kota Sukabumi pada tahun 2019 sebesar 6,37 dan pada tahun 2021 sebesar 12,28. Dengan hasil tersebut menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Sukabumi dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

2. Rasio

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas yaitu rasio dengan fungsi menilai kemampuan suatu organisasi dalam melunasi semua kewajiban. Termasuk dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan atau rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas secara rinci sebagai berikut:

- Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Rasio total utang terhadap total aset menggambarkan seberapa besar pengaruh utang terhadap aktiva, yaitu semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Besar rasio total utang terhadap total aset Kota Sukabumi pada tahun 2019 sebesar 0,014 dan pada tahun 2021 sebesar 0,0088 Hal ini berarti menunjukkan bahwa pengaruh utang terhadap aktiva sangat kecil.

- Rasio Utang Terhadap Modal

Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang menunjukkan seberapa perlu utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri dan tidak tergantung pembiayaan dari pihak lainnya. Pada tahun 2019 rasio utang terhadap modal Pemerintah Kota Sukabumi sebesar 0,014 serta periode tahun 2021 sebesar 0,0088. Dari perhitungan tersebut bahwa nilai total utang masih jauh di bawah nilai modal, sehingga dapat disimpulkan Pemerintah Kota Sukabumi semakin mandiri serta tidak tergantung pada utang.

3.1.3 Proporsi Penggunaan Anggaran

Fokus bahasan proporsi penggunaan anggaran pada bagian ini terutama pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur periode tahun 2018-2021 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.8

Tabel 3.8 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Sukabumi Tahun 2018-2022

Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)
2018	1.004.959.379.955	1.004.959.379.955
2019	1.070.893.584.715	1.070.893.584.715
2020	1.009.803.058.871	1.011.803.058.871
2021	989.698.848.657	991.698.848.657
2022	1.078.768.664.008	1.258.608.025.133

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2023

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2018-2020 sama dengan total pengeluaran (belanja ditambah pengeluaran pembiayaan). Namun pada periode 2021-2022, belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur lebih rendah dari total pengeluaran.

Dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Pemerintah Kota Sukabumi harus segera menerapkan kebijakan terkait belanja aparatur. Di mana batas maksimal belanja aparatur yaitu 30 persen dari APBD. Hal tersebut dimaksudkan agar belanja daerah difokuskan pada layanan dasar publik, dan pemenuhan amanat alokasi belanja minimum untuk pendidikan dan kesehatan.

3.2 Proyeksi Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan APBD

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting. Daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan lebih mudah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah. Kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah pada periode 2024-2026 arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang akan ditempuh adalah mengupayakan terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan APBD yang sehat. Untuk mendukung hal tersebut akan

tetap

tetap dilakukan reformasi struktural di bidang pengelolaan keuangan daerah di antaranya melalui reformasi administrasi dan kebijakan di bidang perpajakan daerah, belanja daerah, serta pengelolaan aset pemerintah.

Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Sukabumi tahun 2024-2026, diarahkan pada:

1. Penyeimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui:
 - peningkatan penerimaan daerah dan efisiensi belanja daerah;
 - merumuskan pembiayaan defisit anggaran;
2. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan daerah;
3. Revitalisasi pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah terutama ditempuh melalui penajaman alokasi anggaran antara lain dengan realokasi dan *refocusing* belanja daerah agar lebih terarah dan tepat sasaran;
5. Implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2024-2026, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
 - ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame;
 - melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutahiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal;
 - melakukan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemasangan *tapping box* dan alat bantu *software* rekam transaksi;
 - membenahan manajemen penerimaan PAD;
 - meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif;
 - mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;

Meningkatkan

- Meningkatkan kemampuan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan dan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
 3. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah.
 4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil BUMD juga dilakukan melalui dana bergulir dan optimalisasi peran BUMD *holding company*.
 5. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
 6. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, terutama melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).
 7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Berdasarkan isu strategis daerah yang sudah dirumuskan dan mencermati kondisi perekonomian global, nasional, regional, dan lokal, maka kebijakan belanja daerah Kota Sukabumi tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib yang mengikat, seperti gaji, tunjangan, honorarium, belanja jasa kantor listrik, air, telpon, internet, belanja premi asuransi, belanja sewa gedung, perlengkapan dan peralatan;
2. Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun 2024-2026 berpedoman pada ketentuan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. TPP merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja PNS. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;
4. Pemenuhan belanja program prioritas pembangunan Kota Sukabumi tahun 2024-2026;

5. Pemenuhan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kota Sukabumi yaitu sebanyak 29 jenis pelayanan dasar;
6. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG`s);
7. Pengalokasian untuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD;
8. Pengalokasian anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBD ;
9. Pengalokasian belanja untuk infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah;
10. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah;
11. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Belanja hibah berupa tanah, barang atau lainnya dilakukan sesuai kebutuhan dan melihat sisi kemanfaatannya baik kepada individu ataupun lembaga tertentu. Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Belanja bantuan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024, dimana dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kepada KPU dan Bawaslu;
13. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM aparatur dan peningkatan kapasitas APIP;
14. Belanja Daerah telah memperhatikan dan mengakomodir usulan masyarakat dan atas masukan DPRD.

Sementara itu, pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Maka dalam hal APBD diperkirakan mengalami defisit, maka pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditetapkan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Adapun pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal perusahaan daerah yaitu ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Sukabumi dan PDAM Tirta Bumi Wibawa serta Bank Jabar Banten yang besaran penyertaan modal tersebut berpedoman pada peraturan daerah yang terkait.

Dalam

Dalam perencanaan penganggaran SiLPA akan didasarkan pada perhitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

3.2.2 Proyeksi APBD

UU HKPD mengemban misi untuk terciptanya hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan, dalam rangka mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. UU HKPD didesain untuk melakukan upaya reformasi menyeluruh tidak hanya dari sisi *fiscal resource allocation*, namun juga memperkuat belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergi dengan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Terdapat empat pilar utama dalam UU HKPD, yaitu pengembangan sistem pajak daerah guna mendukung alokasi sumber daya yang lebih efisien, pengembangan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dengan meminimalisir ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah yang berbasis kinerja dan perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Kebijakan transfer ke daerah berbasis kinerja antara lain berupa pengalokasian dana bagi hasil (DBH) kepada daerah penghasil dan nonpenghasil yang terdampak eksternalitas negatif dan juga daerah pengolah dengan memperhitungkan kinerja daerah. Alokasi DAU didesain tidak *one size fits all*, namun juga berdasarkan pada *unit cost* kebutuhan dengan memperhatikan jumlah penduduk, kondisi, karakteristik, dan capaian kinerja daerah. Redesain pengelolaan transfer ke daerah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif melalui transfer ke daerah berbasis kinerja, serta pemberian insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik dalam memberikan pelayanan publik.

Dari

Dari sisi pendapatan, UU HKPD memberikan penguatan sistem pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis PDRD, sumber pajak daerah baru, dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. UU HKPD membuka opsi adanya retribusi tambahan. Penguatan PDRD dilakukan dalam rangka mendorong kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja serta memberikan dukungan terhadap usaha kecil berupa skema insentif usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan PDRD ditujukan untuk menurunkan *administration and compliance cost*, memperluas basis pajak, dan harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Di sisi belanja, UU HKPD mengatur penguatan perencanaan belanja daerah melalui penganggaran belanja daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan anggaran yang berdasarkan standar harga. Penguatan disiplin belanja daerah dan pengendalian belanja juga dilakukan melalui pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen dari APBD. Pengaturan ini sebagai wujud *aggregate fiscal control* untuk menjaga efektivitas dan kesinambungan sumber daya fiskal nasional, namun dengan tetap memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan eksekusi belanjanya. Upaya penguatan juga dilakukan melalui peningkatan kualitas penganggaran belanja daerah, peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengawasan internal.

Skema pembiayaan UU HKPD mendorong penggunaan *creative financing* untuk mengakselerasi pembangunan di daerah. UU HKPD tidak hanya mengartikan pembiayaan dalam bentuk uang, namun juga mendorong sinergi pendanaan dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik swasta, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), maupun antar pemerintah daerah. UU HKPD juga membuka opsi bagi daerah yang berkapasitas fiskal tinggi dan telah memenuhi standar layanan publiknya dengan baik untuk membentuk dana abadi daerah demi keberlangsungan manfaat lintas generasi. Adapun sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah dalam UU HKPD dilakukan melalui penyelarasan kebijakan fiskal nasional, penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, dan sinergi dengan badan akun standar (BAS).

Selain

Selain itu, dilakukan pula upaya penyajian dan konsolidasi informasi keuangan, dan pemantauan dan evaluasi, serta pembiayaan utang daerah melalui perluasan skema (konvensional dan syariah), penguatan prinsip kehati-hatian (*prudentially*), dan penggunaan pembiayaan melalui pengutamaan pemanfaatan.

Upaya reformasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dalam rangka mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sukabumi perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak. Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mendukung implementasi UU HKPD, antara lain:

1. Pemerintah Kota Sukabumi perlu menyiapkan strategi yang tepat untuk mengamankan penerimaan pajak daerahnya. Meskipun telah diundangkan akhir tahun 2021 lalu, UU HKPD memberikan ruang bagi Kota Sukabumi untuk dapat menyesuaikan implementasinya di lapangan, melalui penerbitan peraturan daerah tentang pajak daerah masing-masing sebagai turunan dari UU HKPD;
2. Diperlukan sinergi dan kerja sama pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam menjaga kesinambungan sumber daya fiskal dengan Kementerian Keuangan;
3. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Sukabumi untuk meningkatkan kualitas pemungutan. Komitmen tersebut dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Berdasarkan hasil kajian Kementerian Keuangan, penerimaan PDRD bagi kabupaten/kota diperkirakan berpotensi meningkat sebesar 50 persen jika dikelola secara optimal oleh daerah.
4. Pelaksanaan sinergi harus didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Upaya peningkatan kinerja fiskal daerah melalui UU HKPD harus didukung oleh sistem informasi yang dapat mengkonsolidasikan informasi keuangan pemerintah secara nasional sesuai badan akun standar yang terintegrasi antara pusat dan daerah.
5. Dibutuhkan sistem monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan atas kinerja pengelolaan daerah pasca diundangkannya UU HKPD. Hal ini penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas tingkat keberhasilan UU HKPD dalam meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal nasional.

Dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan pengelolaan keuangan daerah baik kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta mengabaikan pendapatan bersumber dana transfer khusus, dana insentif daerah serta bantuan keuangan provinsi, maka proyeksi APBD Kota Sukabumi tahun 2024-2026 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9

**Tabel 3.9 Proyeksi APBD Kota Sukabumi
Tahun 2023-2026**

KODE	URAIAN	REALISASI	ANGGARAN	PROYEKSI		
		2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN DAERAH	1,212,367,670,664	1,133,341,656,956	997,771,547,239	1,052,815,650,367	1,109,126,566,662
1.1	Pendapatan Asli Daerah	363,263,682,587	349,327,555,306	375,433,154,296	409,377,348,952	443,533,392,656
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	67,552,075,530	58,532,530,859	64,385,783,945	67,894,809,170	71,595,076,270
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,215,920,368	5,861,407,000	6,183,784,385	6,523,892,526	6,882,706,615
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,753,064,486	4,823,095,967	4,753,064,486	4,848,125,776	4,945,088,291
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	284,742,622,203	280,110,521,480	300,110,521,480	330,110,521,480	360,110,521,480
1.2	Pendapatan Transfer	837,021,450,210	768,132,118,850	609,911,892,943	628,775,031,415	648,290,515,406
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat:	736,869,410,747	687,929,963,000	525,699,629,300	540,352,154,590	555,446,494,740
1.2.1.1	Dana Perimbangan	712,454,354,747	687,929,963,000	525,699,629,300	540,352,154,590	555,446,494,740
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	551,002,319,115	542,861,039,000	525,699,629,300	540,352,154,590	555,446,494,740
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	89,509,876,615	57,525,126,000	60,401,382,300	63,421,451,415	66,592,523,986
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	461,492,442,500	485,335,913,000	465,298,247,000	476,930,703,175	488,853,970,754
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	161,452,035,632	145,068,924,000	-	-	-

1.2.1.1.2.1 Dana

KODE	URAIAN	REALISASI	ANGGARAN	PROYEKSI		
		2022	2023	2024	2025	2026
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	50,305,855,128	21,258,410,000			
1.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus non Fisik	111,146,180,504	123,810,514,000			
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	24,415,056,000	-			
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-			
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-			
1.2.1.5	Dana Desa	-	-			
1.2.2	Transfer Antar Daerah	109,152,039,463	80,202,155,850	84,212,263,643	88,422,876,825	92,844,020,666
1.2.2.1	Pendapatan bagi hasil;	81,934,803,641	80,202,155,850	84,212,263,643	88,422,876,825	92,844,020,666
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	27,217,235,822	-			
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12,082,537,867	15,881,982,800	12,426,500,000	14,663,270,000	17,302,658,600
1.3.1	Hibah	1,317,000,000	1,500,000,000			
1.3.2	Dana Darurat	-	-			
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	12,082,537,867	14,381,982,800	12,426,500,000	14,663,270,000	17,302,658,600
2	BELANJA DAERAH	1,251,744,741,073	1,156,864,434,915	1,019,222,383,162	1,071,643,195,184	1,132,108,536,970
2.1	Belanja Operasi	1,140,361,727,991	1,085,365,790,149	1,099,548,473,468	1,112,250,994,802	1,124,407,971,591

2.1.1 Dana

KODE	URAIAN	REALISASI	ANGGARAN	PROYEKSI		
		2022	2023	2024	2025	2026
2.1.1	Belanja Pegawai	551,485,949,939	559,915,961,055	571,234,364,447	588,383,002,042	591,354,108,071
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	527,290,388,269	470,914,066,345	459,141,214,686	468,324,038,980	482,842,084,188
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	53,977,089,783	49,611,199,209	64,494,558,972	51,099,535,185	45,989,581,667
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7,608,300,000	4,924,563,540	4,678,335,363	4,444,418,595	4,222,197,665
2.2	Belanja Modal	103,778,997,584	61,998,644,766	36,698,316,494	44,179,837,182	59,848,813,579
2.2.1	Modal Tanah	200,000,000	150,000,000	100,000,000	150,000,000	200,000,000
2.2.2	Modal Peralatan dan Mesin	34,120,846,823	27,835,464,804	16,701,278,882	17,536,342,827	21,043,611,392
2.2.3	Modal Gedung dan Bangunan	16,245,084,484	11,574,552,794	9,259,642,235	11,759,745,639	14,934,876,961
2.2.4	Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	51,223,673,708	18,840,338,150	7,536,135,260	11,454,925,595	20,046,119,792
2.2.5	Modal Aset Tetap Lainnya	1,989,392,569	3,390,289,018	3,051,260,116	3,203,823,122	3,524,205,434
2.2.6	Modal Aset Lainnya	-	208,000,000	50,000,000	75,000,000	100,000,000
2.3	Belanja Tidak Terduga	7,604,015,498	9,500,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
2.4	Belanja Transfer	-	-			
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-			
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-			

Surplus

KODE	URAIAN	REALISASI	ANGGARAN	PROYEKSI		
		2022	2023	2024	2025	2026
	Surplus / (Defisit) Sebelum Pembiayaan	(39,377,070,409)	(23,522,777,959)	(21,450,835,923)	(18,827,544,818)	(22,981,970,308)
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	121,790,911,331	27,022,777,959	23,450,835,923	24,199,373,077	24,981,970,308
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	120,840,911,331	27,022,777,959	23,450,835,923	24,199,373,077	24,981,970,308
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	950,000,000	-			
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan.	-	-			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	6,871,828,260	3,500,000,000	2,000,000,000	5,371,828,260	2,000,000,000

3.2.1 Pembayaran

KODE	URAIAN	REALISASI	ANGGARAN	PROYEKSI		
		2022	2023	2024	2025	2026
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,871,828,260	3,500,000,000	2,000,000,000	5,371,828,260	2,000,000,000
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-			
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-			
	Pembiayaan Neto	114,919,083,071	23,522,777,959	21,450,835,923	18,827,544,817	22,981,970,308
	Surplus/(Defisit) Setelah Pembiayaan	75,542,012,662	-	(0)	(0)	(0)

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2023

3.2.3 Proyeksi

3.2.3 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan sebagai penerimaan, serta pengeluaran yang terdiri atas Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan maka dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Sukabumi untuk periode tahun 2024-2026.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, proyeksi, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Sukabumi untuk periode tahun 2024-2026 diperkirakan akan terus meningkat. Di mana proyeksi tersebut berada pada rentang Rp 735-811 miliar.

Adapun prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Sukabumi dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan prioritas pembangunan serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

**Tabel 3.10 Proyeksi Kapasitas Ril Kemampuan Keuangan
Kota Sukabumi Tahun 2023-2026**

URAIAN	REALISASI (RP)		PROYEKSI (RP)			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	1,244,104,862,003	1,212,367,670,664	1,133,341,656,956	997,771,547,239	1,052,815,650,367	1,109,126,566,662
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
Sisa lebih Riil Perhitungan Anggaran	133,418,932,739	27,022,777,959	27,022,777,959	23,450,835,923	24,199,373,077	24,981,970,308
Penerimaan obligasi daerah	-	-	-	-	-	-
Total penerimaan	1,377,523,794,742	1,239,390,448,623	1,160,364,434,915	1,021,222,383,162	1,077,015,023,444	1,134,108,536,970
Dikurangi:						
Belanja Operasi (dikurangi belanja barang dan jasa ditambah BTT)	601,857,389,326	620,757,476,878	623,951,723,804	650,407,258,782	653,926,955,822	651,565,887,403
Pengeluaran Pembiayaan	8,985,358,840	7,623,839,269	3,500,000,000	2,000,000,000	5,371,828,260	2,000,000,000
Kapasitas riil kemampuan keuangan	766,681,046,576	611,009,132,476	532,912,711,111	368,815,124,380	417,716,239,362	480,542,649,567

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2023

Tabel 3.11

**Tabel 3.11 Proyeksi Alokasi Kapasitas Ril Kemampuan Keuangan
Kota Sukabumi Tahun 2023-2026**

URAIAN	REALISASI (RP)		PROYEKSI (RP)			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prioritas I						
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pemda	24.718.862.010	24.450.835.896	25.673.377.691	26.957.046.575	28.304.898.904	29.720.143.849
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap BLUD						
Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet)	7.641.023.078,00	8.480.278.047	8.904.291.949	9.349.506.547	9.816.981.874	10.307.830.968
Belanja Premi Asuransi						
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.131.154.076,00	6.744.018.159,00	7.081.219.067	7.435.280.020	7.807.044.021	8.197.396.222
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.558.786.061,00	2.810.422.358,00	2.950.943.476	3.098.490.650	3.253.415.182	3.416.085.941
Prioritas II						
Prioritas III						

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2023

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan melalui pelaksanaan program prioritas, maka diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Karena besarnya kebutuhan anggaran tersebut dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan, maka Kota Sukabumi akan senantiasa terus mencari alternatif pembiayaan pembangunan.

Sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) APBD Provinsi; 3) Dana Masyarakat/Umat; 4) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); dan 6) Hibah.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Tidak dapat dipungkiri bahwa kapasitas fiskal Kota Sukabumi masih pada kategori lemah. Hal tersebut didasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2022 masih berkisar 30,58 persen. Sekitar 68,20 persen pendapatan daerah masih bergantung pada transfer Pemerintah Pusat. Karena itu, untuk membiayai program prioritas ataupun program yang selaras dengan prioritas nasional, dukungan pembiayaan dari APBN merupakan salah satu solusi yang realistis untuk beberapa tahun ke depan.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kota Sukabumi dalam pelaksanaan program dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Mekanisme pembiayaannya dapat dilakukan melalui *sharing*.

3. Dana Masyarakat/Umat

Salah satu potensi pendanaan non-APBD yang dapat dijadikan sumber pembiayaan pembangunan Kota Sukabumi adalah melalui dana masyarakat/umat. Potensi dana umat cukup besar, tetapi potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui dana umat ini diharapkan akan

akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. Sumber dana yang dapat dimanfaatkan misalnya dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan/atau dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dimungkinkan dari zakat dan wakaf uang.

4. *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Pendanaan pembangunan non-APBD lainnya yaitu dengan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Sampai saat ini sudah terdapat beberapa mitra yang melaksanakan program tersebut. Karena itu, optimalisasi program kemitraan PKBL dan TJSL perlu terus ditingkatkan dan diperluas agar semakin berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

5. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pemerintah daerah dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha. Kerja sama tersebut terutama dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur. Mengingat APBD saat ini masih harus difokuskan pada pembiayaan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, penanganan bencana dan lain-lain, maka skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) dapat menjadi salah satu solusi.

6. Hibah

Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat meneruskan Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Adapun sumber hibah dapat berasal dari penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan hibah luar negeri.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pembangunan pada RPJMD Tahun 2018-2023, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

4.1.1 Geografi dan Demografi

Permasalahan terkait geografi dan demografi, antara lain:

- Luas wilayah yang relatif kecil;
- Belum optimalnya peran Kota Sukabumi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- Risiko bencana terutama gempa bumi, banjir, dan tanah longsor cukup besar;
- Alih fungsi lahan terus berlangsung;
- Jumlah penduduk usia produktif tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia.

4.1.2 Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat, antara lain:

- Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif perlu dioptimalkan guna meningkatkan LPE;
- Adanya kesenjangan terkait distribusi kekayaan, produktivitas tenaga kerja, akses ekonomi, dan ketahanan dalam menghadapi goncangan;
- Akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat miskin perlu ditingkatkan;

- Lapangan

- Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan TPT masih di atas angka Provinsi dan Nasional;
- Angka putus sekolah perlu ditekan dan angka melanjutkan sekolah antarjenjang pendidikan perlu ditingkatkan;
- Asupan gizi masyarakat perlu ditingkatkan dan angka kesakitan masyarakat perlu ditekan;
- Masih terdapat beberapa kelurahan yang memiliki angka prevalensi *stunting* tinggi.

4.1.3 Daya Saing Daerah

Permasalahan terkait daya saing daerah, antara lain:

- Pandemi Covid-19 menyebabkan rata-rata konsumsi per kapita masyarakat menurun;
- Konektivitas wilayah dengan kondisi mantap perlu ditingkatkan;
- Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masih belum optimal;
- Kualitas dan produktivitas penduduk usia produktif perlu ditingkatkan.

4.1.4 Pelayanan Umum

A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Permasalahan pendidikan, antara lain:

- Belum meratanya akses Pendidikan;
- Belum meratanya distribusi Tenaga Pendidik;
- Belum optimalnya mutu Pendidikan;
- APM SMP dan SMA yang masih di bawah 90 persen;
- Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Permasalahan kesehatan, antara lain :

- Perilaku hidup sehat belum membudaya;
- Meningkatnya angka penyakit tidak menular;
- Banyaknya fasilitas sanitasi yang tidak layak/tidak sehat;
- Masih terdapat keluarga yang belum mengikuti JKN;
- Pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan (pelayanan publik beberapa pusat kesehatan masih bernilai C bahkan ada yang D).

C. Urusan

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pekerjaan umum dan penataan ruang, antara lain:

- Adanya disparitas pembangunan infrastruktur;
- Rendahnya fasilitas RTH publik;
- Jalur pedestrian yang masih terbatas;
- Belum optimalnya penyediaan air bersih;
- Belum optimalnya pengelolaan air limbah;
- Masih tingginya alih fungsi lahan;
- Belum disusunnya RDTR.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, antara lain:

- Masih adanya RTLH yang belum tertangani;
- Masih adanya permukiman kumuh yang belum tertangani;
- Tingkat serah terima aset PSU yang masih rendah.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, antara lain:

- Masih belum tertibnya PKL di beberapa zona yang dinyatakan merah;
- Masih adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
- Peristiwa kejadian bencana yang masih tinggi;
- Belum adanya peralatan pendeteksi bencana.

F. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Permasalahan sosial, antara lain:

- Belum optimalnya pemberian pelayanan sosial;
- Masih adanya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan ODGJ yang berkeliaran di jalanan;
- Minimnya peran serta berbagai pihak dalam penanganan masalah sosial;
- Belum optimalnya peran serta pemanfaatan dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

G. Urusan

G. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan tenaga kerja, antara lain:

- Ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja;
- Kualitas tenaga kerja yang masih rendah.

H. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain:

- Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Rendahnya peran serta perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga.

I. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Permasalahan pangan, antara lain:

- Belum optimalnya diversifikasi pangan masyarakat;
- Ketergantungan yang tinggi akan pasokan pangan dari luar;
- *Urban farming* belum menjadi gerakan masif dalam mendukung ketahanan pangan.

J. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Permasalahan pertanahan, antara lain:

- Sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 ada yang belum selesai sampai sekarang.

K. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup, antara lain:

- Luas RTH yang masih kurang;
- Degradasi kualitas lingkungan;
- Kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup masih kurang;
- Belum optimalnya pengelolaan persampahan.

L. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain:

- Masih

- Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan;
- Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah.

M. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, antara lain:

- Belum optimalnya peran lembaga dan organisasi yang ada di masyarakat;
- Keterbatasan SDM baik aparatur maupun kader di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- Peningkatan cakupan PUS peserta KB aktif belum diikuti dengan penurunan *unmet need* secara proporsional;
- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan KIE dan pemanfaatan kegiatan KB momentum.

N. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Permasalahan perhubungan, antara lain:

- Kemacetan lalu lintas yang masih tinggi;
- Ketersediaan lahan parkir yang masih terbatas;
- Layanan angkutan umum yang belum optimal;
- Bangkitan kegiatan terkonsentrasi di pusat kota.

O. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan komunikasi dan informatika, antara lain:

- Belum tersedianya data center;
- Masih terbatasnya pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

P. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan koperasi, usaha kecil dan menengah, antara lain:

- Belum optimalnya manajemen koperasi;
- Belum optimalnya pola kemitraan atau kerjasama antara koperasi dan UMK dengan pengusaha besar;
- Kurangnya promosi produk usaha mikro;

- Belum

- Belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi usaha mikro;
- Belum tersedianya sistem database koperasi dan usaha mikro yang baik.

Q. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Permasalahan penanaman modal, antara lain:

- Covid-19 berdampak pada penurunan investasi;
- Investasi sektor industri belum menarik minat investor;
- Potensi investasi belum digali secara optimal.

R. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan kepemudaan dan olahraga, antara lain:

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung urusan kepemudaan;
- Belum optimalnya pemanfaatan Sarana Olah Raga (SOR).

S. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Permasalahan statistik, antara lain:

- Belum optimalnya pengelolaan, penyelenggaraan dan pelayanan kebutuhan data statistik sektoral;
- Tingkat partisipasi dan distribusi data dari pengguna/perangkat daerah terhadap kebutuhan pengguna data yang berkualitas sangat rendah.

T. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Permasalahan persandian, antara lain:

- Belum optimalnya pengamanan informasi.

U. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Permasalahan kebudayaan, antara lain:

- Kurangnya minat masyarakat dalam melestarikan seni budaya tradisional;
- Belum adanya pembangunan museum kepurbakalaan dan jarahnitra;
- Kurangnya perlindungan pemeliharaan dan penyelamatan warisan budaya tak benda dan hak kekayaan intelektual.

V. Urusan

V. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Permasalahan perpustakaan, antara lain:

- Rendahnya budaya literasi masyarakat;
- Sarana perpustakaan daerah yang belum ideal;
- Terbatasnya pustakawan.

W. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Permasalahan kearsipan, antara lain:

- Terbatasnya arsiparis.
- Belum semua arsip didigitalisasi.

X. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan kelautan dan perikanan, antara lain:

- Tingkat konsumsi ikan masih rendah;
- Belum optimalnya standarisasi budidaya perikanan;
- Fasilitasi pelaku olahan hasil perikanan belum optimal.

Y. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Permasalahan pariwisata, antara lain:

- Covid-19 berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata;
- Sinergitas daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, komunitas, dan media dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal;
- Terbatasnya Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW);
- Masih kurangnya promosi pariwisata;
- Masih terbatasnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

Z. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Permasalahan pertanian, antara lain:

- Tingginya alih fungsi lahan termasuk LP2B;
- Minat masyarakat untuk bertani yang semakin berkurang;
- Distribusi bibit/benih tanaman hortikultura belum optimal;
- *Urban farming* belum menjadi gerakan masif dalam mendukung ketahanan pangan.

AA. Urusan

AA. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Permasalahan perdagangan, antara lain:

- Ketersediaan pasar rakyat dan sarana distribusi perlu untuk ditingkatkan;
- Sistem terpadu monitoring serta koordinasi ketersediaan dan harga bahan pokok perlu untuk dikembangkan;
- Belum optimalnya pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

BB. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Permasalahan perindustrian, antara lain:

- Rendahnya IKM produktif;
- Pemanfaatan teknologi bagi industri kecil masih rendah;
- Pemasaran produk IKM yang masih terbatas.

CC. Unsur Sekretariat Daerah

Permasalahan sekretariat daerah, antara lain:

- Pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi;
- Reformasi birokrasi belum sepenuhnya dipahami oleh semua pihak;
- Pelayanan publik belum terintegrasi dan menggunakan teknologi informasi.

DD. Unsur Sekretariat Dewan

Permasalahan sekretariat dewan, antara lain:

- Kapasitas SDM perlu ditingkatkan.

EE. Unsur Perencanaan

Permasalahan perencanaan, antara lain:

- Masih belum setaranya pemahaman perencanaan pembangunan antar perangkat daerah.

FF. Unsur Keuangan

Permasalahan keuangan, antara lain:

- Kapasitas fiskal yang masih lemah;
- Penataan aset yang belum optimal.

GG. Unsur

GG. Unsur Kepegawaian

Permasalahan kepegawaian, antara lain:

- Belum idealnya jumlah ASN Kota Sukabumi;
- Penghapusan tenaga honorer.

HH. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pendidikan dan pelatihan, antara lain:

- Belum seluruh pejabat fungsional mengikuti pendidikan pelatihan fungsional;
- Belum seluruh pejabat struktural mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan;
- Masih rendahnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

II. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan penelitian dan pengembangan, antara lain:

- Belum tersedianya SDM peneliti;
- Terbatasnya inovasi yang dihasilkan dan kontinuitas implementasi.

JJ. Unsur Pengawasan

Permasalahan pengawasan, antara lain:

- Beberapa rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti oleh PD secara optimal;
- Evaluasi program yang dilakukan belum mencakup keseluruhan program/kegiatan/subkegiatan sehingga masih memiliki potensi terjadinya inefisiensi dan inefektivitas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan.

KK. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

Permasalahan kewilayahan, antara lain:

- Pelayanan umum di beberapa kecamatan masih belum optimal (nilai pelayanan publik C).

LL. Unsur Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

Permasalahan pemerintahan umum, antara lain:

- Maraknya keberadaan geng motor yang meresahkan masyarakat;

- Konflik

- Konflik sosial (keributan antarwarga, antarkelompok remaja, dan lainnya) masih sering terjadi;
- Masih banyaknya anak di bawah umur yang tergabung dalam ormas dan LSM;
- Kesadaran ormas dan LSM untuk tertib administrasi masih rendah.

4.2 Isu-Isu Strategis

4.2.1 Isu Global

A. Resesi Ekonomi Global

Peringatan dini terhadap potensi resesi ekonomi global tahun 2023 mulai digaungkan berbagai institusi finansial global seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia. Krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara saat ini menjadi indikasi nyata terhadap kemunculan resesi tersebut.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya resesi ekonomi seperti inflasi yang sangat tinggi dan kenaikan suku bunga. Tingginya inflasi di banyak negara saat ini disebabkan oleh minimnya suplai barang untuk mencukupi jumlah permintaan yang meningkat, terlebih di tengah perang Rusia-Ukraina. Disrupsi yang ditimbulkan Perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap kestabilan pasokan energi dan suplai bahan makanan secara global. Akibatnya, perang tersebut memicu lonjakan harga barang dan energi yang semakin menipis serta mendorong inflasi terus naik.

Guna menahan laju inflasi, bank sentral perlu menaikkan tingkat suku bunga sehingga pinjaman dan kemauan belanja dari masyarakat berkurang. Pengurangan tersebut akan mengurangi laju permintaan dari masyarakat sehingga inflasi semakin terkendali. Kenaikan suku bunga di berbagai negara dinilai cukup agresif untuk menahan laju inflasi. Meski dapat menekan inflasi, kenaikan suku bunga di berbagai negara secara signifikan tidak otomatis mencegah terjadinya resesi ekonomi global.

B. Arsitektur Kesehatan Global

Pandemi Covid-19 yang dihadapi oleh semua negara di dunia sangat merugikan, tidak hanya mengancam kesehatan namun juga berimplikasi pada ekonomi dan sosial. Untuk itu, arsitektur kesehatan global sangat diperlukan guna mempersiapkan kemungkinan terjadinya pandemi lainnya ke depan.

Untuk

Untuk membangun ketahanan sistem kesehatan global tersebut diperlukan komitmen yang tentunya juga membutuhkan mobilisasi sumber daya kesehatan dan keuangan yang esensial atau melakukan pencegahan, kesiapsiagaan dan merespon pandemi atau *Prevention, Preparedness and Response* (PPR), selain peningkatan sistem pengawasan kesehatan global. Kemudian melakukan harmonisasi standar protokol kesehatan global. Hal itu dinilai penting untuk mendorong mobilitas masyarakat di seluruh dunia dan kembali menggerakkan ekonomi.

Penguatan arsitektur akan didorong dengan memperluas pusat manufaktur global yang akan mencakup vaksin, terapi, diagnostik ke negara-negara berkembang, serta berbagi pengetahuan mengenai PPR dalam krisis kesehatan.

C. Transformasi Digital

Transformasi digital telah menjadi tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak hanya soal teknologi, melainkan juga memperhatikan unsur sosial seperti *culture* dan masyarakat. Untuk mewujudkan transformasi digital, pelakunya tidak bisa berjalan sendiri. Semua komponen yang ada butuh kolaborasi untuk mewujudkannya. Salah satu bentuk transformasi digital, yakni mendorong berkembangnya ekonomi digital.

Pesatnya perkembangan digitalisasi seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, digitalisasi berperan melakukan percepatan pemulihan dengan konektivitas yang cepat. Di sisi lainnya, digitalisasi juga menciptakan kesenjangan karena adanya masalah literasi dari masyarakat. Transformasi digital, juga tidak sebatas teknologi dan juga *lifestyle*, tetapi juga mengurangi gap dan mempercepat keseimbangan dan juga mendukung pemulihan yang lebih cepat.

D. Ketahanan Pangan dan Energi

Perang Rusia-Ukraina telah menimbulkan krisis pangan dan energi di berbagai belahan dunia. Ini bukan krisis jangka pendek, melainkan krisis yang cukup struktural di level global. Ketidakpastian durasi peperangan yang mengekor pada ketegangan dua negara tersebut, secara global juga mengganggu ketersediaan pangan dan energi dunia.

Rusia dan Ukraina adalah pemain utama dan eksportir kunci komoditas penting dunia. Rusia tercatat sebagai pengeksportir gandum (18%), gas alam (25%), palladium (23%), nikel (22%), pupuk 14(%), batu bara (18%), platinum (14%), minyak mentah (11%) dan aluminium (10%) global. Sementara itu, Ukraina tercatat sebagai negara pengeksportir minyak biji-bijian (40%), jagung (13%), dan elemen pembuatan chip (gas neon 50%) di ranah ekspor global.

Konflik yang terjadi antara Rusia-Ukraina disebut memicu kemacetan logistik, pasokan energi yang lamban, dan kekurangan input pangan. Ketiganya membawa dampak pada kenaikan harga komoditas pangan dan energi global.

E. Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat menjadi tantangan ekonomi dalam jangka menengah panjang, sehingga menjadi perhatian utama banyak negara di dunia. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi tetapi juga mengubah sistem iklim. Risiko tersebut menyebabkan perubahan iklim yang kerap abnormal, diantaranya seperti perubahan panas-dingin suhu secara ekstrim, perubahan pola curah hujan, dan perihal musim yang tidak menentu.

Hal tersebut tentunya mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian dan ekosistem wilayah pesisir.

Dampak dari perubahan iklim global secara langsung memengaruhi ketersediaan pangan dunia dengan berbagai kemungkinan akibat kegagalan panen sektor agroindustri. Problematika mengenai perubahan iklim dunia tersebut sudah menemani masyarakat global sejak dan sebelum masa pandemi Covid-19.

4.2.2 Isu Nasional

A. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Saat ini, negara-negara di seluruh dunia tengah berjuang untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Ada tiga kunci menuju pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pertama, memaksimalkan terbukanya lapangan kerja dalam sektor-sektor potensial seperti

seperti sektor digital melalui pembangunan kapasitas dan keterampilan yang relevan. Kedua, adalah mendorong produktivitas untuk menciptakan nilai tambah pada sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ketiga, menciptakan ekosistem untuk bumi yang layak huni, mendorong lapangan kerja yang berkelanjutan dan transisi energi yang adil dan terjangkau.

Kendati demikian, Indonesia perlu waspada lantaran jumlah penduduk yang jauh lebih besar, terutama periode tahun 2020-2030, dimana Indonesia ingin keluar dari *middle income trap*. Ini menjadi tantangan bagi generasi muda sehingga perlu meningkatkan produktivitasnya, salah satunya dengan terlibat aktif dalam menguatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

B. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Percepatan pembangunan infrastruktur khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN) diharapkan mampu menciptakan “value for money” dari proses penyediaan infrastruktur yang dilakukan. Dampak dari pembangunan infrastruktur diharapkan dapat dirasakan langsung bagi masyarakat seperti dalam kegiatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan akses konektivitas dan mobilitas, peningkatan infrastruktur energi dan pangan, serta pemerataan dan penerapan infrastruktur teknologi dan komunikasi.

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi, peran pembangunan infrastruktur sangat penting sebagai salah satu roda penggerak perekonomian nasional. Selain itu, infrastruktur juga memiliki peran penting dalam mengungkit indeks persepsi dunia (usaha) terhadap penentuan lokasi investasi yang tepat, yang secara kuantitatif dituangkan dalam peringkat indeks kemudahan berusaha (EoDB).

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Di dalam Perpres dinyatakan bahwa Presiden menugaskan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melaksanakan fungsi lain dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

C. Percepatan

C. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menuju Indonesia Maju. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan 26,5 juta atau 9,71 persen. Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024.

Presiden pun telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Di mana Inpres tersebut telah mengamanatkan kepada 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Agar tercapai target yang diharapkan, pemerintah telah berfokus pada kegiatan kunci. Pertama, melalui bantuan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem. Kedua, melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem. Ketiga, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

D. Penanganan Stunting

Percepatan penurunan stunting pada Balita adalah program prioritas Pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14%. Pencegahan stunting menasar berbagai penyebab langsung dan tidak langsung yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta masyarakat.

Dampak stunting pada anak-anak akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Sebagai bangsa yang sedang berpacu untuk melakukan pembangunan nasional yang adil dan merata, tentu membutuhkan dukungan SDM yang handal. Kebutuhan SDM yang handal tersebut tentu akan sulit dipenuhi apabila banyak dari anak-anak penerus bangsa yang mengalami stunting. Oleh karena itu, Pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting pada 2018-2024.

E. Pengurangan

E. Pengurangan Risiko Bencana

Sejak 10 tahun terakhir tren kejadian bencana di Indonesia meningkat, terutama bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, puting beliung dan tanah longsor. Berbagai bencana yang terjadi telah memakan korban jiwa dan kerugian yang cukup besar. Selain faktor alam, kompleksitas dari keragaman demografi di Indonesia juga menjadi faktor tingginya kerentanan terhadap bencana. Tren bencana akan semakin meningkat dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, degradasi lingkungan, kemiskinan dan perubahan iklim global.

Melihat tingginya risiko bencana di Indonesia maka perlu dilakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana untuk mengurangi dampak bencana baik korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Pesatnya laju pembangunan juga berpotensi meningkatkan kerentanan, sehingga perlu menerapkan investasi pengurangan risiko bencana dalam setiap kebijakan pembangunan. Pengurangan risiko bencana merupakan tindakan yang dilakukan pada saat pra bencana dimana tidak ada ancaman bencana. Tindakan pengurangan risiko bencana harus dilihat sebagai bentuk investasi karena memiliki *multiplier effect* dalam berbagai sektor pembangunan. Mengurangi risiko bencana merupakan investasi dengan biaya yang efektif dalam mencegah kehilangan di masa depan.

F. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam menyongsong peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045 nanti, Pemerintah telah berkomitmen untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan ekonomi menengah hingga tinggi. Transformasi dan pembangunan SDM menjadi faktor kunci untuk dapat mewujudkan hal tersebut.

Hingga saat ini kualitas SDM di Indonesia masih tergolong rendah. Data BPS menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 39,10 persen. Tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SMP sebesar 18,23 persen, SMA 18,23 persen dan SMK sebesar 11,95 persen. Sementara tenaga kerja dengan pendidikan akhir diploma I/II/III dan universitas hanya sebesar 12,60 persen (BPS, 2022).

Salah

Salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas SDM adalah pendidikan dan pelatihan yang bisa beradaptasi dengan perubahan sosial masyarakat. Inovasi dan kreativitas menjadi kunci utama peningkatan kualitas SDM di era globalisasi. Dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi saat ini membuktikan bahwa kreativitas dan inovasi memberikan pilihan, peluang dan dampak yang sangat besar pada peningkatan SDM. Permasalahan utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah adanya ketidaksesuaian pendidikan dan dunia usaha.

G. Ketahanan Pangan dan Energi

Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan bagian penting pembangunan nasional Indonesia. Hal ini mengindikasikan akan pentingnya keberlanjutan dalam pencapaian ketahanan pangan dan energi. Dalam lima tahun terakhir, pemerintahan Presiden Jokowi berikhtiar memperkuat ketahanan pangan Indonesia, baik di bidang pertanian maupun bidang kelautan dan perikanan, dengan berfokus pada tiga hal : ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

Adapun ketahanan energi dimaknai ketersediaan (*availability*) dengan indikator sumber pasokan, kemampuan untuk membeli (*affordability*), dan adanya akses (*accessibility*) bagi pengguna energi, serta bertahan untuk jangka panjang (*sustainability*). Dalam hal ini, sumber energi tak terbarukan masih mendominasi penggunaan energi di Indonesia. Per Mei 2019 kontribusi energi baru dan terbarukan mencapai 13,42% total konsumsi dari target sebesar 23% total konsumsi energi pada tahun 2025. Kapasitas cadangan nasional energi tak terbarukan semakin menipis. Cadangan minyak bumi nasional diperkirakan akan bertahan hanya hingga tahun 2027, dengan pertumbuhan ketergantungan impor yang semakin tinggi. Sedangkan cadangan gas alam dan batu bara diperkirakan akan bertahan sekitar 20 tahun lagi dengan kondisi laju produksi yang tinggi seperti saat ini, pertumbuhan permintaan energi domestik sebesar 7% per tahun, dan tanpa adanya eksplorasi dan temuan cadangan baru.

H. Reformasi Birokrasi

Pemerintah terus melakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan birokrasi yang dinamis dan berkelas dunia. Reformasi birokrasi juga diharapkan menghasilkan pelayanan publik prima yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Layanan prima harus jadi target utama setiap unit penyelenggara pelayanan melalui langkah kolaboratif, inovatif, dan sinergi antara instansi dalam mewujudkan visi Presiden.

Sejalan

Sejalan dengan Visi Presiden Jokowi dalam kabinet Indonesia Maju, reformasi birokrasi dipacu untuk memberikan kecepatan dalam melayani dan kemudahan perizinan. Hal ini ditempuh dengan pelaksanaan reformasi pelayanan publik berbasis digital. Diharapkan masyarakat dapat memperoleh kepastian dan transparansi pada setiap layanan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik dapat menjadi kunci esensial dari reformasi birokrasi. Saat ini, pelayanan tidak hanya dituntut dalam segi kecepatan saja, namun masyarakat juga menginginkan kemudahan dan kepraktisan.

I. Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Pemilu 2024 akan menjadi salah satu tahapan penting mewujudkan Visi Indonesia 2045. Pemilu 2024 diharapkan dapat menata ulang kelembagaan bernegara dan berbangsa. Peluang penataan ulang tersebut datang bersama dengan kehadiran pemimpin baru hasil pemilu serentak 2024 yang memilih presiden, kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat pusat dan daerah, serta anggota dewan perwakilan daerah.

Pelaksanaan Pemilu 2024 masih dihadapkan beberapa potensi permasalahan di antaranya terkait distribusi logistik Pemilu, data pemilih, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi, data hasil penghitungan suara, hingga terjadinya gugatan akhir Pilpres. Selain itu juga ada kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.

Selain itu, dinamika politik yang mulai memanas perlu diimbangi dengan etika politik. Tanpa etika yang baik dapat berdampak buruk, seperti terjadi pertikaian dan pertentangan antar kelompok pendukung dengan tindakan anarkis, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kondisi demikian tentunya tidak sehat untuk kehidupan berdemokrasi, sehingga diperlukan adanya etika politik yang santun yang dicontohkan dengan baik oleh para elit politik.

4.2.3 Isu Regional

A. Ketimpangan Jawa Barat Bagian Utara dan Selatan

Penduduk Jawa Barat mayoritas berada di wilayah Jawa Barat tengah ke utara dengan karakteristik industrial dan modern. Sisanya berada di wilayah tengah ke selatan dengan bentuk geografis yang curam karena banyak pegunungan. Distribusi penduduk yang timpang tersebut juga dikarenakan berbagai hal seperti ketersediaan infrastruktur yang masih timpang.

Pembangunan infrastruktur yang merata diperlukan antara utara dan selatan Jawa Barat. Hal ini diperlukan agar terjadi pemerataan investasi antara Jabar bagian utara dan selatan dalam rangka mendorong ketahanan dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Pembangunan kawasan selatan Jawa Barat harus dipercepat lagi. Kawasan itu memiliki potensi pariwisata dan agribisnis. Namun untuk pengembangan Jawa Barat selatan perlu dukungan infrastruktur, seperti pusat distribusi dan pelabuhan. Kemudian pembangunan jaringan telekomunikasi untuk pengembangan pariwisata.

B. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang diproyeksikan akan mengalami bonus demografi dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 2030. Bonus demografi merupakan keadaan kependudukan suatu negara dengan komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Keadaan ini dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi Jawa Barat.

Jika dilihat dari perkembangan IPM Jawa Barat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terlihat bahwa capaiannya selalu meningkat. Di mana IPM Jawa Barat tahun 2019 sebesar 72,03 menjadi 72,45 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia Jawa Barat menunjukkan peningkatan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Jawa Barat. Seperti belum meratanya sebaran tenaga pengajar berkualitas, juga terkait *link and match* lulusan SMA/SMK dengan kebutuhan tenaga kerja, lalu rendahnya kualitas dan pemerataan serta keterjangkauan kesehatan, dan terakhir terkait terbatasnya tenaga kesehatan serta distribusi yang tidak merata.

C. Kemiskinan Ekstrem dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pandemi Covid-19 yang berlangsung mulai Maret 2020 menyebabkan kenaikan kemiskinan di Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 4 juta orang pada September 2021. Jumlah ini turun 4,7% dibandingkan Maret 2021 yang sebanyak 4,2 juta orang. Persentase penduduk miskin Jawa Barat yang tinggal di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Periode September 2021, persentase penduduk miskin di perdesaan tercatat sebesar 9,76%, sementara di perkotaan sebesar 7,48%.

Sementara

Sementara itu, kemiskinan ekstrem di Jawa Barat cenderung meningkat meskipun kinerja ekonomi makin membaik. Pada Maret 2020, tercatat 2,71 persen atau 1,35 juta jiwa penduduk berada dalam kategori miskin ekstrem. Sedangkan pada Maret 2021, angka tersebut naik menjadi 3,57 persen atau 1,79 juta jiwa.

Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat termasuk tertinggi di Indonesia. Di mana pada Agustus 2021, TPT Jawa Barat mencapai 9,82 persen, turun 0,64 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Dari total TPT 9,82 persen tersebut, sekitar 75,95 persen TPT Jawa Barat merupakan penduduk berusia di bawah 30 tahun, dengan rincian usia 15–19 tahun sebanyak 38,80 persen, usia 20–24 tahun sebanyak 23,77 persen, dan kelompok usia 25–29 tahun sebesar 13,38 persen.

D. Daya Saing Ekonomi

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Salah satu elemen penting dalam mendorong perbaikan ekonomi dan mendukung pencapaian ketahanan ekonomi Jawa Barat adalah investasi. Jawa Barat menjadi destinasi investasi utama secara nasional, baik investasi yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun domestik (PMDN). Keunggulan investasi di Jawa Barat adalah efisiensi investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, bahkan bersaing dengan berbagai negara di Asia Tenggara.

Di era pasca pandemi ini, Jawa Barat memiliki tujuh ekonomi baru yang bisa dijadikan sasaran investasi. Di antaranya, destinasi investasi Asean, kedaulatan pangan, investasi bidang kesehatan, manufaktur 4.0, digital, *green economy* dan pariwisata lokal.

E. Reformasi Birokrasi

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Provinsi Jawa Barat untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 2018 – 2021 telah melebihi target di angka 78,68. Kabupaten/kota di Jawa Barat yang masih berada di atas 60 sebanyak 16 kabupaten/kota dan 11 kabupaten/kota dengan Indeks RB di bawah 60.

Terdapat tiga hal yang perlu dijaga dan ditingkatkan dalam rangka menjalankan reformasi birokrasi, yaitu ASN harus profesional, kualitas pengadaan barang dan jasa dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Karena itu, ada dua strategi yang dapat diselesaikan. Yang pertama adalah strategi penguatan sistem evaluasi kita, khususnya untuk perangkat daerah termasuk perangkat daerah di kabupaten/kota. Kemudian satu lagi adalah penguatan zona integritas.

4.3 Isu Strategis Aktual

Berdasarkan potensi, permasalahan pembangunan, dan isu strategis sesuai konteksnya, maka isu strategis aktual Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa

Kontribusi per sektor lapangan usaha terhadap PDRB Kota Sukabumi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir didominasi oleh perdagangan, jasa keuangan, dan transportasi. Ketiganya berkontribusi masing-masing lebih dari 10 persen terhadap PDRB Kota Sukabumi. Bahkan untuk sektor perdagangan kontribusinya mencapai angka di atas 37 persen. Kontribusi ketiga sektor tersebut perlu ditingkatkan untuk menguatkan Kota Sukabumi sebagai pusat kegiatan wilayah.

Di Kota Sukabumi masih terdapat sektor potensial yang perlu dioptimalkan yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif serta pertanian perkotaan. Sebagai kota yang besar di masa kolonial, berbagai peninggalan yang ada di Kota Sukabumi perlu dilestarikan untuk menunjang atau sebagai destinasi obyek wisata. Demikian juga dengan ekonomi kreatif yang selama ini telah dikembangkan. Upaya untuk mengkapitalisasi kedua sektor tersebut perlu untuk lebih digencarkan.

Pertanian perkotaan merupakan sektor lain yang perlu dioptimalkan juga. Mengingat karakter Sukabumi yang sudah berupa kota namun luas lahan pertaniannya masih luas. Namun tekanan alih fungsi lahan tidak bisa dihindari. Karena itu, pertanian perkotaan merupakan alternatif pengembangan yang perlu dioptimalkan guna meningkatkan kontribusi bagi PDRB dan tentunya untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar.

2. Dampak proyek strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya

Pembangunan proyek strategis nasional yang berada di Kota Sukabumi dan sekitarnya terutama infrastruktur jalan tol dan kereta api akan meningkatkan aksesibilitas. Dengan demikian lalu lintas orang dan barang tentunya juga akan semakin meningkat. Peluang ini perlu dioptimalkan mengingat Sukabumi dikenal juga sebagai kota transit sehingga daya tarik kota perlu dikembangkan dan direvitalisasi untuk semakin memanjakan pendatang yang transit ataupun melakukan aktivitas di Kota Sukabumi.

Mega proyek yang didanai baik dari Provinsi Jawa Barat maupun dari Kota Sukabumi sendiri juga menjadi pengungkit bagi perkembangan kota. Karena itu, perlu tetap dilakukan pembangunan mega proyek terutama yang dapat menjadi pengungkit perekonomian kota.

3. Permukiman

3. Permukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan

Permasalahan perkotaan tidak akan pernah lepas dengan permukiman termasuk kawasan kumuh. Sehingga permukiman kumuh jika tidak diintervensi dengan cepat oleh semua pihak akan menyebabkan runtutan permasalahan lainnya. Walaupun penanganan permukiman kumuh di Kota Sukabumi cukup signifikan mengurangi luas permukiman kumuh dari sekitar 139 Ha hingga sekarang tinggal 5 Ha, namun upaya preventif harus tetap dilakukan.

Penanganan permukiman kumuh tentunya perlu dibarengi dengan penanganan lingkungan hidup secara keseluruhan. Hal ini mengingat degradasi lingkungan seperti penurunan kualitas air, udara, dan tutupan lahan cenderung terjadi tiap tahun. Jika hal ini tidak segera ditangani maka potensi kerusakan lingkungan yang semakin parah tidak dapat dihindarkan.

Kondisi lingkungan yang semakin menurun diperparah dengan risiko bencana yang mengancam Kota Sukabumi. Walaupun Indeks Risiko Bencana Kota Sukabumi masuk kategori menengah namun risiko bencana seperti gempa bumi, longsor, dan banjir cukup tinggi. Sehingga upaya untuk memitigasi bencana harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Sukabumi.

4. Kualitas sumber daya manusia (SDM)

SDM Kota Sukabumi jika dilihat dari indikator IPM sudah lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Namun demikian, tetap diperlukan upaya untuk meningkatkan IPM Kota Sukabumi terutama dari komponen harapan lama sekolah. Mengingat komponen ini yang paling rendah kenaikannya.

Walaupun memiliki IPM yang lebih baik dari Provinsi Jawa Barat dan Nasional namun TPT dan Indeks Gini Kota Sukabumi masih lebih baik dari keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan seperti tingkat produktivitas tenaga kerja yang belum optimal dan merata, terbatasnya lapangan pekerjaan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang masih belum menjangkau semua kalangan, dan lainnya. Karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Kota Sukabumi akan terus dilakukan mengingat dinamika yang terjadi saat ini dan ke depannya akan diperlukan SDM yang tidak hanya cerdas dan terampil tetapi juga adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

5. Inovasi

5. Inovasi di pemerintahan

Pemerintah Kota Sukabumi telah dianugerahi penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu kota terinovatif. Untuk meraih itu, berbagai inovasi yang dihasilkan harus sesuai dengan standar IGA.

Terdapat sejumlah inovasi telah digulirkan Pemerintah Kota Sukabumi di berbagai bidang. Misalnya pada layanan kesehatan ada *homecare*, ambulans sigap, dan puskesmas klinik sore. Di bidang ekonomi, ada program Sukabumi Kelurahan *Entrepreneurship Center* (KECE) untuk membentuk wirausaha baru di kelurahan dan *Sukabumi Creative Hub* (SCH). Program inovasi lainnya di bidang literasi, rumah singgah di Bandung, pembinaan keagamaan, dan lain sebagainya.

Inovasi di Kota Sukabumi harus terus dilahirkan untuk mengatasi berbagai keterbatasan dan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, inovasi itu sendiri harus berkolaborasi bukan hanya dengan perangkat daerah tapi dengan pihak lainnya baik pihak swasta dan organisasi profesi. Sehingga pada akhirnya, inovasi diharapkan menjadi budaya dalam menjalankan roda pemerintahan.

6. Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024

Tahun 2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia, tak terkecuali di Kota Sukabumi. Pada tahun tersebut, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar serentak. Pemilu dan pilkada serentak 2024 akan menjadi kerja besar dan kerja keras semua pihak. Bagi penyelenggara mau tak mau harus menanggung beban kerja yang jauh lebih berat dibanding pemilu dan pilkada sebelumnya. Tak hanya bagi penyelenggara, pemilu dan pilkada serentak 2024 juga akan menjadi kerja berat bagi partai politik.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Kesbangpol diharapkan selalu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik agar dapat mengawal suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada tersebut. Perkembangan situasi politik, dinamika sosial politik, kesiapan partai politik, pelaksanaan pendidikan politik perlu dipantau secara berkala. Tak lupa upaya deteksi dan pencegahan dini guna meminimalisir terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan jelang pemilu dan pilkada 2024 perlu dioptimalkan.

Tabel 4.1

Tabel 4.1 Pemetaan Keterkaitan Isu Strategis Aktual dengan Isu Strategis sesuai Konteks dan Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
<ul style="list-style-type: none"> • Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum dioptimalkan • Ketersediaan pasar rakyat dan sarana distribusi belum optimal • Belum berkembangnya sistem terpadu monitoring serta koordinasi ketersediaan dan harga bahan pokok • Belum optimalnya pembinaan PKL • Tingginya alih fungsi lahan termasuk LP2B • Minat masyarakat untuk bertani makin berkurang • Distribusi bibit tanaman hortikultura belum optimal • <i>Urban farming</i> belum menjadi gerakan masif dalam mendukung ketahanan pangan • Belum optimalnya standarisasi budidaya perikanan • Fasilitasi pelaku olahan hasil perikanan belum optimal • Belum optimalnya manajemen koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Resesi ekonomi global • Ketahanan pangan dan energi • Transformasi digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan ekonomi pasca Covid-19 • Ketahanan pangan dan energi 	<p>Daya saing ekonomi</p>	<p>Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa</p>

• Belum

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pola kemitraan antara koperasi dan UMK dengan pengusaha besar • Kurangnya promosi produk usaha mikro • Belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi usaha mikro • Belum tersedianya database koperasi dan usaha mikro • Investasi sektor industri belum menarik minat investor • Potensi investasi belum digali secara optimal • Rendahnya IKM produktif • Pemanfaatan teknologi bagi industri kecil masih rendah • Pemasaran produk IKM yang masih terbatas 				
<ul style="list-style-type: none"> • Luas wilayah relatif kecil • Belum optimalnya Kota Sukabumi sebagai PKW • Adanya disparitas pembangunan infrastruktur • Belum optimalnya pengelolaan air bersih • Belum optimalnya pengelolaan air limbah • Belum disusunnya RDTR • Fasilitas RTH publik yang belum optimal 		<p>Percepatan pembangunan infrastruktur</p>	<p>Ketimpangan Jabar Selatan-Utara</p>	<p>Dampak PSN dan megaprojek lainnya</p>

• Masih

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya RTLH • Permukiman kumuh belum sepenuhnya tertangani • Degradasi lingkungan • Alih fungsi lahan yang terus berlangsung • Belum optimalnya pengelolaan persampahan • Kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup masih kurang • Risiko bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir cukup besar • Belum adanya peralatan untuk mendeteksi bencana 	Perubahan iklim	Pengurangan risiko bencana		Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesenjangan terkait distribusi kekayaan, produktivitas tenaga kerja, akses ekonomi, dan ketahanan dalam menghadapi guncangan • Akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat miskin perlu ditingkatkan • Komponen daya beli masyarakat sebagai pembentuk IPM perlu ditingkatkan 	Arsitektur kesehatan global	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas SDM • Kemiskinan ekstrem • Penanganan stunting 	<ul style="list-style-type: none"> • Daya saing SDM • Kemiskinan ekstrem dan TPT 	Kualitas SDM

- Lapangan

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga terbatas • Angka putus sekolah perlu ditekan • Angka melanjutkan sekolah antarjenjang pendidikan perlu ditingkatkan • Asupan gizi masyarakat perlu ditingkatkan • Angka kesakitan masyarakat perlu ditekan • Terdapat 4 kelurahan yang memiliki angka prevalensi <i>stunting</i> tinggi 				
<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan umum di beberapa kecamatan masih belum optimal • Rekomendasi oleh APIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti PD • Evaluasi program oleh APIP belum sepenuhnya dilakukan • Belum idealnya jumlah ASN • Penghapusan tenaga honorer • Belum tersedianya data center 		Reformasi Birokrasi	Reformasi birokrasi	Inovasi di pemerintahan

- Terbatasnya

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan teknologi informasi • Belum optimalnya pengamanan informasi • Belum semua arsip didigitalisasi • Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan kebutuhan data statistik sektoral • Partisipasi dan distribusi data dari pengguna/PD terhadap kebutuhan pengguna data yang berkualitas sangat rendah 				
<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan masih belum optimal • Konflik sosial masih sering terjadi • Ormas dan LSM masih banyak yang belum tertib administrasi • Masih terdapat anak di bawah umur yang tergabung dalam Ormas dan LSM 		Pemilu dan pilkada serentak 2024		Pemilu dan pilkada serentak 2024

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

Dari

Dari tabel di atas, terlihat bahwa terdapat isu strategis aktual Kota Sukabumi yang beririsan dengan isu strategis Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Persamaan isu strategis tersebut tentunya konteksnya sama tetapi substansi berbeda. Karena itu, upaya untuk menangani isu strategis aktual Kota Sukabumi akan dilakukan sesuai dengan karakteristik Kota dan tentu saja sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud untuk mengetahui kinerja utama dalam kurun waktu 2024-2026.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antarperiode, maka Pemerintah Kota Sukabumi dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan mempertimbangkan:

1. Visi dan misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025;
2. Analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terakhir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025; dan
3. Isu strategis aktual Kota Sukabumi.

Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa. Adapun misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah; dan
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah.

Berdasarkan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terkahir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, capaian pembangunan pada tahap ini ditandai dengan:

1. SDM yang semakin berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan;
3. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya IKM berkelanjutan dan perdagangan yang berdaya saing;
5. Meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan; dan
6. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana.

Berdasarkan irisan visi misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, dan isu strategis aktual, maka tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.1
Sandingan Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD, Isu Strategis Aktual serta Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD
1	Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya	SDM yang semakin berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia	Kualitas sumber daya manusia (SDM)	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat ● Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ● Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
2	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan			
3	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat			

4. Mewujudkan

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD
4	Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi	Meningkatnya IKM berkelanjutan dan perdagangan yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> ● Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa ● Dampak proyek strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya 	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah	Meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ● Inovasi di pemerintahan ● Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	<ul style="list-style-type: none"> ● Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis ● Meningkatkan inovasi daerah
6	Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah	Terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana	Permukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ● Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas ● Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana

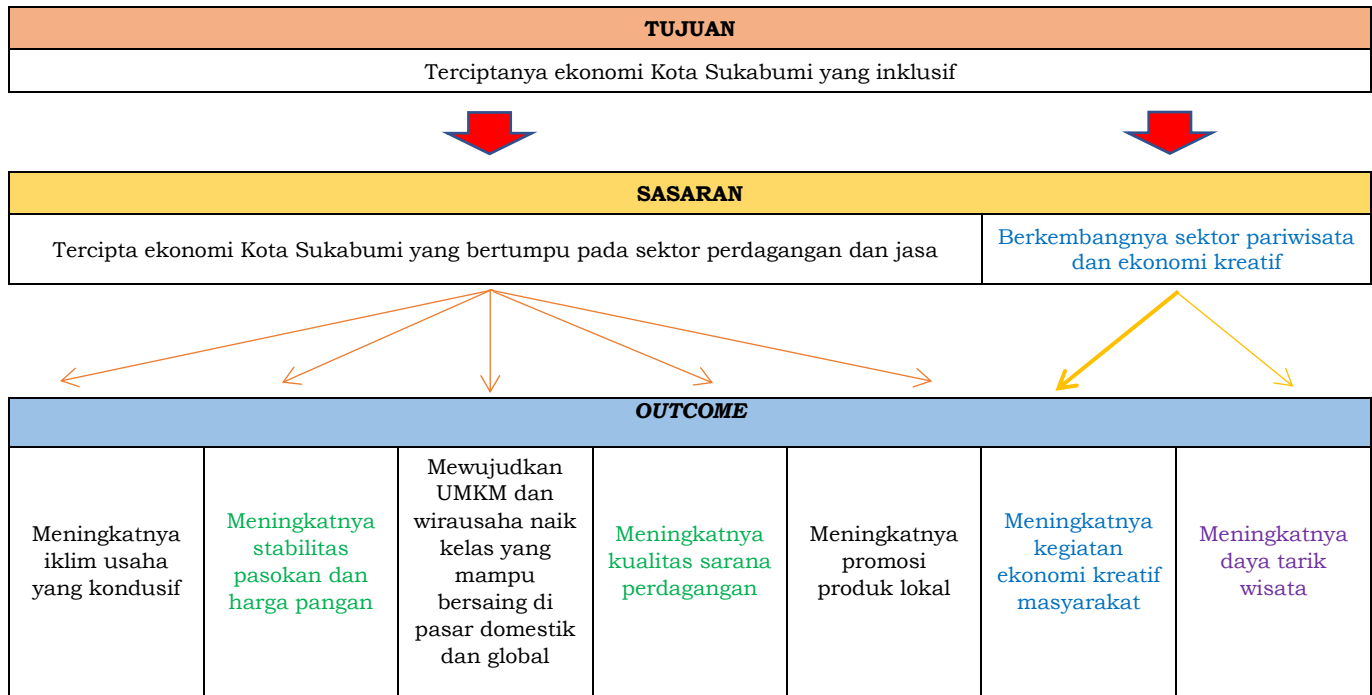
Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

Lebih jelas lagi mengenai tujuan, sasaran dan *outcome* RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dapat dilihat secara rinci pada gambar dan tabel di bawah ini.

Gambar 5.1

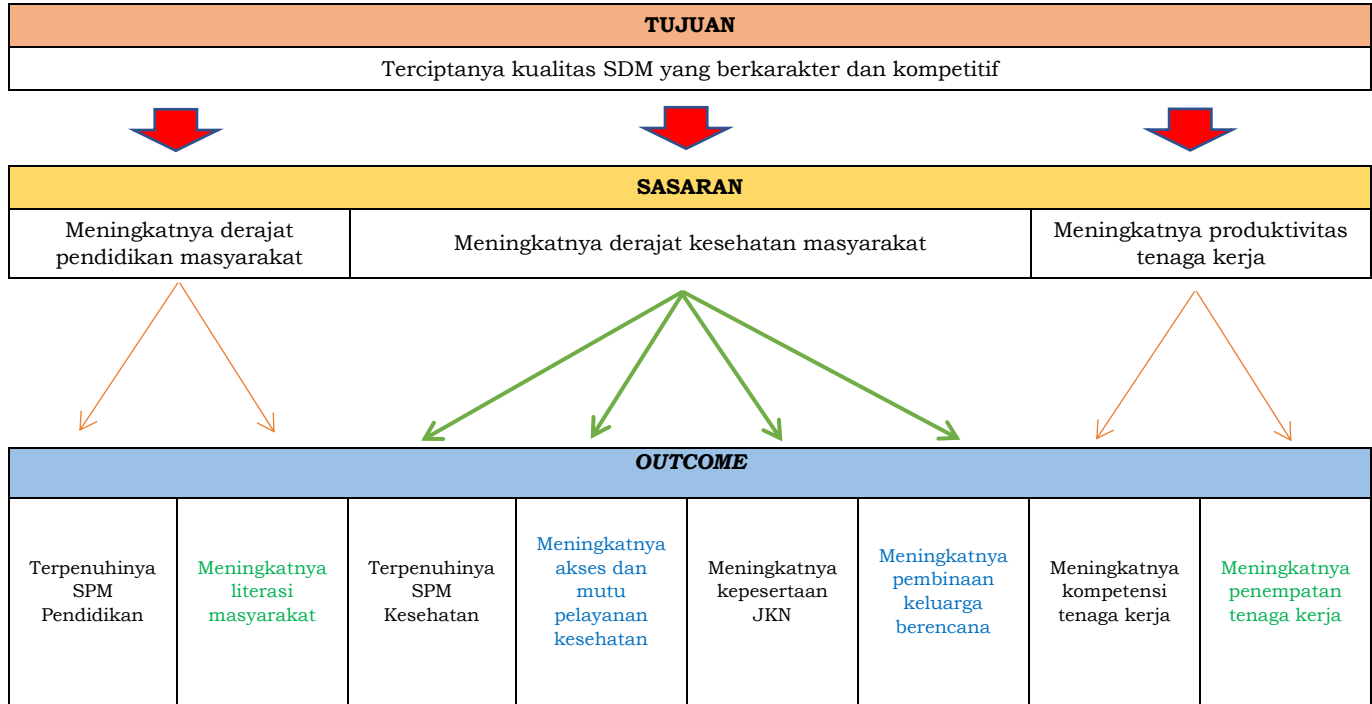
Gambar 5.1 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

1. Tujuan 1



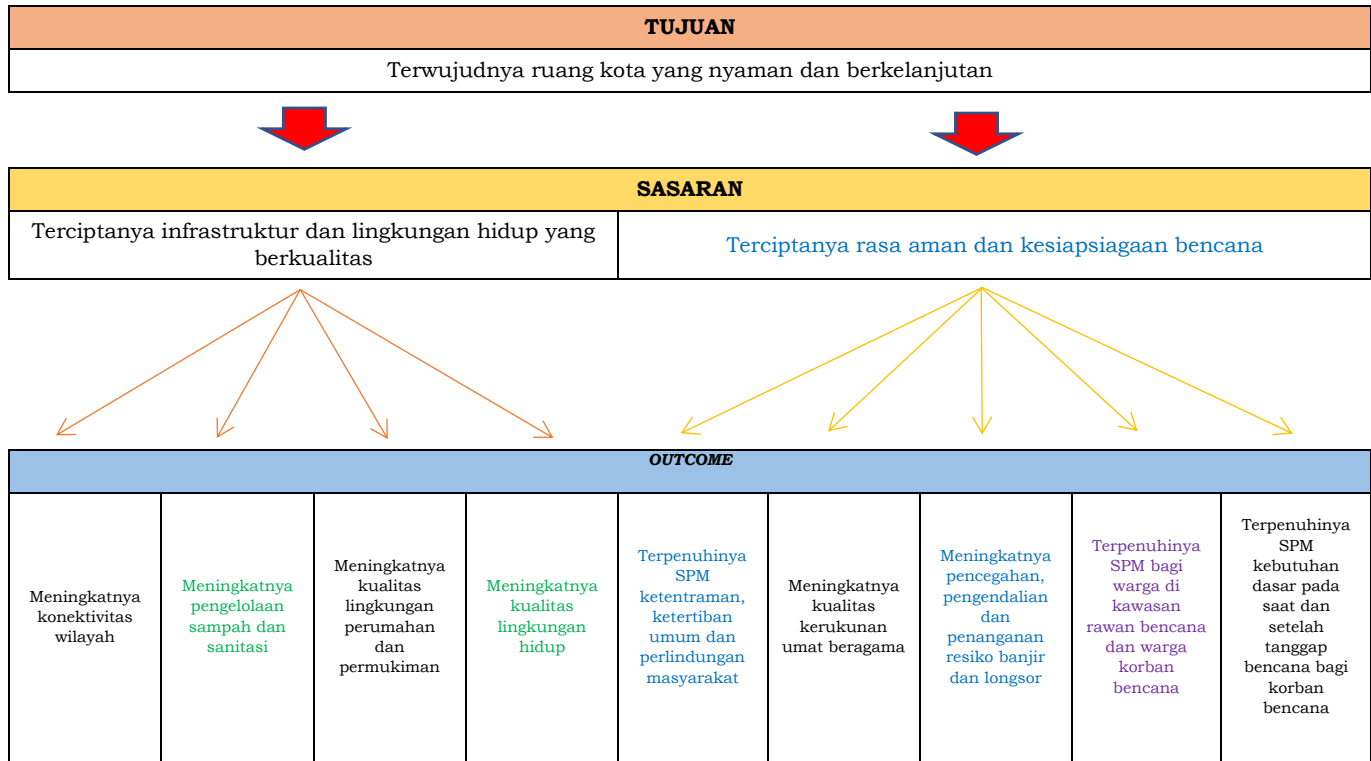
2. Tujuan 2

2. Tujuan 2



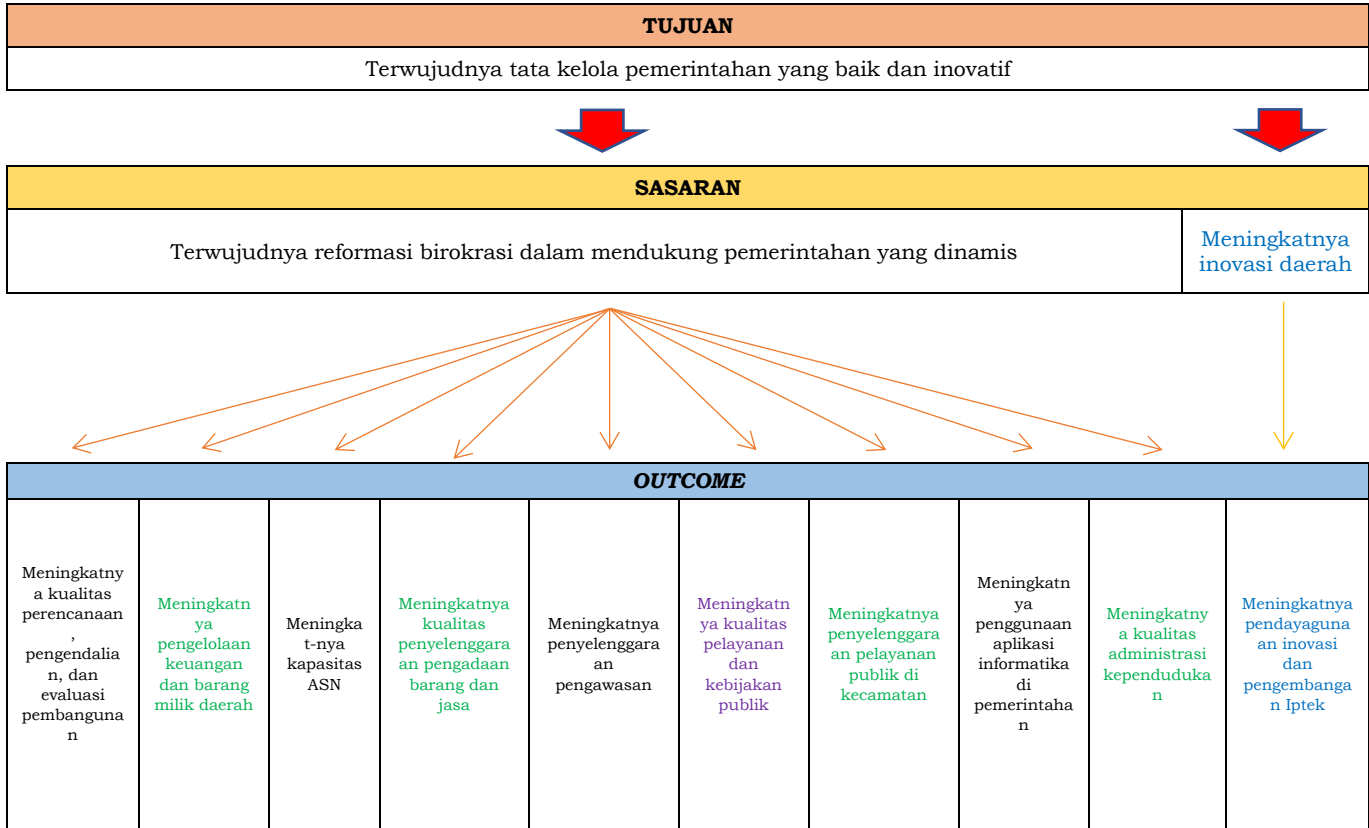
3. Tujuan 3

3. Tujuan 3



4. Tujuan 4

4. Tujuan 4



Lebih

Lebih jelas mengenai tujuan, sasaran, *outcome* dan indikator kinerja untuk mengukurnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, *Outcome* dan Indikator Kinerja RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR
Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif			Laju Pertumbuhan Ekonomi
	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB
		Meningkatnya iklim usaha yang kondusif	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan
		Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
			Persentase ketersediaan pangan pokok
		Mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu bersaing dipasar domestik dan global	Persentase usaha mikro yang naik kelas
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan
		Meningkatnya promosi produk lokal	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan

Berkembangnya

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR
	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif		Indeks Kota Kreatif
		Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat	Nilai tambah ekonomi kreatif
		Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan
			Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata
Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia
			Indeks Pendidikan
		Terpenuhinya SPM Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya literasi masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
			Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
		Terpenuhinya SPM Kesehatan	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan
		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Prevalensi stunting pada balita
			Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna

Meningkatnya

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR
		Meningkatnya kepesertaan JKN	Persentase kepesertaan JKN
		Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Persentase keluarga yang mengikuti program KB
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan			Indeks Kota Layak Huni
	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
		Meningkatnya konektivitas wilayah	Tingkat kemantapan jalan kota
			Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU
		Meningkatnya pengelolaan sampah dan sanitasi	Cakupan pengelolaan sampah
			Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Persentas berkurangnya jumlah RTLH

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	
			Luasan pengurangan kawasan kumuh	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kenyamanan	
			Indeks RTH	
	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana			Indeks Rasa Aman
		Terpenuhinya SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal transibmas
		Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama		Persentase Konflik Antar Inter Umat Beragama yang terselesaikan
		Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan penanganan resiko banjir dan longsor		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir WS kewenangan kota
		Terpenuhinya SPM bagi warga di kawasan rawan bencana dan warga korban bencana		Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana
		Terpenuhinya SPM kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap bencana bagi korban bencana		Persentase pemenuhan SPM kebutuhan dasar bagi korban bencana

Terwujudnya

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi
			Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar
			Persentase pencapaian IKU
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota
		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan
		Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Persentase penyelenggaraan pengadaan yang dilakukan secara online
		Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti

Meningkatnya ...

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan kebijakan publik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
			Persentase koordinasi dan fasilitasi produk hukum daerah
			Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
		Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan pelayanan publik di kecamatan
		Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Persentase pengelolaan aplikasi informatika yang digunakan dalam pemerintahan
		Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan
	Meningkatnya inovasi daerah		Indeks Inovasi Daerah
		Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

Untuk mengetahui ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, maka digunakan indikator-indikator sebagai tolak ukur capaiannya. Indikator-indikator tersebut kemudian ditetapkan target capaiannya untuk setiap tahunnya. Adapun target capaian indikator tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2

Tabel 5.2 Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Tujuan: Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,35	5,37	5,39	5,41
Sasaran: Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	3,80	4,00	4,20	4,40
Outcome:						
Meningkatnya iklim usaha yang kondusif	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	69,3	80	82	85
Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	4,88	5,88	6,38	6,88
	Persentase ketersediaan pangan pokok	Persen	100	100	100	100
Mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu bersaing dipasar domestik dan global	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	0,01	0,01	0,02	0,03

Meningkatnya

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	Persen	20	40	60	80
Meningkatnya promosi produk lokal	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100
Sasaran: Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif	Poin	29,43	30,93	32,43	33,95
Outcome:						
Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat	Nilai tambah ekonomi kreatif	Persen	14	16	19	22
Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	21,78	21,80	21,90	22
	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	4	4	6	7
Tujuan: Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,40	75,55	75,75	75,80
Sasaran: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	71,55	71,58	71,68	71,77
Outcome:						

Terpenuhinya ...

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Terpenuhinya SPM Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Persen	88.93	100	100	100
Meningkatnya literasi masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	65.34	70.5	71	72
Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi	Poin	0,31	0,33	0,35	0,37
Outcome						
Terpenuhinya SPM Kesehatan	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan	Persen	88.93	100	100	100
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Prevalensi stunting pada balita	Persen	6,28	6	5,75	5,5
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Persen	100	100	100	100
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	13,64	15,88	18,16	20,44
Meningkatnya kepesertaan JKN	Persentase kepesertaan JKN	Persen	98,43	98,5	98,6	98,7

Meningkatnya

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	Persen	64,24	65	65,5	66
Sasaran: Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Pekerja	30,899	34,001	35,769	37,736
Outcome:						
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	80	81	82	83
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	80	85	87,5	90
Tujuan: Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan						
	Indeks Kota Layak Huni	Poin	64,50	65,00	65,25	65,50
Sasaran: Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas						
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	85,20	86,00	86,20	86,50
Outcome:						
Meningkatnya konektivitas wilayah	Tingkat kemandapan jalan kota	Persen	84,54%	85	86	87

Persentase

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Persen	82,85	83,54	83,87	84,2
Meningkatnya pengelolaan sampah dan sanitasi	Cakupan pengelolaan sampah	Persen	99,55	100	100	100
	Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	57,87%	58,30	58,73	59,16
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Persentas berkurangnya jumlah RTLH	Persen	100,00%	69.44	38.88	0.69
	Luasan pengurangan kawasan kumuh	Ha	19,79	15	20	15
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kenyamanan	Predikat	Nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman
	Indeks RTH	m2/orang	25	25,5	26	26,5
Sasaran: Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman	Persen	75,31	75,40	75,55	75,60
Outcome:						
Terpenuhinya SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal transtibmas	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama	Persentase Konflik Antar Inter Umat	Poin	100	100	100	100

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
	Beragama yang terselesaikan					
Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan penanganan resiko banjir dan longsor	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir WS kewenangan kota	Persen	57,32%	62,18	67,03	71, 89
Terpenuhinya SPM bagi warga di kawasan rawan bencana dan warga korban bencana	Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	Persen	53	55	56	57
Terpenuhinya SPM kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap bencana bagi korban bencana	Persentase pemenuhan SPM kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persen	100	100	100	100
Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi	Poin	71,05	73,00	74,00	75,00
Sasaran: Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	71,05	73,00	74,00	75,00
Outcome:						

Meningkatnya

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar	Persen	100	100	100	100
	Persentase pencapaian IKU	Persen	100	100	100	100
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Persen	96,67	97,33	97,66	98
Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Persen	7,68	7,9	8,0	8,5
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Persentase penyelenggaraan pengadaan yang dilakukan secara online	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	Persen	45	76	77	78

Persentase

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti	Persen	45	80	81	82
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kebijakan publik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100
	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk hukum daerah	Persen	100	100	100	100
	Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Persentase pengelolaan aplikasi informatika yang digunakan dalam pemerintahan	Persen	90	93	95	97
Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan	Persen	100	100	100	100

Sasaran

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Sasaran:						
Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
Outcome:						
Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Persentase instansi/lembaga yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

Penentuan target tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 terutama yang menggunakan indikator makro telah diselaraskan dengan target indikator makro dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Penyelarasan target indikator makro tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.3 Penyelarasan Target Indikator Makro Kota Sukabumi dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

INDIKATOR	RPJMN	RPD JAWA BARAT			RPD KOTA SUKABUMI		
	2024	2024	2025	2026	2024	2025	2026
LPE (%)	6,20	5,42	5,48	5,54	5,37	5,39	5,41
Kemiskinan (%)	8,15	7,68	7,49	7,30	8,00	7,96	7,94
TPT (%)	3,10	8,01	7,88	7,76	8,41	8,25	8,00
IPM (Poin)	74,60- 84,23	73,56	73,78	74,00	75,55	75,75	75,80
Rasio Gini (Poin)	0,360- 0,474	0,408	0,406	0,404	0,475	0,470	0,460

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

BAB VI **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN** **DAN PROGRAM PRIORITAS**

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah Kota Sukabumi agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 terdiri dari 15 (lima belas) strategi dan 36 (tiga puluh enam) kebijakan. Di mana untuk mencapai tujuan:

1. Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif, dilakukan melalui 4 strategi dan 9 kebijakan
2. Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif, dilakukan melalui 3 strategi dan 6 kebijakan
3. Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan, dilakukan melalui 5 strategi dan 13 kebijakan
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif, dilakukan melalui 3 strategi dan 8 kebijakan

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan pelayanan penanaman modal
			Meningkatkan kualitas sarana perdagangan
			Meningkatkan penggunaan dan promosi produk lokal
			Memberdayakan pelaku UMKM

Meningkatnya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat
	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai penopang perekonomian	Meningkatkan obyek daya tarik wisata Meningkatkan pemasaran wisata
		Mengkapitalisasi potensi ekonomi kreatif sebagai penopang perekonomian	Memanfaatkan dan melindungi HKI
Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan pendidikan Meningkatkan literasi masyarakat
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu kesehatan masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat Meningkatkan pembinaan keluarga berencana (KB)

Meningkatnya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja	
			Meningkatkan penempatan tenaga kerja	
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas jalan kota	
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	
			Meningkatkan pengelolaan persampahan	
			Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah	
		Meningkatkan pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman	Mengurangi RTLH	
		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Mengurangi luas kawasan kumuh	
			Meningkatkan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	
			Meningkatkan pengelolaan keragaman hayati	
	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan situasi kota yang kondusif		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
				Meningkatkan kerukunan umat beragama

Meningkatkan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan kapasitas penanggulangan dan penanganan bencana	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan risiko bencana Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana Meningkatkan kapasitas penanganan bencana
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi Meningkatkan transparansi pemerintahan Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing
	Meningkatnya inovasi daerah	Penguatan ekosistem inovasi	Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan litbang serta inovasi Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam inovasi Meningkatkan jejaring litbang dan inovasi
		Meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	Implementasi pemanfaatan inovasi

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

Arah

Arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang diambil telah mempertimbangkan berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Hal terpenting yaitu keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun 2023-2025 merupakan tahap pembangunan kelima atau terakhir dari RPJPD Kota Sukabumi tahun 2005 - 2025 yang memiliki tema “**Pemeliharaan dan Pengembangan Semua Aspek Pembangunan yang Telah Dilaksanakan pada RPJM sebelumnya**”. Tema pembangunan tersebut menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan RPD yang lebih lanjut akan dijabarkan dalam tema pembangunan setiap tahun dan menjadi pedoman bagi penentuan fokus atau tema pembangunan dalam RKPD tahun 2024 - 2026. Tema pembangunan lima tahunan dalam setiap periode RPJPD disajikan pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1 Tema Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD dan Penjabarannya ke dalam RKPD



Rumusan

Rumusan arah kebijakan untuk merasionalkan pilihan strategi harus memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Fokus atau tema pembangunan setiap tahun selama periode RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Gambar 6.2 Tema Pembangunan RKPDP Tahun 2024-2026



Adapun penjelasan dari masing-masing tema tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fokus/tema pembangunan tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan. Situasi politik yang cenderung meningkat perlu diantisipasi dengan tetap menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik agar keberlangsungan pembangunan tetap terjaga. Oleh karena itu, fokus/tema pembangunan pada tahun 2024 ini adalah:

“Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan”

2. Fokus

2. Fokus/tema pembangunan tahun 2025
Tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan dimana kepala daerah hasil pilkada sudah diketahui. Situasi transisi ini perlu ditangani secara *smooth* dengan mengesampingkan perbedaan di saat kontestansi pilkada. Karena itu, pembangunan yang dilaksanakan harus lebih inklusif dan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, fokus/tema pembangunan pada tahun 2025 ini adalah:

“Menguatkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan”

3. Fokus/tema pembangunan tahun 2026
Tema pembangunan pada tahun ini ditujukan untuk lebih memantapkan capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya dimana Kota Sukabumi diharapkan lebih optimal sebagai pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, fokus/tema pembangunan pada tahun 2026 ini adalah:

“Memantapkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan”

6.2 Program Prioritas

Perumusan program prioritas bertujuan untuk menggambarkan rangkaian “kerja” yang dibutuhkan untuk mencapai “kinerja” tujuan dan sasaran pembangunan. Program prioritas tersebut dihasilkan melalui mekanisme *cascading* tujuan, sasaran, dan *outcome* pembangunan. Proses perumusan program prioritas melalui mekanisme *cascading* dinilai lebih logis dan lebih dapat menjaga kesinambungan tujuan dan sasaran dengan program prioritas yang dihasilkan.

Berdasarkan *cascading* yang dilakukan, program prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 terdiri dari 41 program. Program prioritas yang dihasilkan juga telah disesuaikan dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program prioritas Kota Sukabumi tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.2

Tabel 6.2 Program Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Meningkatnya iklim usaha yang kondusif	Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Diskumindag
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKP3
		Mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu bersaing dipasar domestik dan global	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskumindag
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskumindag
		Meningkatnya promosi produk lokal	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Diskumindag
	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disporapar
		Meningkatnya daya tarik wisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disporapar
			Pemasaran Pariwisata	Disporapar

Terciptanya

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Terpenuhinya SPM pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud
		Meningkatnya literasi masyarakat	Pembinaan Perpustakaan	Dispusip
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terpenuhinya SPM kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan		
		Meningkatnya kepesertaan JKN		
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dalduk KB P3A
		Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Penempatan Tenaga Kerja
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya konektivitas wilayah	Penyelenggaraan Jalan	DPUTR
			Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan sanitasi	Pengelolaan Persampahan	DLH
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR

Meningkatnya

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPUTR
			Kawasan Permukiman	DPUTR
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Terpenuhinya SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP Damkar
		Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesbangpol
		Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan penanganan resiko banjir dan longsor	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTR
		Terpenuhinya SPM bagi warga di kawasan rawan bencana dan warga korban bencana	Penanggulangan Bencana	BPBD
		Terpenuhinya SPM kebutuhan dasar pada saat dan setelah	Penanganan Bencana	Dinsos

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		tanggap bencana bagi korban bencana		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	BKPPD
		Meningkatnya kapasitas ASN	Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Perekonomian dan Pembangunan	Setda-BPBJ
		Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan kebijakan publik	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Setda-Organisasi
			Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda-Hukum
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Setwan			

Meningkatnya

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Aplikasi Informatika	Diskominfo
		Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
	Meningkatnya inovasi daerah	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

Berdasarkan uraian diatas serta penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditentukan *logical framework* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi periode tahun 2024-2026 adalah sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 6.3 Logical Framework Pencapaian Tujuan Kesatu

TUJUAN	TUJUAN									
	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif									
	INDIKATOR TUJUAN									
Laju Pertumbuhan Ekonomi										
SASARAN	SASARAN									
	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa						Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif			
	INDIKATOR SASARAN									
Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB						Indeks Kota Kreatif				
PROGRAM	OUTCOME									
	Meningkatnya iklim usaha yang kondusif	Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan		Mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu bersaing dipasar domestik dan global	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Meningkatnya promosi produk lokal	Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat	Meningkatnya daya tarik wisata		
	INDIKATOR OUTCOME									
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase ketersediaan pangan	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	Nilai tambah ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	
	PROGRAM									
Pelayanan Penanaman Modal	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pemasaran Pariwisata		
INDIKATOR PROGRAM										
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase ketersediaan pangan pokok	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	Nilai tambah ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata		
PD	DPMPTSP	Diskumindag	DKP3	Diskumindag			Disporapar			

Gambar 6.4 ...

Gambar 6.4 Logical Framework Pencapaian Tujuan Kedua

TUJUAN	TUJUAN									
	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif									
	INDIKATOR TUJUAN									
SASARAN	Indeks Pembangunan Manusia									
	SASARAN			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		
	INDIKATOR SASARAN									
	Indeks Pendidikan		Indeks Keluarga Sehat Sukabumi					Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
PROGRAM	OUTCOME									
	Terpenuhinya SPM Pendidikan	Meningkatnya literasi masyarakat	Terpenuhinya SPM Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan			Meningkatnya kepesertaan JKN	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja
	INDIKATOR OUTCOME									
	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan	Prevalensi stunting pada balita	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persentase kepesertaan JKN	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan
	PROGRAM									
	Pengelolaan Pendidikan	Pembinaan Perpustakaan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja
INDIKATOR PROGRAM										
Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan	Prevalensi stunting pada balita	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persentase kepesertaan JKN	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	
PD	Disdikbud	Dispusip	Dinkes				Dalduk KB PPA		Disnaker	

Gambar 6.5 ...

Gambar 6.5 Logical Framework Pencapaian Tujuan Ketiga

TUJUAN	TUJUAN												
	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan												
	INDIKATOR TUJUAN												
SASARAN	Indeks Kota Layak Huni												
	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas						Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana						
	INDIKATOR SASARAN												
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur						Indeks Rasa Aman						
PROGRAM	OUTCOME												
	Meningkatnya konektivitas wilayah	Meningkatnya pengelolaan sampah dan sanitasi	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terpenuhinya SPM ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama	Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan penanganan resiko banjir dan longsor	Terpenuhinya SPM bagi warga di kawasan rawan bencana dan warga korban bencana	Terpenuhinya SPM kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap bencana bagi korban bencana				
	INDIKATOR OUTCOME												
	Tingkat kemantapan jalan kota	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Cakupan pengelolaan sampah	Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentas berkurangnya jumlah RTLH	Luasan pengurangan kawasan kumuh	Indeks Kenyamanan	Indeks RTH	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal trantibmas	Persentase Konflik Antar Inter Umat Beragama yang terselesaikan	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir WS kewenangan kota	Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	Persentase pemenuhan SPM kebutuhan dasar bagi korban bencana
	PROGRAM												
	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan Permukiman	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Penganggulangan Bencana	Penanganan Bencana
INDIKATOR PROGRAM													
Tingkat kemantapan jalan kota	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Cakupan pengelolaan sampah	Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentas berkurangnya jumlah RTLH	Luasan pengurangan kawasan kumuh	Indeks Kenyamanan	Indeks RTH	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal trantibmas	Persentase Konflik Antar Inter Umat Beragama yang terselesaikan	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir WS kewenangan kota	Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	Persentase pemenuhan SPM kebutuhan dasar bagi korban bencana	
PD	DPUTR	Dishub	DLH	DPUTR	DPUTR	DPUTR	DLH	Satpol PP Damkar	Kesbangpol	DPUTR	BPBD	Dinsos	

Gambar 6.6 ...

Gambar 6.6 Logical Framework Pencapaian Tujuan Keempat

TUJUAN	TUJUAN														
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif														
	INDIKATOR TUJUAN														
SASARAN	Indek Reformasi Birokrasi														
	SASARAN														
	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis													Meningkatnya inovasi daerah	
PROGRAM	INDIKATOR SASARAN														
	Indek Reformasi Birokrasi														
	OUTCOME														
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Meningkatnya kapasitas ASN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kebijakan publik			Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek		
	INDIKATOR OUTCOME														
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar	Persentase pencapaian IKU	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Persentase penyelenggaraan pengadaan yang dilakukan secara online	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk hukum daerah	Persentase propempera yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Cakupan pelayanan publik di kecamatan	Persentase pengelolaan aplikasi informatika yang digunakan dalam pemerintahan	Persentase kepemilikan data administrasi kependudukan	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
	PROGRAM														
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perekonomian dan Pembangunan	Penyelenggaraan Pengawasan		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aplikasi Informatika	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Daerah
	INDIKATOR PROGRAM														
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar	Persentase pencapaian IKU	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Persentase penyelenggaraan pengadaan yang dilakukan secara online	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk hukum daerah	Persentase propempera yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Cakupan pelayanan publik di kecamatan	Persentase pengelolaan aplikasi informatika yang digunakan dalam pemerintahan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
PD	Bappeda		BPKPD	BKPSDM	Setda-BPBJ	Inspektorat		Setda-Organisasi	Setda-Hukum	Setwan	Kecamatan	Diskominfo	Disdukcapil	Bappeda	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Sukabumi, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah diproyeksikan pada Bab III RPD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Sukabumi juga telah menerapkan *money follow Priority programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang. Hal ini berarti program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dan mendapatkan anggaran.

Untuk mendanai pembangunan daerah, Pemerintah Kota Sukabumi tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan yang berasal dari APBD tetapi juga memanfaatkan sumber-sumber pendanaan lainnya. Sumber pendanaan lainnya antara lain berasal dari 1) APBN, 2) APBD Provinsi Jawa Barat, 3) Dana Masyarakat/Umat, 4) *Corporate Social Responsibility* (CSR), 5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan 6) Hibah.

Adapun prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Sukabumi dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan prioritas pembangunan serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berdasarkan

Berdasarkan pembahasan pada Bab III, sudah didapatkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Sukabumi tahun 2024-2026, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penentuan pagu indikatif program perangkat Daerah. Adapun proyeksi APBD tersebut sebagaimana tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

KODE	URAIAN	PROYEKSI		
		2024	2025	2026
1	PENDAPATAN DAERAH	997,771,547,239	1,052,815,650,367	1,109,126,566,662
1.1	Pendapatan Asli Daerah	375,433,154,296	409,377,348,952	443,533,392,656
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	64,385,783,945	67,894,809,170	71,595,076,270
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,183,784,385	6,523,892,526	6,882,706,615
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,753,064,486	4,848,125,776	4,945,088,291
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	300,110,521,480	330,110,521,480	360,110,521,480
1.2	Pendapatan Transfer	609,911,892,943	628,775,031,415	648,290,515,406
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat:	525,699,629,300	540,352,154,590	555,446,494,740
1.2.1.1	Dana Perimbangan	525,699,629,300	540,352,154,590	555,446,494,740
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	525,699,629,300	540,352,154,590	555,446,494,740
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	60,401,382,300	63,421,451,415	66,592,523,986
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	465,298,247,000	476,930,703,175	488,853,970,754
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	-	-	-
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik			

1.2.1.1.2.2 Dana

KODE	URAIAN	PROYEKSI		
		2024	2025	2026
1.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus non Fisik			
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah			
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus			
1.2.1.4	Dana Keistimewaan			
1.2.1.5	Dana Desa			
1.2.2	Transfer Antar Daerah	84,212,263,643	88,422,876,825	92,844,020,666
1.2.2.1	Pendapatan bagi hasil;	84,212,263,643	88,422,876,825	92,844,020,666
1.2.2.2	Bantuan Keuangan			
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12,426,500,000	14,663,270,000	17,302,658,600
1.3.1	Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	12,426,500,000	14,663,270,000	17,302,658,600
2	BELANJA DAERAH	1,019,222,383,162	1,071,643,195,184	1,132,108,536,970
2.1	Belanja Operasi	1,099,548,473,468	1,112,250,994,802	1,124,407,971,591
2.1.1	Belanja Pegawai	571,234,364,447	588,383,002,042	591,354,108,071
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	459,141,214,686	468,324,038,980	482,842,084,188
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	64,494,558,972	51,099,535,185	45,989,581,667
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4,678,335,363	4,444,418,595	4,222,197,665
2.2	Belanja Modal	36,698,316,494	44,179,837,182	59,848,813,579

2.2.1 Modal ...

KODE	URAIAN	PROYEKSI		
		2024	2025	2026
2.2.1	Modal Tanah	100,000,000	150,000,000	200,000,000
2.2.2	Modal Peralatan dan Mesin	16,701,278,882	17,536,342,827	21,043,611,392
2.2.3	Modal Gedung dan Bangunan	9,259,642,235	11,759,745,639	14,934,876,961
2.2.4	Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7,536,135,260	11,454,925,595	20,046,119,792
2.2.5	Modal Aset Tetap Lainnya	3,051,260,116	3,203,823,122	3,524,205,434
2.2.6	Modal Aset Lainnya	50,000,000	75,000,000	100,000,000
2.3	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
2.4	Belanja Transfer			
2.4.1	Belanja Bagi Hasil			
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan			
	Surplus / (Defisit) Sebelum Pembiayaan	(21,450,835,923)	(18,827,544,818)	(22,981,970,308)
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	23,450,835,923	24,199,373,077	24,981,970,308
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	23,450,835,923	24,199,373,077	24,981,970,308
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			

3.1.6 Penerimaan

KODE	URAIAN	PROYEKSI		
		2024	2025	2026
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundang an.			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000	5,371,828,260	2,000,000,000
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000	5,371,828,260	2,000,000,000
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan			
	Pembiayaan Neto	21,450,835,923	18,827,544,817	22,981,970,308
	Surplus/(Defisit) Setelah Pembiayaan	(0)	(0)	(0)

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2023

7.2 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD serta melaksanakan urusan sesuai dengan kewengannya. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penyelarasan

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2022;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan Nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Rencana program seluruh Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan pemerintah daerah serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, dapat dilihat pada Tabel 7.2 di bawah ini.

**Tabel 7.2 Program Perangkat Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2024-2026**

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
PENDIDIKAN											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	persen	100	100	131,248,281,004	100	135,159,467,199	100	139,774,668,518	DISDIKBUD
Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Terpenuhi nya SPM Pendidikan	persen	88.93	100	12,514,554,013	100	13,436,679,045	100	13,831,875,488	DISDIKBUD
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Yang dikembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Berkembang nya Kurikulum Muatan Lokal	persen	40	40	47,500,000	45	52,500,000	50	1,167,271,875	DISDIKBUD
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan guru	Terpenuhi nya Kebutuhan Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	angka	0.29	0.2	56,895,310	0.175	62,884,290	0.15	100,000,000	DISDIKBUD
Program Pengendalian Perizinan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	Terpenuhi nya perizinan Satuan Pendidikan	persen	100	100	47,500,000	100	51,000,000	100	85,000,000	DISDIKBUD
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Berkembang nya Bahasa dan Sastra	persen	75	75	25,080,000	90	27,720,000	95	100,000,000	DISDIKBUD

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
						-		-		-	
KESEHATAN											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	persen	100	100	374,057,290,300	100	405,645,017,188	100	435,300,585,466	DINKES
	Persentase Pemenuhan Peningkatan Pelayanan BLUD		persen	100	100	-	100	-	100	-	DINKES
	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	Terpenuhinya SPM kesehatan	persen	90,61	92	38,898,044,628	92	41,764,216,338	92	42,992,575,642	DINKES
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi stunting pada balita	Meningkatny a akses dan mutu pelayanan kesehatan	persen	6,28	6	-	5,75	-	5,5	-	
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Meningkatny a akses dan mutu pelayanan kesehatan	persen	100	100	-	100	-	100	-	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Meningkatny a akses dan mutu pelayanan kesehatan	persen	13,64	15,88		18,16		20,44		
	Persentase kepesertaan JKN	Meningkatny a kepesertaan JKN	persen	98,43	98,5		98,6		98,7		

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	persen	100	100	1,781,576,563	100	1,912,850,625	100	1,969,110,938	DINKES
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pembinaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	Meningkatnya keamanan pangan, obat dan alat kesehatan	persen	100	100	2,000,000	100	50,000,000	100	60,000,000	DINKES
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat kesehatan	Meningkatnya peran serta masyarakat bidang kesehatan	persen	100	100	2,584,968,596	100	2,775,439,967	100	2,857,070,554	DINKES
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	13,860,273,028	100	14,881,556,304	100	15,465,146,747	DPUTR
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor yang	Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan	Persen	57.32	57.37	1,364,082,204	57.42	1,464,593,524	57.47	1,507,669,804	DPUTR

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	Terlindungi Infrastruktur Pengendali Banjir WS Kewenangan Kota	penanganan resiko banjir dan longsor									
Program Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Minum yang Layak dan Aman	Meningkatny a Layanan Air Minum yang Layak dan Aman bagi Masyakarakara t	Persen	100	100.00	409,437,310	100	546,974,796	100	563,062,290	DPUTR
Program Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Meningkatny a pengelolaan persampahan dan sanitasi	Persen	57.87	57.95	1,265,549,905	58.09	2,110,379,898	58.24	2,131,069,897	DPUTR
Program Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Drainase	Persentase Panjang Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	Meningkatny a Lingkungan dalam Kondisi Baik	Persen	41.91	42.46	1,187,500,000	43.02	1,287,500,000	43.58	1,351,875,000	DPUTR
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Sesuai dengan Standar	Meningkatny a Bangunan Gedung yang Sesuai dengan Standar	Persen	9.09	9.38	2,762,296,175	12.36	3,180,570,630	15.13	3,242,934,760	DPUTR
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase RTHKP dalam Kondisi Baik	Meningkatny a RTHKP dalam Kondisi Baik	Persen	78.95	78.95	2,184,783,400	78.95	2,345,767,440	78.95	2,414,760,600	DPUTR

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Meningkatny a konektivitas wilayah	Persen	84.54	85.15	10,467,790,128	85.30	11,239,100,979	85.44	11,569,662,773	DPUTR
	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU		Persen	82,85	83.54		83.87		84.2		
Program Pembangunan Jasa Konstruksi	Persentase Pelaku Sektor Jasa Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan	Meningkatny a Pemahaman Pelaku Sektor Jasa Konstruksi Terhadap Peraturan	Persen	11.70	38.01	47,500,000	49,71	52,500,000	64.33	55,125,000	DPUTR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Meningkatny a Kesesuaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Persen	68.00	70.00	299,716,465	72	321,800,836	75.00	331,265,567	DPUTR
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
Program Pembangunan Perumahan	Persentase Penyediaan Rumah Korban Bencana	Tersedianya Rumah bagi Korban Bencana	Persen	0	100	133,271,672	100	143,091,689	100	147,300,269	DPUTR
Program Kawasan Permukiman	Luasan Pengurangan Kawasan Kumuh	Meningkatny a Kualitas Lingkungan Permukiman dan Permukiman	Ha	19.79	10	3,076,684,393	11	3,303,387,453	11	3,400,545,908	DPUTR

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan oleh Pemerintah Daerah	Meningkatnya PSU Perumahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	Persen	9.76	11.38	84,360,000	13.01	92,352,000	14.63	92,352,000	DPUTR
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Berkurangnya Jumlah RTLH	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persen	1,53	1.37	33,283,820	1,36	52,500,000	1,34	52,500,000	DPUTR
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	9,782,940,955	100	10,812,724,213	100	11,018,680,865	SATPOLPP DAMKAR
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal trantibmas	Terpenuhinya SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100	100	1,281,001,375	100	1,375,390,950	100	1,415,843,625	SATPOLPP DAMKAR
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Waktu Tanggap (Response Time)	Terpenuhinya standar pelayanan minimal trantibum dan perlindungan masyarakat	Persen	100	100	118,749,478	100	128,749,434	100	200,000,000	SATPOLPP DAMKAR

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	2,894,329,964	100	3,198,996,276	100	3,259,929,538	BPBD
Program Penanggulangan Bencana	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	Terpenuhinya SPM bagi warga di kawasan rawan bencana dan warga korban bencana	Poin	0,55	0,57	351,312,423	0,57	377,198,601	0,57	450,000,000	BPBD
SOSIAL											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	4,234,259,902	100	4,546,258,000	100	4,724,542,627	DINSOS

Meningkatnya ...

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS).	Meningkatnya partisipasi aktif PSKS perorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	Persen	40	50	1,753,298,340	55	1,882,488,744	60	1,937,856,060	DINSOS
	Persentase PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS).	Meningkatnya partisipasi aktif PSKS kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	Persen	35	45		50		55		

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	Persentase peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dlm pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/kesetiakawanan sosial/restorasi sosial.	Meningkatnya peran serta pihak-pihak dlm pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/kesetiakawanan sosial/restorasi sosial.	Persen	5	10		15		20		
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang sesuai standar	Terpenuhinya pelayanan rehabilitasi sosial dasar yang sesuai standar bagi PPKS	Persen	100	100	1,331,261,553	100	1,429,354,509	100	1,485,407,627	DINSOS
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang sesuai standar	Terpenuhinya pelayanan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial yang bermutu bagi PPKS	Persen	100	100	206,106,158	100	221,292,927	100	227,801,543	DINSOS
Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	Terpenuhinya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	100	100	1,425,000	100	20,000,000	100	30,000,000	DINSOS

Persentase

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial yang bermutu	Terpenuhinya Pelayanan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial yang bermutu bagi PPKS	Persen	100	100	47,500,000	100	52,500,000	100	55,125,000	DINSOS
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	Terpeliharanya Area Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	20,000,000	100	20,000,000	100	21,000,000	DINSOS
Program Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan dasar bagi korban bencana	Terpenuhinya SPM kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap bencana bagi korban bencana	Persen	100	100	89,152,807	100	95,721,961	100	100,000,000	DINSOS
TENAGA KERJA											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	3,172,101,577	100	3,406,492,906	100	3,545,004,883	DISNAKER
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja secara Makro	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persen	100	100	35,000,000	100	45,000,000	100	50,000,000	DISNAKER

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persen	80	81	408,215,000	82	438,294,000	83	460,208,700	DISNAKER
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persen	80	85	26,600,000	87,5	29,400,000	90	30,870,000	DISNAKER
Program Hubungan Industrial	Persentase Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan ; Keselamatan, Kesehatan dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha	Persen	90	90	65,692,405	90	72,607,395	90	76,237,350	DISNAKER
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Kota	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	persen	78,94	79	160,806,215	80	172,655,094	81	181,287,849	DALDUKKB P2A
Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000)	Meningkatnya Perlindungan Hak Perempuan dari berbagai	persen	0.008	0.008	95,308,845	0.0075	102,331,602	0.007	107,448,075	DALDUKKB P2A

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	penduduk perempuan)	tindak kekerasan									
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dan peran keluarga dalam kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak	persen	72.42	72.5	338,802,167	72.6	363,766,537	72.65	381,954,825	DALDUKKB P2A
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Dokumen	2	2	23,750,000	3	26,250,000	3	27,562,500	DALDUKKB P2A
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan Kategori Kota Layak Anak	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Satuan Tingkatan	Madya	Madya	65,303,000	Nindya	72,177,000	Nindya	75,785,850	DALDUKKB P2A
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	persen	0.034	0.034	61,568,740	0.0335	68,049,660	0.033	71,452,080	DALDUKKB P2A
PANGAN											

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	9,138,245,524	100	9,811,589,931	100	10,196,358,164	DKP3
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kemandirian pangan	Persen	25	25	35,411,013	25	39,138,488	50	75,000,000	DKP3
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan pokok	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persen	100	100	209,304,238	100	224,726,655	100	231,336,263	DKP3
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah kerawanan pangan	Meningkatnya daerah bebas rawan pangan	Persen	100	100	16,335,250	90	18,054,750	90	60,000,000	DKP3
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH)	Meningkatnya keamanan pangan PSAT dan PAH	Persen	96,7	25	6,411,930	90	7,086,870	91	50,000,000	DKP3
PERTANAHAN											
Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah yang Sesuai dengan	Meningkatnya Penatagunaan Tanah yang Sesuai dengan	Persen	68	70	19,000,000	72	21,000,000	75	50,000,000	DPUTR

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	Perencanaan Tata Ruang	Perencanaan Tata Ruang									
LINGKUNGAN HIDUP											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	22,734,759,132	100	24,409,951,910	100	25,367,204,926	DLH
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	Meningkatny a Indeks Kenyamanan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	158,922,270	100	170,632,332	100	175,650,930	DLH
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Lingkungan Hidup	Indeks Kenyamanan	Meningkatny a kualitas lingkungan hidup	Predikat	Nyaman	Nyaman	159,207,935	Nyaman	170,939,046	Nyaman	175,966,665	DLH
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	indeks RTH	Meningkatny a kualitas lingkungan hidup	m2/orang	25	25.5	263,703,625	26	444,187,050	26.5	457,251,375	DLH

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3	Meningkatnya penanganan pengurangan sampah dari sumber	Persen	100	100	8,307,750	100	10,000,000	100	20,000,000	DLH
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya Indeks Kenyamanan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	60,958,698	100	67,375,403	100	70,583,755	DLH
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang mengikuti diklat dan penyuluhan lingkungan hidup	Meningkatnya penanganan pengurangan sampah dari sumber	Persen	0	33	47,500,000	66	52,500,000	100	55,000,000	DLH

Persentase

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase jumlah penghargaan untuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	Meningkatnya penanganan pengurangan sampah dari sumber	Persen	25	25	21,731,108	50	24,018,593	75	25,162,335	DLH
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Meningkatnya Indeks Kenyamanan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	78,308,310	100	86,551,290	100	90,672,780	DLH
Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan pengelolaan sampah	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan sanitasi	Persen	99.55	100	1,044,856,550	100	1,121,845,980	100	1,154,841,450	DLH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	5,654,791,334	100	6,071,460,169	100	6,309,556,646	DISDUKCAPIL
Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas pendaftaran penduduk	persen	91	92	385,265,993	94	413,654,013	96	425,820,308	DISDUKCAPIL
Program Pencatatan Sipil	Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas dokumen pencatatan sipil	Persen	100	100	42,266,070	100	46,715,130	100	50,000,000	DISDUKCAPIL

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan adminisrai kependudukan	Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	Persen	100	100	28,737,500	100	50,000,000	100	52,500,000	DISDUKCAPIL
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Profil Perkembangan Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil perkembangan kependudukan	Persen	100	100	8,906,250	100	20,000,000	100	21,000,000	DISDUKCAPIL
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	5,668,135,016	100	6,085,787,070	100	6,324,445,387	DALDUKKB2A
Program Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	Meningkatnya kepedulian terhadap pengendalian Penduduk	persen	12,5	12,5	123,739,400	25	132,857,040	31,25	136,764,600	DALDUKKB2A
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	persen	64,24	65	128,446,056	65,5	137,910,503	66	141,966,694	DALDUKKB2A

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan keluarga	Meningkatnya Keluarga sejahtera II	persen	62	62	98,482,843	62.2	105,739,473	62,5	108,849,458	DALDUKBP2A
PERHUBUNGAN											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	13,386,002,262	100	14,372,339,271	100	15,076,865,706	DISHUB
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Meningkatnya a konektivitas wilayah	Persen	82,85	83,54	2,497,323,140	83,87	2,681,336,424	84,2	2,839,062,096	DISHUB
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	80	80	4,874,917,700	80	5,285,437,085	80	5,439,381,855	DISKOMINFO

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks KIP	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persen	90	90	367,593,250	90	374,945,115	90	385,972,913	DISKOMINFO
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Persen	90	93	53,239,700	95	100,000,000	97	105,000,000	DISKOMINFO
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	7,917,034,115	100	8,500,394,523	100	8,833,743,328	DISKUMINDAG
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Meningkatnya Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Persen	17,00	19,83	47,500,000	22,66	52,500,000	25,50	55,125,000	DISKUMINDAG
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persen	18,98	19,83	77,330,000	20,68	85,470,000	21,53	89,743,500	DISKUMINDAG

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Mewujudkan UMKM dan wirasaha naik kelas yang mampu bersaing dipasar domestik dan global	Persen	0,01	0,01	1,454,445,611	0,02	1,561,615,288	0,03	1,607,545,149	DISKUMINDAG
Program Pengembangan UMKM	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirasaha	Meningkatnya Pengembangan UMKM	Persen	0,39	0,47	441,275,000	0,63	473,790,000	0,78	487,725,000	DISKUMINDAG
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen	9,9	11,33	19,000,000	11,90	30,000,000	12,46	31,500,000	DISKUMINDAG
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaaan Koperasi	Persen	3,40	6,80	4,207,598	10,20	10,000,000	13,60	10,500,000	DISKUMINDAG
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Meningkatnya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persen	63,74	64,00	6,508,545	65,00	15,000,000	66,00	15,750,000	DISKUMINDAG
PENANAMAN MODAL											

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	96,93	90	4,043,581,724	90	4,341,529,851	90	4,511,785,924	DFMPTSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Perkada Fasilitas Penanaman Modal	Tersedianya Perkada Fasilitas Penanaman Modal	Dokumen	0	1	530,099,525	1	569,159,490	4	585,899,475	DFMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi di Kota Sukabumi	Meningkatnya a Investor yang Berinvestasi di Kota Sukabumi	Persen	28	30	69,031,370	35	100,000,000	40	105,000,000	DFMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Meningkatnya a iklim usaha yang kondusif	Persen	69,3	80	84,733,635	82	100,000,000	85	105,000,000	DFMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kota Sukabumi	Meningkatnya a Investasi di Kota Sukabumi	Persen	-2,60	8	47,500,000	9	75,000,000	10	78,750,000	DFMPTSP
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal oleh Penerima Data	Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal Oleh Penerima Data	Persen	100	100	8,977,500	100	20,000,000	100	21,000,000	DFMPTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA											

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	5,540,171,514	100	5,979,867,666	100	6,214,372,281	DISPORAPAR
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Diberdayakan	Meningkatnya kapasitas pemuda	Persen	80	80	860,913,750	80	924,349,500	80	951,536,250	DISPORAPAR
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Raihan Medali pada Event Olah Raga Tingkat Provinsi dan Nasional	Meningkatnya kapasitas pemuda	Medali	18	18	2,730,120,825	25	3,682,866,570	25	3,791,186,175	DISPORAPAR
STATISTIK											
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penggunaan Statistik Sektoral Untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Meningkatnya Penggunaan Statistik Sektoral untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Persen	60	60	29,658,000	60	100,000,000	65	105,000,000	DISKOMINFO

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
PERSANDIAN											
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keterhubungan Jaring Komunikasi Sandi	Tersedianya Keterhubungan Jaring Komunikasi Sandi	Persen	60	77,5	25,041,450	82,5	100,000,000	87,5	105,000,000	DISKOMINFO
KEBUDAYAAN											
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	Terlestarikannya Cagar Budaya	jumlah	13	13	14,755,210	15	20,000,000	17	21,000,000	DISDIKBUD
Program Pengelolaan Permuseuman	Prosentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Tersedianya Museum yang representatif	persen	35	55	61,750,000	75	75,000,000	80	78,750,000	DISDIKBUD

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap tinjauan Sejarah Lokal	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	persen	30	60	54,671,978	65	75,000,000	70	78,750,000	DISDIKBUD
Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	Meningkatnya Kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	persen	75	76	114,340,765	77	130,000,000	78	136,500,000	DISDIKBUD
Program Pembinaan Sejarah	Persentase Museum Kota Sukabumi yang Representatif	meningkatnya minat masyarakat terhadap sejarah lokal	persen	30	55	47,500,000	75	60,000,000	80	63,000,000	DISDIKBUD
PERPUSTAKAAN											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	4,265,650,125	100	4,579,961,187	100	4,714,665,927	DISPUSIP
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Meningkatnya literasi masyarakat	Angka	65.34	70.5	358,630,700	71	385,056,120	72	396,381,300	DISPUSIP

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Prosentase koleksi budaya etnis dan naskah kuno yang dimiliki	Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan koleksi nusantara	Persen	0.17	1.2	38,000,000	1.5	50,000,000	2	52,500,000	DISPUSIP
KEARSIPAN											
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Meningkatnya tatakelola kearsipn yang baik	Persen	63,12	63.5	126,541,805	64	135,865,938	64.5	139,861,995	DISPUSIP

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawa ban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Meningkatny a tatakelola kearsiapn yang baik	point	66.67	66.8	28,500,000	67.5	50,000,000	68	52,500,000	DISPUSIP
KELAUTAN DAN PERIKANAN											
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas Budidaya Perikanan	Meningkatny a produksi perikanan budidaya	Ton/ha	25,47	25,87	376,556,868	26,08	404,303,163	26,29	416,194,433	DKP3

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Ketersediaan Ikan	Meningkatnya ketersediaan ikan di Kota Sukabumi	Persen	110	110	66,903,465	110	100,000,000	110	105,000,000	DKP3
PARIWISATA											
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Meningkatnya daya tarik wisata	%	21,78	21,80	376,556,868	21,90	404,303,163	22	416,194,433	DISPORAPAR
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Meningkatnya daya tarik wisata	Event	4	4	66,903,465	6	100,000,000	7	105,000,000	DISPORAPAR
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Nilai tambah ekonomi kreatif	Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat	Persen	14	16	376,556,868	19	404,303,163	22	416,194,433	DISPORAPAR

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi	Orang	300	350	66,903,465	400	100,000,000	500	105,000,000	DISPORAPAR
PERTANIAN											
	Produksi Padi	Meningkatnya ketersediaan pangan pokok	Ton GBK	20.73	19.316	336,630,363	19.464	361,434,705	19.512	372,065,138	
	Luas Panen	Meningkatnya ketersediaan pangan pokok	Ha	3.113	2.75		2.8		2.868		
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Lembaga Usaha Tani yang Menerapkan Mekanisasi Pertanian dengan Baik	Meningkatnya lembaga usaha tani yang menerapkan mekanisasi pertanian dengan baik	Persen	65	65		70		75		DKP3
	Produksi Daging	Meningkatnya ketersediaan pangan	Ton	5.844,3	5.902,74		5.961,77		6.021,38		
	Luas Lahan Pertanian Organik	Meningkatnya pendapatan petani organik	Ha	6,10	6,1		6,1		6,1		

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Meningkatka n ketersediaan pangan	Ha	46,9	48,9	299,018,200	50,9	321,051,120	52,9	330,493,800	DKP3
	Persentase Ketersediaan Data Ketahanan Pangan /Pertanian	Meningkatka n ketersediaan pangan	Persen	100	100		100		100		
	Persentase Prasarana yang Digunakan	Meningkatny a pemanfaatan prasarana yang digunakan	Persen	100	100		100		100		
	Persentase Peningkatan Peserta Sekolah Agro di KAC	Meningkatny a pengetahuan masyarakat terhadap agribisnis	Persen	59,54	10		10		10		
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Meningkatny a pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	100	100	83,206,239	100	100,000,000	100	105,000,000	DKP3
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Meningkatny a Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	55	55		60		65		

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Lahan Pertanian yang Mengikuti AOTP	Meningkatnya Luas Lahan Pertanian yang Mengikuti AOTP	Persen	25,67	30	8,198,263	35	20,000,000	40	21,000,000	DKP3
Program Penyuluh Pertanian	Persentase Lembaga Usaha Tani yang Berbadan Hukum	Meningkatnya Lembaga Usaha Tani yang Berbadan Hukum	Persen	6,88	7	152,318,108	7,5	163,541,547	8	168,351,593	DKP3
	Persentase Lembaga Usaha Tani dengan Katagori Kelas Utama	Meningkatnya Lembaga Usaha Tani dengan Katagori Kelas Utama	Persen	6,75	6,75		7,5		8		
PERDAGANGAN											
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Persen	40	60	1,410,000,688	80	1,513,895,475	100	1,558,421,813	DISKUMIND AG
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Persen	4,88	5,88	4,050,563	6,38	20,000,000	6,88	21,000,000	DISKUMIND AG

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Meningkatnya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persen	27	33,33	86,278,573	38,89	95,360,528	44,44	100,128,554	DISKUMIND AG
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Dilaksanakan	Meningkatnya promosi produk lokal	Persen	100	100	47,500,000	100	52,500,000	100	55,125,000	DISKUMIND AG
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Dokumen Perizinan Pendaftaran Perusahaan yang Difasilitasi	Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	persen	100	100	19,000,000	100	50,000,000	100	52,500,000	DISKUMIND AG
Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Meningkatnya Pengembangan Ekspor	US\$	22.396.225,21	22.396.225,21	12,017,500	22.396.225,21	50,000,000	22.396.225,21	52,500,000	DISKUMIND AG
PERINDUSTRIAN											
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persen	3,19	3,55	1,298,215,850	4,05	1,393,873,860	4,55	1,434,870,150	DISKUMIND AG

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Mendapatkan Legalitas Usaha	Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persen	100	100	47,340,400	100	54,815,200	100	57,555,960	DISKUMIND AG
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pameran yang Dilaksanakan dan Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	100	100	34,559,670	100	40,016,460	100	42,017,283	DISKUMIND AG
TRANSMIGRASI											
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pelaksanaan MOU/ Kerjasama Antar Wilayah Transmigrasi dan Terkirimnya Calon Transmigrasi ke Wilayah Transmigrasi	Fasilitasi Calon Transmigran Kota Sukabumi	Persen	90	95	34,294,525	95	39,709,450	95	50,000,000	DISNAKER
SEKRETARIAT DAERAH											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	34,045,181,650	100	35,800,087,920	100	37,554,994,191	

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	Persentase Peringkat Daerah yang Mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Menenuhi Aspek Penilaian	Meningkatnya kualitas koordinasi kebijakan dibidang Organisasi, Keprotokolian dan umum	Persen	74,19	80	85		90			
	Indeks Pelayanan Publik		Persen	3,27	3,40	3,50		3,60			
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah		Persen	100	100	100		100			
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kebijakan publik	Persen	100	100	14,311,122,231	100	15,365,625,974	100	15,968,199,541	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas koordinasi dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesra	Persen	90	90		90		90	SETDA	
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persen	93,75	100		100		100		
	Persentase Pengendalian	Meningkatnya kualitas	Persen	100	100	533,037,058	100	572,313,473	100	594,757,138	SETDA

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan APBD	koordinasi kebijakan dibidang Perekonomia n,									
	Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	Administrasi Pembanguna n dan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100		100		100		
	Persentsse Penyelenggaraan Pengadaan yang Dilaksanakan secara Online	Meningkatny a kualitas penyelenggar aan pengadaan barang dan jasa	Persen	100	100		100		100		
SEKRETARIAT DPRD											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	37,431,290,605	100	38,179,916,417	100	39,677,168,041	SETWAN
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Meningkatny a kualitas pelayanan dan kebijakan publik	Persen	100	100	15,284,347,850	100	15,590,034,807	100	16,201,408,721	SETWAN
PERENCANAAN											

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	9,022,034,880	100	10,413,828,026	100	10,612,186,655	BAPPEDA
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sesuai Standar	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian , dan evaluasi pembangunan	Persen	100	100	1,742,378,708	100	1,889,105,336	100	1,944,127,821	BAPPEDA
	Persentase Pencapaian IKU		Persen	96	100		100		100		
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Tingkat Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian , dan evaluasi pembangunan	Persen	100	100	1,835,757,390	100	2,028,995,010	100	2,086,966,296	BAPPEDA
KEUANGAN											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	34,562,801,672	100	38,422,043,954	100	39,153,892,410	BPKPD

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan	Meningkatny a pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Persen	96,67	97,33	2,474,064,684	97,66	2,650,783,590	98	2,701,274,706	BPKPD
						12,217,680,327		20,014,761,688		28,129,790,057	PPKD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku	Meningkatny a pengelolaan barang milik daerah sesuai dngan peraturan perundang- undangan yang berlaku	Persen	90	90	1,342,994,908	90	1,484,362,793	90	1,512,636,370	BPKPD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pajak Daerah	Meningkatny a capaian pajak daerah	Persen	100	100	3,074,865,950	100	3,398,536,050	100	3,463,270,070	BPKPD
KEPEGAWAIAN											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	95	95	5,365,134,097	100	5,760,459,768	100	5,986,360,151	BKPSDM

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Kepegawaian Daerah	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja	Meningkatnya pengelolaan Kepegawaian	Point	60	61	507,720,043	61.6	561,164,258	62	571,853,101	BKPSDM
	Nilai Kriteria Pengembangan Karir		Point	62.5	63		63.4		64		
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Meningkatnya kapasitas ASN	Persen	7.68	7.9	1,257,203,305	8	1,389,540,495	8.5	1,416,007,933	BKPSDM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase PD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Meningkatnya daya guna inovasi dan pengembangan Iptek	Persen	35	100	770,564,975	10	1,183,256,025	100	1,205,794,235	BAPPEDA
PENGAWASAN											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	70	90	7,124,935,779	93	7,712,559,349	96	7,859,465,241	INSPEKTORAT

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	Meningkatny a penyelenggar aan pengawasan	Persen	45	76	629,008,625	77	680,885,625	78	706,824,125	INSPEKTORAT
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti		Persen	45	80		81		82		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Maturitas SPIP	Meningkatny a Penyelenggar aan Pemerintaha n Daerah yang Akuntabel	Level	3	3	672,099,764	3	727,530,673	3	755,246,127	INSPEKTORAT
	Leveling Kapabilitas APIP		Level	3	3		3		3		
KECAMATAN CIKOLE											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	8,262,724,214	100	9,132,484,658	100	9,219,460,702	KEC. CIKOLE
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatny a penyelenggar aan pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100	1,771,351,475	100	1,901,872,110	100	1,957,809,525	KEC. CIKOLE

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum musrenbang	Persen	100	100	2,309,767,158	100	2,479,960,527	100	2,674,467,235	KEC. CIKOLE
Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	71,025,420	100	78,501,780	100	82,426,869	KEC. CIKOLE
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan Monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Terlaksananya monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	47,500,000	100	52,500,000	100	55,125,000	KEC. CIKOLE
KECAMATAN GUNUNG PUYUH											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	6,473,903,067	100	7,155,366,547	100	7,223,512,895	KEC. GUNUNG PUYUH
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100	1,388,179,995	100	1,490,466,942	100	1,534,304,205	KEC. GUNUNG PUYUH

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum musrenbang	Persen	100	100	1,545,719,588	100	1,659,614,715	100	1,789,780,575	KEC. GUNUNG PUYUH
Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	32,626,800	100	50,000,000	100	52,500,000	KEC. GUNUNG PUYUH
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan Monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Terlaksananya monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	47,500,000	100	50,000,000	100	52,500,000	KEC. GUNUNG PUYUH
KECAMATAN CITAMIANG											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	99.7	100	7,187,226,284	100	7,943,776,420	100	8,019,431,433	KEC. CITAMIANG
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persen	96,8	97	1,165,047,653	97.3	1,250,893,269	97.5	1,287,684,248	KEC. CITAMIANG

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum musrenbang	Persen	100	100	1,624,856,155	100	1,744,582,398	100	1,881,412,390	KEC. CITAMIANG
Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam bidang keamanan	Persen	72,2	100	46,258,540	100	50,000,000	100	52,500,000	KEC. CITAMIANG
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan Monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Terlaksananya monitoring penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	99,4	100	47,500,000	100	50,000,000	100	52,500,000	KEC. CITAMIANG
KECAMATAN WARUDOYONG											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	7,320,960,809	100	8,091,588,263	100	8,168,651,008	KEC. WARUDOYONG
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persen	88,17	88,25	1,534,900,845	88,3	1,647,998,802	88,35	1,696,469,355	KEC. WARUDOYONG

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum musrenbang	Persen	100	100	1,825,237,280	100	1,959,728,448	100	2,113,432,640	KEC. WARUDOYO NG
Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	43,773,340	100	50,000,000	100	52,500,000	KEC. WARUDOYO NG
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan Monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Terlaksananya monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	49,825,600	100	55,000,000	100	57,750,000	KEC. WARUDOYO NG
KECAMATAN BAROS											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	6,084,742,023	100	6,725,241,183	100	6,789,291,099	KEC. BAROS
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100	1,118,313,733	100	1,200,715,797	100	1,236,030,968	KEC. BAROS

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum musrenbang	Persen	100	100	1,220,611,823	100	1,310,551,641	100	1,413,340,005	KEC. BAROS
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Meningkatnya a Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	39,481,098	100	50,000,000	100	52,500,000	KEC. BAROS
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan Monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Terlaksananya monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	16,626,710	100	50,000,000	100	52,500,000	KEC. BAROS
KECAMATAN LEMBURSITU											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	6,636,229,252	100	7,334,779,700	100	7,404,634,745	KEC. LEMBURSITU
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya a penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100	1,393,088,408	100	1,495,737,027	100	1,539,729,293	KEC. LEMBURSITU

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum musrenbang	Persen	100	100	1,605,851,388	100	1,724,177,280	100	1,859,406,870	KEC. LEMBURSITU
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	45,525,520	100	50,000,000	100	52,500,000	KEC. LEMBURSITU
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan Monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Terlaksananya monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	13,395,000	100	50,000,000	100	52,500,000	KEC. LEMBURSITU
KECAMATAN CIBEUREUM											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	6,501,907,426	100	7,186,318,734	100	7,254,759,865	KEC. CIBEUREUM

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatny a penyelenggar aan pelayanan publik di kecamatan	Persen	87,69	80	1,128,114,811	80	1,211,239,061	80	1,246,863,739	KEC. CIBEUREUM
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan	Menigkatnya partisipasi LKK dalam forum musrenbang	Persen	30,5	31	1,420,120,040	31,5	1,524,760,464	31,5	1,644,349,520	KEC. CIBEUREUM
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan	Meningkatny a Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	75	75	42,286,400	75	50,000,000	75	52,500,000	KEC. CIBEUREUM
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan Monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Terlaksananya a monitoring Penyelenggar aan Urusan Pemerintah an Umum di Kecamatan	Persen	100	100	30,221,875	100	50,000,000	100	52,500,000	KEC. CIBEUREUM
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	persen	100	100	3,517,568,244	100	3,887,838,586	100	3,961,892,654	KESBANGPOL
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan di Masyarakat	persen	100	100	595,846,064	100	815,368,298	100	856,136,713	KESBANGPOL
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik di masyarakat	Meningkatnya Pemahaman tentang Politik di Masyarakat	persen	100	100	778,148,837	100	835,486,120	100	868,250,281	KESBANGPOL
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Dimilikinya Database Organisasi Masyarakat yang Akurat	persen	82.5	86	528,987,645	86	567,965,682	86	590,238,846	KESBANGPOL
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang terselesaikan	Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama	persen	100	100	357,960,000	100	384,336,000	100	399,408,000	KESBANGPOL

BIDANG URUSAN/UNSUR PENUNJANG/ PROGRAM	INDIKATOR	OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET DAN PAGU INDIKATIF						PD PENANGGUN G JAWAB
					2024		2025		2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial Yang Diantisipasi	Terciptanya Stabilitas dan Kondusifitas di Masyarakat	persen	100	100	32,571,252,805	100	2,871,689,940	100	3,008,437,080	KESBANGPO L

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan itu tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan pencapaian *outcome* dan *output* saja, akan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan baik internal dan eksternal.

Penetapan IKU yang dijabarkan dalam bentuk target setiap tahun akan menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Sukabumi.

Oleh karena itu, dalam penentuan target IKU Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 tetap memperhatikan capaian target IKU pada periode sebelumnya dan memperhatikan kecenderungan/tren di masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian IKU tersebut. Karena itu, IKU Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 akan terdiri dari 12 indikator. Adapun IKU Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 8.1.

8.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Di mana keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut direfleksikan dalam tiga aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan indikator seni budaya dan olahraga. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, serta inovasi dan kreativitas daerah. Adapun aspek pelayanan umum dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan non dasar dan urusan pilihan.

Dalam penentuan target IKD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 tetap memperhatikan capaian target IKD pada periode sebelumnya dan memperhatikan kecenderungan/tren di masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian IKD tersebut. IKD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 8.2.

Tabel 8.1

**Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sukabumi
Tahun 2024-2026**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,35	5,37	5,39	5,41	Diskumindag, Disporapar, DKP3, DPMPSTP, Disnaker, Bappeda
2	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	3,80	4,00	4,20	4,40	Diskumindag, DKP3, DPMPSTP, Bappeda
3	Indeks Kota Kreatif	Poin	29,43	30,93	32,43	33,95	Disporapar, Bappeda
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,40	75,55	75,75	75,80	Disdikbud, Dinkes, Diskumindag, Bappeda
5	Indeks Pendidikan	Poin	71,55	71,58	71,68	71,77	Disdikbud
6	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi	Poin	0,31	0,33	0,35	0,37	Dinkes
7	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Pekerja	30,899	34,001	35,769	37,736	Disnaker
8	Indeks Kota Layak Huni	Poin	64,50	65,00	65,25	65,50	DPUTR, DLH, Dishub, Dinkes, Disdikbud, Diskumindag, Dinsos, Bappeda
9	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	85,20	86,00	86,20	86,50	DPUTR, Dishub, DLH, Bappeda
10	Indeks Rasa Aman	Poin	75,31	75,40	75,55	75,60	Setda, Bakesbangpol, Satpol PP
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	71,05	73	74	75	Setda, Inspektorat, Bappeda
12	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Bappeda

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023

Tabel 8.2

**Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Sukabumi
Tahun 2024-2026**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,35	5,37	5,39	5,41	Diskumindag, Disporapar, DKP3, DPMPPTSP, Disnaker, Bappeda
2	Rasio Gini	Poin	0,482	0,475	0,470	0,460	Diskumindag, Disnaker, Dinsos, Bappeda
3	Angka Kemiskinan	Persen	8,02	8,00	7,96	7,94	Dinsos, Bappeda
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,40	75,55	75,75	75,80	Disdikbud, Dinkes, Diskumindag, Bappeda
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,83	8,41	8,25	8,00	Diskumindag, Disnaker, Bappeda
6	Pendapatan Per Kapita a. ADHK b. ADHB	Juta Juta	26,161 39,820	27,132 42,608	27,897 44,977	29,298 47,477	Diskumindag, Disporapar, DKP3, DPMPPTSP, Bappeda
7	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,14	10.15	10.17	10.19	Disdikbud
8	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,59	13.59	13.60	13.61	Disdikbud
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,85	73	73,20	73,5	Dinkes
10	Prevalensi Stunting	Persen	4.03	14	13.90	13.85	Dinkes
11	Indeks Ketahanan Keluarga	Poin	79,63	79,64	79,69	79,74	DaldukkBPPA
12	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	84.8	86.5	87.3	88.1	DKP3

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
13	Indeks Pembangunan Gender	Poin	91,83	91.93	92.03	92.13	DaldukkBPPA
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran Per Kapita	Rp/Orang	935.750	966.693	982.546	998.660	Diskumindag, Disporapar, DKP3, DPMPPTSP, Bappeda
2	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	84,54	85	86	87	DPUTR
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	78.10	78.13	78.16	78.19	Kesbangpol, Kesra, SatpolPP
4	Rasio Ketergantungan	Persen	45,97	44,90	44,83	44,73	Disdukcapil, Bappeda
ASPEK PELAYANAN UMUM							
PENDIDIKAN							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	79	100	100	100	Disdikbud
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99.18	100	100	100	Disdikbud
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	96.54	100	100	100	Disdikbud

4. Tingkat

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	100	100	Disdikbud
KESEHATAN							
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Angka	317,28/ 1000 pddk	320/1000 pddk	322/1000 pddk	324/1000 pddk	Dinkes
2	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	Dinkes
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	99,9	100	100	100	Dinkes
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	Dinkes
5	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	99,9	100	100	100	Dinkes
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	95,6	100	100	100	Dinkes
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	91,2	100	100	100	Dinkes

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	53,1	100	100	100	Dinkes
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	91,6	100	100	100	Dinkes
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	91,6	100	100	100	Dinkes
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	Dinkes
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	81,6	100	100	100	Dinkes
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	95,1	100	100	100	Dinkes
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	97,7	100	100	100	Dinkes

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Rasio

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	Persen	57,32	62,18	67,03	71,89	DPUTR
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	55,41	56,18	56,94	57,70	DPUTR
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	DPUTR
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	57,87	58,30	58,73	59,16	DPUTR
5	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	DPUTR
6	Tingkat kemandapan jalan kabupaten/kota	Persen	84,54	85,00	86,00	87,00	DPUTR
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompeten	Persen	11,70	40,94	55,56	73,10	DPUTR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	DPUTR
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	DPUTR
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	0,15	9,95	23,02	32,82	DPUTR
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	1,53	0,96	0,53	0,01	DPUTR
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	100	DPUTR
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	Satpol PP Damkar
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	Satpol PP Damkar
3	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	93	94	95	95	BPBD

4. Warga

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
4	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	93	94	95	95	BPBD
5	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	93	94	95	95	BPBD
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	Satpol PP Damkar
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	8,9	< 12	< 12	< 12	Satpol PP Damkar
8	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	Poin	0,53	0,55	0,56	0,57	BPBD
SOSIAL							
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	100	Dinsos
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	Dinsos

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
TENAGA KERJA							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	Disnaker
2	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	Persen	27,88	28	28.5	29	Disnaker
3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	25,61	27,5	30	32,5	Disnaker
4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	80	90	90	90	Disnaker
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	78,94	50	60	80	Dalduk KB P2A
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Angka	0,034	0,034	0,0335	0,033	Dalduk KB P2A
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	0,008	0,008	0,0075	0,007	Dalduk KB P2A

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
PANGAN							
1	Persentase ketersediaan cadangan pangan pokok Pemerintah	Persen	20,75	22	23	23	DKP3
PERTANAHAN							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	85,37	86,37	87,37	88,37	DPUTR
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	0	0,04	0,05	0,06	DPUTR
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	85,37	86,37	87,37	88,37	DPUTR
LINGKUNGAN HIDUP							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/kota	Poin	59,71	59,80	59,90	60,00	DLH
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	Persen	99,86	99,00	100	100	DLH
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	0,03	0,04	0,05	0,06	DLH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	99,43	100	100	100	Disdukcapil
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	57,99	60	70	80	Disdukcapil
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	98,90	100	100	100	Disdukcapil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	15	73,91	87	100	Disdukcapil
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2	2,16	2,14	2,12	Dalduk KB P2A
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Persen	74,62	67	67,5	68	Dalduk KB P2A
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	9,24	11,13	11,12	11,12	Dalduk KB P2A
PERHUBUNGAN							
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Angka	1	1	1	1	Dishub
2	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	Angka	0,37	0,36	0,35	0,34	Dishub

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	35	40	50	60	Diskominfo
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	35	40	45	50	Diskominfo
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Persen	62	65	65	70	Diskominfo
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	18,98	19,83	20,68	21,53	Diskumindag
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	0,47	0,47	0,63	0,78	Diskumindag
PENANAMAN MODAL							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	-2,60	10	10	10	DPMPSTP
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							

1. Tingkat

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	24.19	25,47	26,69	27,99	Disporapar
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	22.58	22,63	22,64	22,68	Disporapar
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	17	18	25	50	Disporapar
STATISTIK							
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	50	55	60	65	Diskominfo
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	50	55	60	65	Diskominfo
PERSANDIAN							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	20	20	25	25	Diskominfo
2	Persentase keterhubungan jaring komunikasi sandi	Persen	0	60	70	80	Diskominfo
KEBUDAYAAN							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Unit/ Persen	73.33	76	77	78	Disdikbud

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
PERPUSTAKAAN							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	70,10	72	73	74	Dispusip
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	96,85	98	98,02	98,05	Dispusip
KEARSIPAN							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	63,12	64	64,50	64,80	Dispusip
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	66,67	67	67,50	68	Dispusip
KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota	Jumlah (ton)	25,47	25,87	26,08	26,29	DKP3
PARIWISATA							

1. Persentase

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	2.24	3.1	3.2	3.3	Disporapar
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	21.97	2.00	23.5	24	Disporapar
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen/Hari	82.05	85	86	87	Disporapar
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	271,81	272	272.1	272.2	Disporapar
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	22.448.213.698	22.448.213.689	22.448.213.698	22.448.213.698	Disporapar
PERTANIAN							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton	20.730	19.316	19.464	19.512	DKP3
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	100	100	100	DKP3
PERDAGANGAN							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	80	80	80	80	DPMPSTP
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	45,16	55	65	75	DKP3

3. Persentase

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	208,75	28,57	33,33	38,1	Diskumindag
PERINDUSTRIAN							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	3,19	3,55	4,05	4,55	Diskumindag
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	10	10	10	10	DPMPTSP
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	80	80	80	80	DPMPTSP
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	80	80	80	80	DPMPTSP

5. Tersedianya

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Buku	1	1	1	1	Diskumindag
SEKRETARIAT DAERAH							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	Setda
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	3,3	3	2,5	2	Setda
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	62,74	63	64	65	Setda
4	Prosentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	Persen	37,23	38	39	40	Setda
5	Persentase penyelenggaraan pengadaan yang dilakukan secara online	Persen	100	100	100	100	Setda
6	Indeks Pelayanan Publik	Persen	3,27	3,40	3,50	3,60	Setda
7	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan	Persen	100	100	100	100	Setda
SEKRETARIAT DEWAN							

1. Persentase

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
1	Persentase properpmda yang ditetapkan dengan peraturan daerah	Persen	100	100	100	100	Setwan
PERENCANAAN							
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	Bappeda
2	Persentase pencapaian IKU	Persen	100	100	100	100	Bappeda
3	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	Persen	100	100	100	100	Bappeda
KEUANGAN							
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD
2	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	28,82	29,54	30,27	31,02	BPKPD
3	Rasio PAD	Persen	2,69	2,82	2,96	3,11	BPKPD
4	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	86,18	87	88	89	BPKPD
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	3,87	4	5	6	BPKPD
6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	0,31	1,5	2	3	BPKPD
7	Manajemen aset	Persen	95	90	90	90	BPKPD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	10,79	9	8	7	BPKPD
9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	100	BPKPD
10	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	96,67	97,33	97,66	98	BPKPD
KEPEGAWAIAN							
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	76,06	78	79	80	BKPSDM
2	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	7,8	8,1	8,5	8,7	BKPSDM
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	37,6	38	38,5	39	BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Persen	7,68	7,9	8	8,5	BKPSDM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							

1. Persentase

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
1	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	100	100	Bappeda
PENGAWASAN (INSPEKTORAT)							
1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Persen	45	76	77	78	Inspektorat
2	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Persen	45	80	81	82	Inspektorat
3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	Inspektorat
4	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	Inspektorat
KEWILAYAHAN (KECAMATAN)							
1	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Cikole	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Cikole
2	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Gunung Puyuh	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Gunung Puyuh
3	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Citamiang	Persen	96,8	97.0	97.3	97.5	Kecamatan Citamiang
4	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Warudoyong	Persen	88,17	88,25	88,3	88,35	Kecamatan Warudoyong

5. Cakupan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	
5	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Baros	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Baros
6	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Lembur Situ	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Lembur Situ
7	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Cibeureum	Persen	87,69	80	80	80	Kecamatan Cibeureum
PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL)							
1	Persentase konflik antar/inter umat beragama yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	Bakesbangpol

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023

BAB IX PENUTUP

RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 merupakan kerangka pembangunan menengah daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 yang memperhatikan isu strategis aktual. RPD ini disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan hingga terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi definitif hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2024.

RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas, kerangka pendanaan dan program perangkat daerah, serta kinerja pemerintahan daerah akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 tidak hanya memberikan arahan pembangunan untuk Pemerintahan Kota Sukabumi saja tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Sukabumi. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintahan, masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan program-program pembangunan dalam RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kota Sukabumi akan tercermin dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI